

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KEUANGAN TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pemerintah telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran utama yang menjadi *ultimate goal* pada Indonesia Emas 2045 antara lain: pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

Visi Indonesia Emas merupakan visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pencapaian visi dimaksud melalui tahapan pembangunan menengah lima tahunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada periode ini rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,3%-8,0%. Dengan skenario transformatif dan super transformatif, sasaran pembangunan nasional, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 4,0%-5,0%; tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 4,5%-5,0%; Rasio Gini ditargetkan pada kisaran 0,372-0,375; Indeks Modal Manusia pada angka 0,59; dan penurunan intensitas emisi GRK pada angka 62,37%.

Target dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025-2029 merupakan periode renstra pertama dalam RPJPN 2025-2045 dan akan menjadi tahapan penting dalam meletakkan dasar-dasar transformasi yang akan menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Selain itu renstra ini juga akan mendukung *engine of growth* yang baru antara lain: industri/ekonomi biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi hingga produk akhir dan industri/ekonomi hijau.

Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kemenkeu yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kemenkeu, dokumen ini juga menunjukkan peran Kemenkeu dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Selain itu,

penyusunan Renstra Kemenkeu juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kemenkeu diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 memerhatikan beberapa hal, antara lain perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan perkembangan perekonomian terkini antara lain: risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, pemulihan perekonomian global belum kuat dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, pemulihan aktivitas manufaktur global masih terbatas, serta sebagian besar negara berkembang (EMs) masih dalam tekanan yang tinggi, dan pemerataan pembangunan di tanah air yang belum cukup merata.

Sebagai langkah dalam merancang strategi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi kondisi umum dan memetakan potensi dan masalah. Tahapan evaluasi kondisi umum terdiri atas evaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya dan menjangkau aspirasi masyarakat. Pemetaan potensi dan permasalahan dilakukan dengan menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah baik lingkup Kemenkeu maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045 serta masuk dalam lingkup kesesuaian tugas dan fungsi serta kewenangan Kemenkeu.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup Kemenkeu. Evaluasi telah dilakukan pada paruh waktu pertama dan di akhir periode Renstra. Secara umum, Kemenkeu telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Kemenkeu mendukung pencapaian 7 (tujuh) Agenda Pembangunan 2020-2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dalam bentuk penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional.

Secara umum seluruh strategi Kemenkeu dalam rangka pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 telah diimplementasikan oleh unit eselon I lingkup Kemenkeu dengan capaian sesuai target. Rincian capaian indikator terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Capaian Indikator RPJMN 2020-2024 terkait Kementerian
Keuangan

Agenda Pembangunan	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Rasio perpajakan terhadap PDB (%) [*]	8,51 - 8,69	8,25 - 8,63	8,27 - 8,70	8,38 - 9,09	8,59 - 9,55	8,17	9,11	10,41	10,31	10,08

Agenda Pembangunan	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
yang Berkualitas dan Berkeadilan											
	Imbal Hasil (<i>Yield</i>) Surat Berharga Negara (%)	Naik	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun (6,69)	Turun (5,98)	Naik (6,62)	Tetap (6,62)	Naik (6,78)
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	22,94	25,94	28,94	31,94	34,94	26,05	26,18	29,05	33,72	48,29
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>Core tax administration system</i>) (%)	1,97	11,9	48,0	87,8	100	1,97	28	66	86	100
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	n/a	92%	93%	94%	95%	n/a	97,7%	95,4%	98,8%	95,24%

Capaian implementasi strategi sebagai perwujudan dukungan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024:

AGENDA PEMBANGUNAN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan dengan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang mengatur *tax holiday* atas sektor pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi, dilaksanakan dengan pemberian insentif fiskal untuk mendorong kegiatan ekspor bagi Industri Kecil Menengah (IKM) melalui PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan tujuan untuk Diekspor. Dukungan agar terciptanya peluang usaha dan *start-up*, dilakukan dengan memberikan insentif fiskal melalui penerbitan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan dengan melakukan perbaikan regulasi dalam *Omnibus law* maupun turunannya yang berkaitan dengan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan serta pemberian insentif fiskal, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP).
 - b. Pengaturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengenai penyederhanaan Retribusi Daerah.
 - c. Penerbitan PMK Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Penerbitan PMK Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi, yang mengatur perluasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk bagi industri pendukung (*supporting industries*).

Selain dari sisi regulasi, penerapan sistem perizinan berusaha elektronik juga telah dilaksanakan untuk mendorong investasi dan industrialisasi dalam hal simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi dan penyediaan infrastruktur sistem informasi pendukung otomasi penerbitan SKB dan SKTD BKP Strategis.

4. Arah Kebijakan Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan melalui beberapa strategi dengan meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Penerbitan PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, yang mengatur tentang Pengembalian KITE dan PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, yang mengatur tentang Pembebasan KITE serta PMK Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana diubah

dengan PMK Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, yang mengatur tentang Pembebasan KITE (Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan jumlah perusahaan KITE, dimana sampai dengan bulan Desember tahun 2024 telah terdaftar sebanyak 190 perusahaan KITE pembebasan, 105 perusahaan KITE pengembalian, dan 126 perusahaan KITE IKM.

5. Arah Kebijakan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, salah satunya dengan strategi meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dengan pengembangan *national logistics ecosystems* dan reformasi fiskal telah dilaksanakan selama periode 2020-2024.

Perbaikan sistem logistik nasional melalui simplifikasi proses bisnis dan integrasi teknologi informasi dalam kerangka *National Single Window* telah berdampak signifikan kepada pelaku usaha dari aspek efisiensi waktu dan biaya. Pada tahun 2023, implementasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) di 14 pelabuhan menghasilkan efisiensi waktu dengan rata-rata sebesar 51,5% dan efisiensi biaya sebesar 34,7%. Selanjutnya tahun 2024 implementasi NLE menghasilkan efisiensi waktu rata-rata sebesar 46,32% dan efisiensi biaya sebesar 44,97% pada 32 pelabuhan baru lainnya (Survei PROSPERA dan Kementerian Keuangan). Selain itu, *preliminary research* pada 6 bandara tahun 2024 menunjukkan implementasi NLE menghasilkan rata-rata efisiensi waktu sebesar 73% dan efisiensi biaya sebesar 17% (kajian internal Tim NLE).

Dari sisi reformasi fiskal, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara, beberapa hal signifikan yang telah dilaksanakan antara lain pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) dan modernisasi CEISA. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak juga dilaksanakan dengan pembangunan basis data perizinan dan pemajakan penghasilan penyedia konten digital serta penyusunan kajian potensi cukai atas *luxury goods*, produk minuman berpemanis dalam kemasan, produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik *multilayer*, *styrofoam* dan sedotan plastik), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, sepeda motor, batu bara, dan pasir laut; kebijakan tarif cukai hasil tembakau; dan kebijakan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol. Khusus selama masa pandemi Covid-19, pemberian insentif fiskal untuk sektor-sektor yang terdampak juga dilaksanakan secara selektif dan terukur untuk menjaga roda perekonomian.

AGENDA PEMBANGUNAN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Arah kebijakan dan capaian pada Agenda Pembangunan 2 antara lain sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dilaksanakan dengan strategi optimalisasi

pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, dengan capaian antara lain:

- a. Penugasan kepada LPEI untuk pengembangan infrastruktur marina dan penunjang destinasi pariwisata super prioritas, serta menyediakan pembiayaan ekspor untuk mendukung KEK Pariwisata Mandalika II.
 - b. Kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang UMKM dan bidang IKM.
 - c. Penguatan kebijakan PDRD untuk meningkatkan *local taxing power* dalam rangka penguatan kemandirian daerah.
 - d. Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana PK2UMK (Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil), Dana PK2SIKM ((Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM dalam Industri, Khusus Industri Kecil dan Menengah), serta Dana FPM (Fasilitasi Penanaman Modal).
2. Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, serta Kemandirian Daerah, dilaksanakan melalui strategi:
- a. Peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa (Aceh, Papua, dan Papua Barat) untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pengembangan kerjasama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, yang diimplementasikan melalui penyelesaian Hibah dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB), monitoring dan evaluasi terhadap DOB, serta pembayaran deviden dari perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah sekitar.
 - c. Penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai salah satu upaya mewujudkan penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.
3. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Antarwilayah, Kawasan Barat dan Timur, Jawa dan Luar Jawa, Maupun Kebijakan Pembangunan Wilayah Per Pulau melalui pengalokasian DAK Fisik Tematik untuk pembangunan afirmatif mempercepat pembangunan daerah tertinggal, Dana Desa untuk percepatan pembangunan desa, serta pembangunan wilayah pulau secara terintegrasi.

AGENDA PEMBANGUNAN 3: Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dilaksanakan melalui strategi Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, yang implementasikan melalui:
 - a. Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, perawatan jangka panjang berbasis kontribusi, dan program rehabilitasi kerja, dengan capaian sebagai berikut:
 - 1) Penambahan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK di luar kesepakatan yang diperjanjikan berupa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.
 - 2) Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 - 3) Penetapan Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023–2024.
 - 4) Analisis Kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial.
 - b. Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, telah dilaksanakan melalui:
 - 1) Penerbitan Perpres Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 2) Penyesuaian sistem iuran, tarif dan manfaat bagi penerima layanan dengan adanya perubahan regulasi program yang dapat direviu secara berkala, yaitu perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 - 3) Pengaturan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial, kebijakan integrasi data yang sudah dituangkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024.
 - 4) Pelaksanaan monitoring melalui *one on one meeting* dengan BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.
 - 5) Pelaksanaan evaluasi aktuaria kecukupan iuran DJS Kesehatan, serta program jaminan pensiun SJSN dan ASN melalui laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi risiko BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan Asabri serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan persiapan implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Rawat Inap Standar (KDK-KRIS).

2. Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta, yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak, dilaksanakan melalui:
 - a. Pengenaan cukai terhadap *vape*/rokok elektrik, melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
 - b. Kenaikan CHT melalui PMK Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris.
 - c. Perubahan tarif cukai etil alkohol melalui PMK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
 - d. DBH CHT diposisikan sebagai bantalan dari dampak kebijakan cukai yang dapat digunakan untuk membantu petani tembakau pekerja industri hasil tembakau yang terdampak.
3. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dilaksanakan melalui strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan TKD.
 - b. Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
 - c. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
 - d. Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, peningkatan IPM, pencapaian SPM, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan memperkuat budaya literasi.
 - e. Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.
 - f. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan melalui Layanan Beasiswa, Layanan Pendanaan Riset, Peningkatan Ranking Dunia Perguruan Tinggi, dan Dukungan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan.

4. Arah Kebijakan Mengentaskan Kemiskinan dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan. Implementasi strategi dimaksud antara lain:
 - a. Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM.
 - b. Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemerintah.
 - c. Membuka kesempatan pelaku UMKM untuk naik kelas.
 - d. Penetapan PMK 130 tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah.
 - e. Pengembangan Sistem Informasi (SIKP UMi) untuk mendukung penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi).
5. Arah Kebijakan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing dilaksanakan dengan:
 - a. Strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
 - b. Strategi peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.

AGENDA PEMBANGUNAN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan melalui pengalokasian DID dan DAK Fisik.
2. Arah Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui perluasan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan.
 - b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
 - c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*).
 - d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara pelaku logistik. Implementasi strategi dilakukan antara lain dengan penerapan integrasi layanan

perizinan ekspor-impor, integrasi layanan karantina-kepabeanan, integrasi layanan kapal pengangkut, dan integrasi layanan pembayaran dengan *single billing* PNPB untuk layanan kapal melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW), serta penerapan layanan NLE di 53 (lima puluh tiga) pelabuhan laut dan 7 (tujuh) bandar udara.

3. Arah Kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan dilakukan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan. Implementasi strategi dilaksanakan melalui:
 - a. Kajian yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan akses energi serta upaya peningkatan akses, pasokan, efisiensi dan keberlanjutan energi.
 - b. Pengembangan energi terbarukan dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan serta dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - c. Insentif bagi individu/badan usaha/masjid/pesantren yang memasang PLTS atap.
 - d. Penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
 - e. Kajian *Phasing Down* PLTU Batubara dalam penyusunan mekanisme *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang menjadi *platform energy* transisi dari energi batubara menjadi energi hijau di sektor ketenagalistrikan.
 - f. Memberikan masukan terkait pendanaan dan harga energi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
4. Arah Kebijakan Transformasi Digital melalui perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan dan informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, dan pemberian insentif bagi *start up* yang berfokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

AGENDA PEMBANGUNAN 6: Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pada Agenda Pembangunan 6, dukungan Kemenkeu difokuskan pada arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut Kemenkeu melaksanakan strategi penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana dengan menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya Perpres Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum pembentukan *Pooling Fund* Bencana, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, serta kebijakan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilaksanakan secara bertahap pada seluruh K/L. Hingga saat ini, BMN yang menjadi obyek pertanggungjawaban meliputi gedung/bangunan kantor, pendidikan, dan kesehatan.

AGENDA PEMBANGUNAN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 3 (tiga) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dilaksanakan dalam berbagai sektor. Dalam hal peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional telah dilaksanakan *Capacity Building/Workshop/* Pelatihan bidang pengawasan *Transnational Organized Crime* (TNOC) di Austria dan Thailand dan penetapan PMK Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Dari sisi penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional, capaian yang telah dihasilkan baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan kerjasama internasional antara lain, penetapan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagai Operator Investasi Pemerintah melalui KMK Nomor 169/KMK.05/2022, pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia di tengah situasi yang *extraordinary* dengan tiga hasil utama, yaitu (1) Pembentukan Dana Pandemi sebesar USD1,56 miliar; (2) Pengembangan *Energy Transition Mechanism* (ETM) *Country Platform*; (3) Transformasi ekonomi digital, pelaksanaan mandat dalam Ketekuaan ASEAN serta penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi.

2. Arah kebijakan penegakan hukum nasional, telah dilaksanakan strategi penguatan sistem anti korupsi dengan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan, yaitu melalui penerbitan PP nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Penetapan PMK Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana diubah dengan PMK nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
3. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, telah dilaksanakan dua strategi, yaitu:
 - a. Dari sisi penguatan keamanan laut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan modernisasi persenjataan DJBC, seperti pengadaan *nonlethal weapon*, senapan laras pendek (senjata api); modernisasi sarana pengawasan dengan melakukan pengadaan kapal *interceptor boat*; modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli *speedboat*; pengkajian dan pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk Pengawasan Sarkut di Laut; serta pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance*: MoU BC-Hubla.
 - b. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan implementasi strategi antara lain, pengembangan *Customs*

Narcotics Targetting Centre (CNTC) - National Targeting System; Operasi Berantas Sindikat Narkotika (Operasi Bersinar); pengembangan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC; serta pelaksanaan kerjasama dengan APH lain: Ops JTF DJBC - RMCD yg didukung oleh APH lain baik di tingkat Pusat maupun wilayah.

1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan

Sebagai penjabaran visi dan misi Kemenkeu, pada Renstra 2020-2024 ditetapkan bahwa Kemenkeu memiliki 5 (lima) Tujuan, yakni Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Tujuan (2) Penerimaan negara yang optimal; Tujuan (3) Pengelolaan Belanja Negara yang berkualitas; Tujuan (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan Tujuan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan Kemenkeu tahun 2020-2024 pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 1 “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” adalah Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Dari sisi penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, telah dihasilkan *Omnibus law* perpajakan (mencakup perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah) dan sektor keuangan yakni melalui: (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 – 2024, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam rangka penyusunan RAPBN hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang APBN.
3. Untuk mendukung *sustainable environment*, dilakukan pengembangan instrumen-instrumen fiskal diantaranya penerbitan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan, untuk percepatan transisi energi dengan mekanisme ETM dan pengembangan berbagai instrumen fiskal untuk pendanaan perubahan iklim, antara lain: (1) Pengelolaan akses pendanaan dari *Green Climate Fund* (GCF); (2) Dukungan untuk mobilisasi pendanaan non-APBN melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

4. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal antar-K/L diwujudkan antara lain melalui *Tax Holiday* (PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan), *Investment Allowance* untuk industri padat karya (PMK Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya), *Insentif Superdeduction* untuk kegiatan Litbang (PMK Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia), penyusunan peraturan menteri keuangan tentang pembebasan bea masuk (PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dan PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor), dan penyusunan peraturan turunan *Omnibus Law* terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Perdagangan Bebas (PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), serta KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah) melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional untuk memberikan manfaat bagi Indonesia antara lain dengan terlaksananya Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022, penunjukan sebagai WCO *Asia-Pacific Vice Chair* tahun 2020-2022, pelaksanaan Keketuaan ASEAN di Indonesia pada tahun 2023, peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional melalui penerbitan PMK yang terkait di antaranya PMK Nomor 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8, dan PMK Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
6. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang diwujudkan dengan pengelolaan SBN yang *prudent*, akuntabel dan inovatif

melalui penerbitan SBN secara reguler sesuai dengan strategi pembiayaan, melakukan riset literasi SBN Ritel serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang SBN yang berkesinambungan. Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.2
Capaian Indikator Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1	Rasio defisit terhadap PDB	T: (5,07%)	T: (3,21%) - (4,17%)	T: (2,79%) - (3,55%)	T: (2,35%) - (2,72%)	T: (2,19%) - (2,51%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: (6,34%)	R: (4,62%)	R: (2,38%)	R: (1,65%)	R: (2,29%)	
	2	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	T: 75	T: 75	T: 75	T: 75	T: 75	Unit Eselon I terkait
			R: 90,52	R: 96,89	R: 94,28	R: 99,74	R: 103,49	

TUJUAN 2: Penerimaan Negara yang Optimal.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 2 “Penerimaan negara yang optimal” adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa *diapers* dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit.

Dari sisi regulasi, beberapa peraturan yang telah ditetapkan yaitu penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Terkait Bea Keluar, telah ditetapkan PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Selain itu juga diterbitkan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan melalui penetapan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tata kelola PNBPN antara lain melalui revisi atas 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai teknis pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari optimalisasi PNBP, Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur jenis dan tarif PNBP.

2. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital berfokus pada *user experience* dan *user friendly*. Dari sisi layanan perpajakan (pajak, kepabeanan dan cukai) telah dilakukan pengembangan Sistem *Click, Call, Counter* melalui revitalisasi peran *Contact Center* dalam layanan perpajakan, pengembangan layanan kepabeanan dan cukai antara lain dengan pengembangan Portal Pengguna Jasa; *CEISA Mobile Application*; aplikasi *Vessel Declaration*; *Vehicle Declaration* di perbatasan; Pelintas Batas layanan *Rush Handling*; Sistem Aplikasi *Customs Declaration* (CD) elektronik. Dari sisi PNBP dilaksanakan pengembangan aplikasi pendukung layanan PNBP berbasis *digital* dengan *PNBP Mobile*.
3. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, yang telah dilaksanakan melalui pengembangan sistem administrasi utama terkait PNBP, pemanfaatan *modern payment system* melalui kerjasama dengan Perbankan untuk melakukan integrasi sistem pembayaran *billing* kepabeanan dan cukai serta pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (*Core Tax System*).
4. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan analisis penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui penyempurnaan beberapa peraturan antara lain: (1) peraturan terkait *voluntary declaration/voluntary payment* dalam PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*); (2) regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor dalam PMK Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, serta pengembangan *risk assessment tools* nilai pabean; (3) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, termasuk kepada Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar.
5. Penguatan kerja sama dengan Instansi dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengamanan penerimaan negara dalam bentuk MoU antara Kemenkeu dengan PPATK untuk pemanfaatan data transaksi keuangan, dan sinergi bersama dengan TNI dan/atau Polri (Operasi Gabungan).
6. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan secara kolaborasi antara DJP, DJBC, DJA, dan LNSW guna mendukung optimalisasi penerimaan negara, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah *Joint Proses Bisnis* dan IT melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian Lembaga (SIMBARA) dan integrasi dokumen Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan faktur pajak.
7. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ tahun 2020.

8. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Terkait perpajakan, beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan DJP *Digital Map*, penguatan sarana dan infrastruktur forensik *digital*, penempatan petugas DJP di luar negeri, peningkatan kepatuhan pajak *high wealth individuals* dan grup usahanya.
 - b. Terkait kepabeanan dan cukai, pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP); peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional; penguatan kapasitas operasi keamanan laut; pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).
 - c. Terkait PNBP, telah dikembangkan modul e-mawas PNBP sebagai media bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan. Penyempurnaan SIMBARA dan replikasi SIMBARA untuk komoditas lain, juga menjadi upaya dalam mengoptimalkan pengawasan PNBP.
9. Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan ekspor maupun impor serta pemberian dukungan terhadap industri terkait penanganan Covid-19, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE, melalui penerbitan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 143 Tahun 2020 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020;
 - b. Pemberian fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan Covid-19 antara lain dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
10. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang telah dilaksanakan melalui penyempurnaan modul penggalian potensi ekonomi digital dan penyusunan daftar ILAP yang akan diusulkan dalam revisi PMK terkait ILAP melalui mekanisme *one-on-one meeting* dengan pihak ketiga.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.3

Capaian Indikator Penerimaan Negara yang Optimal
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNB yang optimal	1	Rasio perpajakan terhadap PDB	T: 8,51% - 8,69%	T: 8,25% - 8,63%	T: 8,27% - 8,70%	T: 8,38% - 9,09%	T: 8,59% - 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: 8,17%	R: 9,11%	R: 10,41%	R: 10,31%	R: 10,08%	
	2	Persentase realisasi penerimaan negara	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	DJP, DJBC, DJA
			R: 95,45%	R: 114,67%	R: 116,07%	R: 105,20%	R: 103,50%	
	3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	T: 53,50%	T: 63%	T: 64%	T: 65%	T: 66%	DJP, DJBC
			R: 101,32%	R: 105,3%	R: 105,3%	R: 108,43%	R: 102,09%	

TUJUAN 3: Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 3 “Pengelolaan belanja negara yang berkualitas” adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang tepat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta implementasi redesain sistem penganggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan anggaran yang memerhatikan kinerja unit pengelola kegiatan, keberlangsungan kegiatan terkait setiap tahun serta Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
 - b. Penguatan implementasi RSPP melalui surat bersama Kemenkeu dengan Bappenas mengenai pedoman penyusunan dan pemanfaatan KRO, serta pencantuman RSPP dan standardisasi KRO/RO Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - c. Penyelarasan alokasi belanja K/L dan belanja TKD DAK Fisik/TKD Lainnya melalui implementasi SOP Link 67 Tahun 2022 dan perluasan sinkronisasi belanja K/L dengan TKD Lainnya melalui pencantuman dalam IS RBTK.
 - d. Mengupayakan keselarasan dokumen melalui pengembangan modul sinkronisasi Renja dan RKA.
 - e. Peningkatan kualitas reviu angka dasar melalui pengembangan fitur *Prepopulated* pada sistem informasi (menyediakan data detail perkiraan maju).
2. Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional, dilaksanakan melalui:
 - a. Memastikan *tagging* RO Prioritas Nasional telah dilakukan.
 - b. Mengalokasikan anggaran Prioritas Nasional dalam RKA-K/L

- c. Pengaturan tentang pengalokasian anggaran prioritas, penandaan tema penganggaran termasuk prioritas termasuk dalam perumusan KRO/RO dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.
 - d. Pengembangan proses bisnis perencanaan penganggaran terintegrasi sehingga informasi kinerja dan target pada dokumen penganggaran selaras dengan dokumen perencanaan.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian prioritas nasional dalam aplikasi Monev Kemenkeu.
3. Peningkatan sinergi dan kapasitas *stakeholders* penganggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penganggaran kepada K/L.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan sosialisasi kebijakan dan aplikasi pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran tahun 2024.
 4. Penguatan sinergi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Membuat forum bersama intra Kemenkeu (DJA, DJPK, DJPb), serta antarkementerian (Kemen PPN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemkomdigi, dlsb).
 - b. Penyelarasan peraturan dan pengembangan sistem bersama untuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
 - c. Penguatan *platform* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam membantu proses *end-to-end* penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyediaan data guna pemantauan dan pengendalian.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengumpulan data untuk memperoleh bahan kajian dan rekomendasi kebijakan penganggaran khususnya terkait Standar Biaya.
 - e. Pelaksanaan sosialisasi/bimtek kepada internal maupun K/L.
 5. Penerapan *evidence based budgeting* kajian tematik APBN, tematik penganggaran serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
 - a. Monitoring dan evaluasi reguler dan pengukuran nilai kinerja anggaran melalui aplikasi SMART dan penyusunan kajian monitoring dan evaluasi nonreguler atas kinerja anggaran K/L yang disampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang dan Direktorat Penyusunan APBN, sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; penyusunan reviu angka dasar; dan penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
 - b. Monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengukuran nilai kinerja anggaran BUN melalui aplikasi SMART BUN dan analisis kinerja anggaran BUN yang disampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang dan Direktorat Penyusunan APBN, sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN sesuai dengan PMK Nomor

204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara (BUN).

6. Perumusan kebijakan penganggaran untuk pengelolaan program pensiun dan jaminan sosial yang efisien dan tepat sasaran dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian PAN-RB serta Kementerian Dalam Negeri untuk penajaman kajian mengenai peninjauan ulang program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) bagi ASN, TNI dan POLRI, yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang lebih baik dengan biaya yang lebih terkendali.
7. Mengembangkan Desentralisasi Fiskal Asimetris.
 - a. Pengalokasian dana dengan skema Transfer Khusus dan Keistimewaan berdasarkan status daerah otonomi.
 - b. Insentif fiskal yakni alokasi dana dari APBN sebagai penghargaan kepada daerah atas keberhasilan pencapaian kinerja daerah dengan tujuan untuk membantu percepatan penyediaan layanan publik daerah.
 - c. Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari K/L.
8. Mengembangkan sistem pengusulan DAK Fisik untuk mengatasi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, mendukung pencapaian prioritas nasional, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus.
9. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD *Next Generation*) sebagai *superapps* layanan DJPK.
10. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat akuntabilitas dari belanja pemerintah daerah antara lain melalui Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan turunannya antara lain:
 - a. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
 - b. PMK Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KUA PPAS dengan KEM PPKF).
 - c. PMK Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
 - d. PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Selain itu, telah juga dirumuskan beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah yaitu:
 - a. Perpres Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - b. BAB Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dalam KEM PPKF 2024 dan 2025.
11. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*, yang telah dilaksanakan melalui:

- a. Revisi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- b. *Trilateral Meeting* untuk proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri; dan
- c. Implementasi kerangka evaluasi proyek PHLN yang berbasis SDGs berdasarkan *framework* yang telah disusun pada tahun 2023.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.4
Capaian Indikator Belanja Negara yang Berkualitas
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	1	Indeks kualitas belanja pemerintah	T: 80 R: 96,55	T: 81 R: 90,27	T: 82 R: 90,27	T: 83 R: 90,28	T: 84 R: 92,21	DJA, DJPK
	2	Indeks ketimpangan antarwilayah	T: 0,245 (skala 1) R: 0,232 (skala 1)	T: 0,242 (skala 1) R: 0,213 (skala 1)	T: 0,240 (skala 1) R: 0,195 (skala 1)	T: 0,235 (skala 1) R: 0,148 (skala 1)	T: 0,232 (skala 1) R: 0,14 (skala 1)	DJPK
	3	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	T: 22,94% R: 26,05%	T: 25,94% R: 26,18%	T: 28,94% R: 29,05%	T: 31,94% R: 33,72%	T: 34,94% R: 48,29%	DJPK

TUJUAN 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 4 “Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali” adalah: 1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 2) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan 3) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Strategi terkait dengan Perbendaharaan.
 - a. Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui penyusunan peraturan dan proses bisnis dalam *platform* pembayaran pemerintah.
 - b. Harmonisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja pelaksanaan APBN yang terintegrasi.
 - c. Optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui interkoneksi data KKP perbankan dengan DIGIT dan Implementasi fitur pengelolaan UP KKP pada SAKTI pada Modul Bendahara dan Modul Komitmen.

- d. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* dan melanjutkan pengembangan *Platform* Pembayaran Pemerintah (PPP).
- e. Simplifikasi penyusunan LK melalui pengembangan automasi sistem penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- f. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN melalui penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BA BUN dari jenjang terbawah (UAKPA BUN) hingga jenjang tertinggi (UAP BUN).
- g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L dan kualitas pengelolaan perbendaharaan dengan pengembangan *database* solusi/*troubleshooting* dan rekomendasi atas permasalahan penyusunan LK KL; serta pengembangan layanan pembinaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
- h. Pengembangan *Business Intelligence* likuiditas untuk implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien, serta penetapan formulasi perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) BUN yang merupakan *buffer* kas Pemerintah.
- i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR) melalui konsolidasi dan simplifikasi pengelolaan seluruh rekening pemerintah berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara; penyusunan dan penetapan regulasi terkait *Investment Policy Statement* TDR; penyusunan kerangka kerja sama dengan Bank Indonesia dalam rangka remunerasi yang optimal; penyusunan kajian penggunaan limit transaksi kepada Jafung Dealer TDR; dan pengembangan *Inclusive Treasury Dealing Room* guna memastikan proses *bidding pooling system* sudah disetujui secara berjenjang dan tervalidasi otomatis oleh sistem.
- j. Optimalisasi pemanfaatan SIKRI dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
- k. Peningkatan ketepatan sasaran investasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penerapan *Early Warning System* melalui metode-metode pengukuran untuk mengestimasi probabilitas kemampuan bayar debitur Pemda pada penerusan pinjaman kepada Pemda/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui model *forecasting* dengan variabel keuangan maupun nonkeuangan untuk mengukur *Financial Distress* Pemda dengan *algoritma logistic regression* dan hasilnya dapat diakses pada DIGIT. Sosialisasi dan UAT aplikasi EWS Pinjaman Pemda telah dilaksanakan kepada 8 Perwakilan Kanwil DJPb.
- l. Pemetaan dan sinergi antara berbagai program K/L yang terkait investasi pemerintah (penyaluran pinjaman/kredit program/investasi lainnya) pada program-program yang menyasar UMKM pada Kementerian teknis terkait. Sebagai tindak lanjut atas pemetaan tersebut, telah dilakukan pemadanan/tol data antara SIKP UMi pada BLU PIP dengan data MBR Penerima Program FLPP pada BLU PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil koneksi antara kedua *database* telah mampu ditampilkan dalam bentuk *dashboard* penyaluran. Sebagai contoh, BLU PIP telah

melakukan pemadanan data debitur Pembiayaan UMi dengan data penerima Program Bansos (Prakerja, Sembako, BPNT, BPUM, PKH dan BST) periode 2020 - 2023. Diperoleh data 4,1 juta penerima Pembiayaan UMi (74%) juga menerima bansos; BLU PIP juga telah melakukan pemadanan/overlay data penerima Pembiayaan UMi dengan data sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Diperoleh data 3,43 juta (54%) debitur Pembiayaan UMi terdaftar sebagai sasaran P3KE.

- m. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/BUMN, serta kepada debitur Ultra Mikro (UMi) yang dinilai melalui pelaksanaan survei efektivitas penyaluran Pembiayaan UMi. Survei efektivitas penyaluran pembiayaan UMi telah dilaksanakan pada semester II 2022 dan semester I 2023, berdasarkan survei tersebut akan disusun Kajian Uji Dampak Pembiayaan UMi untuk periode tahun 2023 yang merupakan pengukuran uji dampak untuk periode survei *baseline* semester II 2021 dengan hasil survei *endline* semester II 2022 serta periode survei *baseline* semester I 2022 dengan hasil survei *endline* semester I 2023.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.5
Capaian Indikator terkait Perbendaharaan
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	DJPb, DJPPR
			R: 3,5	R: 3,5	R: 3,5	R: 4	R: 4	
	2	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	DJPb, ITJEN
			R: 4	R: 4	R: 4	R: 4	R: 4	
	3	Nilai kinerja anggaran K/L	T: 80,2	T: 81,2	T: 81,2	T: 82,2	T: 82,2	DJPb, DJA
			R: 92,63	R: 90,20	R: 90,27	R: 90,28	R: 92,43	
	4	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	T: 91%	T: 92%	T: 93%	T: 94%	T: 95%	DJPb
			R: 96,5%	R: 97,7%	R: 95,4%	R: 98,78%	R: 115,23 %	

2. Strategi terkait dengan Pengelolaan Kekayaan Negara.

- a. Penguatan reviu Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (*asset performance review*) dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan dan penyampaian rekomendasi kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk

pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikasi lainnya. Selama rentang waktu pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dari tahun 2020 hingga 2024, telah terlaksana pengukuran pada 35.353 NUP berupa tanah dan bangunan dengan hasil 97% BMN memiliki portofolio hijau yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 2,6% hasil evaluasi kinerja BMN dengan portofolio merah yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam pengelolaan BMN dengan portofolio merah tersebut perlu dipertimbangkan investasi tambahan, perubahan bentuk, perubahan peruntukan, sampai dengan penyerahan aset kepada Pengelola Barang. Kemudian terhadap 0,4% objek evaluasi dengan hasil evaluasi kinerja yang mengindikasikan adanya indikator yang inkonklusif.

- b. Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan. Hal tersebut didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertifikasi Tanah (Monserah). Realisasi BMN berupa tanah telah terbit sertifikat selama periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 108.517 bidang.
- c. Sesuai PMK Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara bahwa RKBMN Hasil Penelaahan digunakan oleh K/L sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan anggaran, didukung dengan interkoneksi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan SAKTI yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran. Penerapan interkoneksi dimaksud didukung oleh kebijakan dalam PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*).
- d. Optimalisasi BMN berupa tanah dan bangunan melalui penggunaan bersama oleh beberapa unit (*asset repurposing & integration*) dengan disusunnya analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (PTT), dan skema pemanfaatan untuk 7 (tujuh) K/L, yaitu: 1) Kementerian ESDM, 2) Kementerian Agama, 3) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), 4) Kementerian ATR/BPN, 5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan 7) Kementerian PAN-RB.
- e. Pemanfaatan BMN pada K/L yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, koperasi, perorangan, maupun badan hukum, dalam bentuk sewa, Kerja Sama

Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah dalam pemanfaatan BMN, telah diterbitkan regulasi PMK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara.

- f. Penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder* dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi serta monitoring dan evaluasi intensif terhadap K/L dan instansi vertikal. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan BMN terus dilakukan dalam rangka penyebarluasan dan penyeragaman pemahaman pejabat/pegawai yang menangani BMN sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN pada K/L sebagaimana diamanatkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- g. Dalam rangka peningkatan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan mandat masing-masing entitas, yaitu:
 - 1) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dengan total *outstanding* pembiayaan mencapai Rp93,6 triliun, dan nilai komitmen pembiayaan tumbuh dari Rp106,145 triliun (pada tahun 2020) menjadi Rp141,908 triliun (pada tahun 2024). Pembiayaan tersebut mayoritas tersebar pada sektor jalan, ketenagalistrikan, energi, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya. PT SMI juga melaksanakan pendampingan pada sejumlah proyek KPBU seperti SPAM Metropolitan Cirebon Raya, Bendungan Merangin, Rusun Karawang Spuur, RSPTN Universitas Padjajaran, TPAS Manggar, dan RSUD Inche Abdoel Moeis.
 - 2) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sampai dengan tahun 2024 telah melaksanakan penjaminan 53 proyek baik penjaminan infrastruktur dan penjaminan program PEN, dengan total nilai investasi Rp539 triliun dan total eksposur penjaminan Rp100 triliun. Selama 5 tahun terakhir, terealisasi tambahan penandatanganan penjaminan infrastruktur (KPBU dan Non-KPBU) sebanyak 23 proyek, serta pada tahun 2020 terdapat penugasan kepada PT PII berupa perluasan mandat untuk melaksanakan penjaminan dalam rangka program PEN, dengan realisasi penjaminan PEN sampai dengan akhir 2024 sebanyak 9 proyek. PT PII juga melaksanakan penjaminan korporasi padat karya dalam rangka mendukung program PEN.
 - 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus membangun ekosistem ekspor nasional melalui sinergi

dengan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Hingga Desember 2024, LPEI telah membina 928 Desa Devisa dan melahirkan 484 eksportir baru melalui program CPNE. Dalam penugasan khusus NIA, LPEI mengelola dana sebesar Rp7,2 triliun, terdiri dari PKE UKM (Rp161 miliar), *trade finance* (Rp4,453 triliun), kawasan (Rp2,468 triliun), alat transportasi (Rp73 miliar), dan farmasi & alat kesehatan (Rp117 miliar). Fokus utama LPEI adalah menciptakan dan menghemat devisa senilai USD 1,18 miliar.

- 4) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) me-*leverage* PMN yang diterima dengan dana dari pasar modal untuk kemudian disalurkan kepada bank penyalur KPR FLPP dalam rangka mengurangi beban fiskal pemerintah. Pada periode 2020-2024 telah disalurkan Rp23,91 triliun untuk membiayai 635.625 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 5) PT Geo Dipa Energi (GDE) telah menghasilkan produksi listrik korporasi sebesar 803,5 GWh pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 859,25 GWh, dengan ketersediaan uap GDE pada tahun 2020 sebesar 6,18 juta ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 6,9 juta ton. Di tahun 2024, GDE juga untuk pertama kali berhasil menjual REC Patuha-1 sebesar 110.610 MWh (113.116 USD).
- 6) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan penyaluran pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional sebesar Rp92,01 triliun dari alokasi APBN senilai Rp76,18 triliun, dan menghasilkan PNBP dari pengelolaan aset dan jasa *advisory* sebesar Rp4,42 triliun, serta manfaat nonfinansial pengelolaan aset sebesar Rp1,22 triliun.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.6
Capaian Indikator terkait Pengelolaan Kekayaan Negara
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	T: 55%	T: 57%	T: 60%	T: 65%	T: 70%	DJKN
			R: 70,39%	R: 82,27%	R: 84,34%	R: 79,66%	R: 86,88%	
	2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
			R: 5	R: 4,7	R: 4,69	R: 4,77	R: 4,97	

3. Strategi terkait dengan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- a. Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) pemerintah pusat dengan telah dilakukannya koordinasi intensif tim ALCo dan tim CPIN lintas unit eselon I, serta monitoring arahan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam forum ALCo secara berkala.
- b. Mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan luar negeri secara selektif dan *prudent* dilakukan melalui penyusunan strategi penerbitan utang dan evaluasi/revisi strategi secara triwulanan, pemantauan kondisi ekonomi dan pasar keuangan, serta pengukuran proyeksi risiko portofolio.
- c. Diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur & penguatan *legal framework* untuk pengembangan dan pendalaman pasar SBN dengan ditetapkannya PMK 137 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan PMK 112 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- d. Memperluas cakupan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman dalam negeri, antara lain untuk sektor infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mendorong industri dalam negeri. Pembiayaan proyek tersebut diantaranya kegiatan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III Tahap II serta pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan di sektor pertahanan dan keamanan.
- e. Pengembangan *Data Champion* Pembiayaan dan Risiko melalui pengembangan lebih lanjut aplikasi pertukaran data elektronik dengan *lender* (aplikasi DEVA), pelaksanaan *E-learning* pengenalan pengelolaan hibah sejak 2023, serta penambahan materi *E-learning* di 2024.
- f. Mengembangkan *creative financing* dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui ditetapkannya PMK Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya.
- g. Mengendalikan risiko keterjadian atas realisasi kewajiban kontinjensi APBN dengan telah melaksanakan monitoring atas risiko BUMN pelaksana penugasan baik secara langsung maupun *on paper* serta melaksanakan *joint monitoring committee* secara berkala.
- h. Mengembangkan kerangka kerja dan instrumen pengelolaan risiko keuangan negara yang holistik (termasuk isu bencana, lingkungan, dan perubahan iklim) melalui penetapan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022, serta penyusunan kajian instrumen mitigasi risiko bencana (*pooling fund bencana*).
- i. Menerbitkan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel (*pandemic bond*). Selain itu sinergitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi kondisi *extraordinary* pandemi

Covid-19 melalui keputusan bersama antara Kemenkeu dan Bank Indonesia.

- j. Peningkatan implementasi skema KPBU melalui Optimalisasi pemanfaatan *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF), dan penjaminan pada sektor prioritas. Jumlah portofolio proyek KPBU yang mendapat dukungan Kemenkeu (PDF, VGF, AP, dan penjaminan) s.d. 31 Desember 2024 adalah 23 pada tahap operasi, 9 pada tahap konstruksi dan prakonstruksi, 4 pada tahap transaksi, serta 24 pada tahap penyiapan.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.7

Capaian Indikator terkait Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	1	Imbal hasil (<i>Yield</i>) Surat Berharga Negara	T: Naik	T: Menurun	T: Menurun	T: Menurun	T: Menurun	DJPPR
			R: Menurun (5,89)	R: Menurun (6,38)	R: Menurun (6,96)	R: Menurun (6,74)	R: Menurun (6,78)	
	2	Rasio Utang terhadap PDB	T: 36,38%	T: 36,67%-37,97%	T: 36,65%-37,39%	T: 36,45%-37,36%	T: 36,08%-37,18%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: 39,36%	R: 40,72%	R: 39,42%	R: 38,59%	R: 39,36%	
	3	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	DJPPR
			R: 108,50%	R: 100%	R: 117,53%	R: 115,38%	R: 117,45%	

TUJUAN 5: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 5 “Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien” adalah: 1) Organisasi dan SDM yang optimal; 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan 4) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Capaian utama pada Tujuan ke-5 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Organisasi dan SDM
 - a. Kemenkeu telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat budaya organisasi secara sistematis, kolaboratif, dan terintegrasi, antara lain melalui penguatan budaya inovasi dan sistem kerja fleksibel. Pertama, telah dilakukan penyusunan payung hukum terkait pengelolaan ekosistem inovasi yang ditetapkan dalam KMK Nomor 1032/KM.1/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang kemudian disempurnakan menjadi KMK Nomor 1005/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem budaya inovasi, seperti sosialisasi dan *e-learning*, peluncuran aplikasi Satu Kemenkeu, dan Kemenkeu

Sandbox. Pengelolaan ekosistem inovasi juga diintegrasikan dalam kinerja pegawai dan sistem penghargaan.

Kemenkeu juga aktif berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak 2014. Beberapa inovasi meraih predikat tertinggi secara nasional antara lain Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN *Trade in Goods Agreement* (SiPakDE-ATIGA) sebagai Top 45 tahun 2020, Penerapan *Artificial Intelligence* sebagai *Financial Advisor* (AIFA) sebagai Top 45 tahun 2021, *Platform* Integrasi Belanja Pemerintah melalui *Digipay* sebagai Top 45 tahun 2022, SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar-K/L) dan CEISA Barang Kiriman sebagai Top 45 tahun 2023, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai Top 99 tahun 2023.

Pada tahun 2024, KIPP digantikan dengan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) untuk memastikan inovasi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai unit kerja, dimana Kemenkeu menjadi salah satu Pembina Inovasi Terbaik tingkat K/L serta terdapat 3 (tiga) inovasi yang berhasil meraih predikat Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan, yaitu CWKS, CEISA Barang Kiriman, dan *e-Auction*.

Selain itu, Kemenkeu telah mengimplementasikan sistem kerja fleksibel untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga produktivitas serta kualitas hidup pegawai. Payung hukum terkait fleksibilitas tempat dan waktu bekerja telah ditetapkan melalui beberapa regulasi yang diintegrasikan dalam KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi pelaksanaan dan pendalaman *roadmap* kebijakan Sistem Kerja Fleksibel sebagai bagian dari riset "*Revisiting ways of work: Merumuskan Cara Kerja Masa Depan di Organisasi Sektor Publik*".

Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, Kemenkeu berhasil meraih penghargaan "Nilai Indeks BerAKHLAK 2024 Terbaik Kategori Kementerian" dengan skor 85,66 dari KemenPANRB.

- b. Implementasi *office automation* dalam rangka membangun *digital workplace* di Kemenkeu telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020. Proses ini didukung oleh penetapan KMK Nomor 487/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Automasi Perkantoran (*Office Automation*) Kementerian Keuangan. Hingga tahun 2024, beberapa capaian utama telah dicapai, termasuk integrasi *office automation* dengan berbagai aplikasi pendukung administrasi perkantoran seperti sistem persuratan elektronik, manajemen arsip digital, dan *dashboard monitoring* kegiatan pegawai. Selain itu, fitur berbasis *Artificial Intelligence* (AI) sederhana telah diimplementasikan untuk membantu klasifikasi dokumen dan penjadwalan otomatis. Kapabilitas akses *mobile* juga ditingkatkan, memungkinkan pegawai mengakses *office automation* melalui perangkat seluler dengan aman. Penguatan keamanan data dilakukan melalui penerapan standar enkripsi yang lebih tinggi dan audit keamanan sistem secara berkala.
- c. Kemenkeu telah mengembangkan *Enterprise Architecture* (EA) sejak 2020 untuk mendukung transformasi digital dan tata

kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selama 2020–2024, tim EA Kemenkeu telah memetakan kondisi eksisting, merancang arsitektur *to-be*, serta memperkuat tata kelola yang *agile*. Pengembangan SDM juga dilakukan melalui berbagai pelatihan dan kolaborasi. Kemenkeu juga berkontribusi dalam evaluasi SPBE nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui asesmen kapabilitas EA dan *architecture compliance review*.

Secara aktif, Kemenkeu berpartisipasi dalam Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB, dengan capaian hasil evaluasi yang terus meningkat dan lebih tinggi dari peringkat rata-rata nasional selama kurun waktu 2021 hingga 2024 (Tahun 2021 : Kemenkeu 3,72/sangat baik, Nasional 2,24; Tahun 2023 : Kemenkeu 4,66/memuaskan, Nasional 2,79; Tahun 2024 : Kemenkeu 4,74/memuaskan, Nasional 3,12).

- d. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) secara bertahap dan hati-hati untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Hingga tahun 2024, terdapat 72,32% jabatan yang telah disederhanakan dan dialihkan ke Jabatan Fungsional (JF), mencakup 3.780 jabatan dari total 5.227 jabatan yang berpotensi disederhanakan. Secara rinci, penjelasan implementasi *delayering* adalah sebagai berikut:

- 1) *Delayering* terhadap 2.957 Eselon V di KPPBC, DJBC menjadi JF Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang Pertama.
- 2) *Delayering* terhadap 142 Eselon IV di KPKNL, DJKN menjadi JF Pelelang dan JF Penilai Pemerintah jenjang Muda.
- 3) *Delayering* terhadap 6 Eselon III dan 23 Eselon IV di Pusintek, Setjen menjadi JF Prakom Jenjang Madya dan Muda.
- 4) *Delayering* terhadap 14 Eselon III dan 66 Eselon IV di DJPK menjadi JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain itu, Kemenkeu juga melakukan perbaikan ekosistem *delayering*, termasuk mekanisme kerja, perubahan budaya, konsolidasi jabatan fungsional, penguatan manajemen perubahan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak positif terhadap kinerja organisasi.

- e. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan pengendalian pertumbuhan pegawai melalui strategi *negative growth* SDM, selaras dengan pembangunan *digital workplace* dan EA, penerapan sistem kerja baru, dan penyederhanaan birokrasi. Penerapan *negative growth* SDM dilaksanakan melalui strategi pemenuhan pegawai baru secara selektif dan terbatas dan penataan komposisi SDM. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ASN Kemenkeu tercatat sebanyak 77.055 orang berdasarkan data HRIS. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019 yang sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan sebesar 5.413 orang atau sekitar -6,56%. Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen umum CASN maupun PNS pindah instansi pada akhir tahun 2024, yang akan masuk sebagai pegawai Kemenkeu pada awal tahun 2025. Dengan mempertimbangkan hasil rekrutmen tersebut, jumlah SDM

Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024 sebanyak 78.085 orang, dengan realisasi *negative growth* SDM selama lima tahun sebesar -5,25%. Dalam penerapan *negative growth* SDM tersebut, Kemenkeu tetap memerhatikan dan menjaga capaian kinerja organisasi dan pegawai. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, kinerja organisasi tetap terjaga di atas 100%, dan rata-rata kinerja pegawai meningkat dari sebelumnya 110,24 pada tahun 2020 menjadi 112,46 pada tahun 2024.

- f. Kemenkeu telah melakukan penataan komposisi SDM melalui pengembangan kapabilitas SDM internal dan Implementasi *Internal Job Vacancy* (IJV). Pengembangan kapabilitas SDM dilakukan melalui program *reskilling* dan *upskilling* pada pegawai yang terdampak ekosistem kerja baru. Selain itu, telah dilaksanakan penguatan kompetensi lintas fungsi dalam pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan *e-learning mandatory* yang diikuti oleh seluruh pegawai, serta program *secondment* lintas unit eselon I. IJV memberikan kesempatan untuk mutasi antarunit eselon I guna redistribusi pegawai dan pemenuhan kebutuhan pada unit eselon I yang tidak dapat dipenuhi dari internal unit bersangkutan. IJV telah mendukung rekomposisi SDM *core:supporting*, dimana pada akhir tahun 2024, komposisi SDM *core:support* sebesar 73,1 : 26,9.
- g. Kemenkeu telah mengoptimalkan program magang mahasiswa untuk mendukung implementasi program nasional kampus merdeka, merdeka belajar, sekaligus sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan SDM jangka pendek. Dalam kurun tahun 2020-2024, Kemenkeu telah menerima mahasiswa magang sebanyak 13.076 orang, yang terdiri atas program magang reguler sebanyak 12.758 orang, program magang dan studi independen bersertifikat sebanyak 125 orang, dan program magang bekerja sama dengan 3 Perguruan Tinggi sebanyak 193 orang. Berdasarkan evaluasi, tingkat kepuasan layanan magang pada tahun 2024 sebesar 4,53/5 atau meningkat dari tahun 2023 sebesar 4,46/5.
- h. Kemenkeu mengukur dan mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai metode. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan menggunakan *Assessment Center* sesuai Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, mencakup 20.636 pejabat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, dan pelaksana. Selain itu, penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural juga dilakukan terhadap 105.750 pegawai melalui *Situational Judgement Test* (SJT) setelah mengikuti *e-learning* melalui Kemenkeu *Learning Center*. Untuk meningkatkan kompetensi, Kemenkeu mengadakan *Online Group Coaching* guna memetakan *gap* dan merancang pengembangan pegawai. Teknologi juga dimanfaatkan melalui *online assessment*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan proses bisnis dalam penilaian pegawai.
- i. Kemenkeu turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang keuangan negara pada K/L dan Pemda, dengan:
 - 1) mengalokasikan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada K/L dan Pemda sebanyak 7.436 orang atau

- 27% dari total lulusan sebanyak 27.287 orang kepada 70 K/L dan 97 Pemda, untuk memenuhi kebutuhan auditor, pengelola keuangan negara, serta aset.
- 2) memperluas diaspora melalui penugasan pejabat/pegawai sebanyak 145 orang pada 145 instansi pemerintah.
 - 3) menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang keuangan negara.
 - 4) menginisiasi program afirmasi dan pembibitan mahasiswa PKN STAN bekerja sama dengan Pemda. Sampai dengan tahun 2024, PKN STAN telah menerima 249 orang mahasiswa program afirmasi dari 16 Provinsi, dan 220 orang mahasiswa program pembibitan dari 28 Pemda.
- j. Kemenkeu mengelola data dan pengetahuan secara sistematis agar tidak hilang, melalui manajemen pengetahuan berbasis audio, video, dan audiovisual yang disebarluaskan lewat Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Seluruh infrastruktur pendukung proses manajemen pengetahuan telah selesai disusun, yang meliputi cetak biru manajemen pengetahuan, *software* KMS, pengumpulan aset intelektual, panitia penjaminan mutu, penyediaan meja bantuan (*helpdesk*), evaluasi aset intelektual, dan penghargaan manajemen pengetahuan. Berdasarkan *framework Asian Productivity Organization* (APO), tingkat maturitas manajemen pengetahuan Kemenkeu meningkat dari 74,52% pada 2022 menjadi 95,24% pada 2024, mencapai level 5 (*Maturity*), menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan telah menjadi bagian utama dalam organisasi.
- k. Kemenkeu *Corporate University* (CorpU) mendukung visi Kemenkeu dengan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai berbasis target kinerja didukung manajemen pengetahuan. Implementasi diperkuat dengan antara lain KMK Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengatur tentang implementasi dan model pembelajaran terintegrasi, serta penilaian tingkat implementasi. Kemenkeu CorpU juga turut mendukung dalam pengembangan ekosistem *Corporate University* di Indonesia dengan secara rutin menjadi tujuan *benchmarking* dari berbagai KLDI. Pada kurun waktu 2021-2024, terdapat 130 frekuensi *benchmarking* KLDI yang difasilitasi oleh Kemenkeu CorpU.
- l. Peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui pembelajaran, akreditasi, dan sertifikasi kompetensi. Peningkatan kompetensi pembelajaran telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan capaian peningkatan kinerja alumni sebesar 104,72% (Evaluasi *kirkpatrick* level 4) dan peningkatan kualitas perilaku kerja alumni sebesar 95,36% (Evaluasi *kirkpatrick* level 3). Terkait dengan program akreditasi, telah dilakukan kegiatan akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara, yang ditandai dengan penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan

Teknis di Bidang Keuangan Negara yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan akreditasi SDM pengelola keuangan negara bekerjasama dengan berbagai BPSDM provinsi, antara lain BPSDM provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Adapun untuk program sertifikasi, telah diterbitkan dasar hukum terkait dan melaksanakan berbagai sertifikasi, termasuk Sertifikasi JF AA, Ahli Kepabeanan, dan JF Penilai, JF Penata Laksana Barang, dan JF AKPD.

- m. Kemenkeu melalui PKN STAN berkomitmen mempercepat akselerasi transformasi akademik dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di bidang keuangan negara melalui transformasi kelembagaan, pemutakhiran kurikulum, dan pemutakhiran pengetahuan dosen, publikasi dan penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Transformasi kelembagaan dilakukan secara berkesinambungan agar sejalan dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, kebutuhan industri, dan semangat merdeka belajar. Program afirmasi diperluas mencakup daerah 3T dan program pembibitan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, PKN STAN juga menerima mahasiswa internasional dan menerapkan metode pembelajaran *blended learning*, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam Program Sarjana Terapan, dan bekerja sama dengan unit eselon I lingkup Kemenkeu, terkait penyediaan pengajar/narasumber yang kompeten.

Pemutakhiran kurikulum secara berkelanjutan dilakukan melalui koordinasi dengan para *stakeholder* dan unit eselon I terkait, mencakup penyempurnaan kurikulum Program Diploma dan Sarjana Terapan, serta implementasi laboratorium nyata dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum juga memfasilitasi penyelenggaraan *Student Mobility Awards* (SMA) dan *Academic Mobility Awards* (AMA), penyelenggaraan mata kuliah dengan satuan kredit semester (SKS) praktikum, *case-based learning* dan *project-based learning*, integrasi kurikulum akademik dan karakter, program *fast track*, serta penetapan mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah kekhususan.

Pemutakhiran pengetahuan dosen, publikasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi fokus, antara lain melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti *The Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA), Institut Penilaian Negara (INSPEN) Malaysia, Kementerian Luar Negeri, PT Pegadaian, dan berbagai kampus antara lain dalam rangka sertifikasi, pertukaran dosen/mahasiswa, penulisan buku dan riset serta pemberdayaan UMKM, BUMDes, serta penyaluran Dana Desa. Selain berpartisipasi dalam konferensi ilmiah global, forum diskusi dan *knowledge sharing*, Kemenkeu melalui PKN STAN juga turut aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.8

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal

Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)
			R: 4,36 (skala 5)	R: 4,35 (skala 5)	R: 4,37 (skala 5)	R: 4,41 (skala 5)	R: 4,46 (skala 5)	
	2	Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: -	T: -	Setjen dan UE I Terkait
			R: 113,33%	R: 117,50%	R: 117,50%	R: -	R: -	
	3	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	T: -	T: 88,20%	T: 89,00%	T: 89,80%	T: 90,50%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
			R: -	R: 98,67	R: 117,70	R: 119,09	R: 118,32	
	4	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	T: 75%	T: 77%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
			R: 95,59%	R: 89,11%	R: 89,11%	R: 92,22%	R: 94,22%	
	5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	T: 90%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	T: 87%	BPPK
			R: 99,68%	R: 89,90%	R: 88,78%	R: 91,49%	R: 104,72%	
	6	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	T: 90%	T: 93%	T: -	T: -	T: 91,49%	BPPK
			R: 96,12%	R: 98,21%	R: -	R: -	R: -	
	7	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	T: -	T: -	T: 90%	T: 92%	T: 94%	BPPK
			R: -	R: -	R: n/a	R: n/a	R: n/a	

2. Terkait dengan Sistem Informasi:

- a. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemenkeu periode 2020-2025 mengikuti *best practice* yang diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.01/2017 dan PMK Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tata kelola TIK yang andal mencakup beberapa aspek penting, seperti penerapan tata kelola keamanan informasi, standarisasi sistem TIK, penataan ulang struktur organisasi dan proses kerja TIK, dan Peningkatan kualitas SDM TIK. Pengakuan atas pengelolaan tata kelola TIK dibuktikan dengan capaian sertifikasi-sertifikasi berikut:
 - 1) ISO 20000:2018 tentang *IT Service Management* (ITSM).
 - 2) ISO 27001:2013 tentang *Information Security Management System* (ISMS).
 - 3) ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems* (QMS).
 - 4) ISO PAS 99:2012 tentang *Integrated Management System* (IMS).
 - 5) ANSI/TIA-942 Rated 4 tentang *Data Center Design and Facility Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
 - 6) ANSI/TIA-942 Rated 4 tentang *Data Center Design and Facility Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
 - 7) ANSI/TIA-942 Rated 3 tentang *Data Center Operations Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
 - 8) ANSI/TIA-942 Rated 3 tentang *Data Center Design Standard* untuk *Disaster Recovery Center* Kemenkeu.

Hingga 31 Desember 2024, Kemenkeu berhasil mempertahankan pengakuan atas pengelolaan tata kelola TIK sesuai *best practice* melalui capaian sertifikasi tersebut.

- b. Kemenkeu telah melaksanakan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK melalui pengembangan *Data Center* (DC) secara bertahap. Pada tahun 2021 dan 2022, pekerjaan Pengembangan *Data Center* tahap 1 dan 2 meliputi peningkatan kapasitas struktur gedung dan pelaksanaan mekanikal elektrik, serta pengembangan gedung Pengelola *Data Center*. Pada tahun 2024, pengembangan *Smart Data Center* (*Smart DC*) difokuskan pada tahap 3, yang meliputi pengembangan mekanikal elektrik dan ruang DC lantai 5 dan 6. Pengembangan ini telah diselesaikan secara penuh, dibuktikan dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai Berita Acara Serah Terima pada 2 Januari 2025.
- c. Kemenkeu telah melaksanakan berbagai proyek TIK strategis untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi. Pada tahun 2022, proyek-proyek ini meliputi modernisasi infrastruktur dan manajemen jaringan, implementasi Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) melalui portal layanan *self-service* dan pengembangan *roadmap* hingga 2025, pengembangan Kemenkeu *Service Bus* (KSB) untuk integrasi layanan dan data, dan penguatan aplikasi umum, khususnya kategori kehumasan dan digitalisasi hukum.
- d. Pada tahun 2024, fokus utama adalah pada pengembangan Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) dan Portal Satu Data Kemenkeu. KCP menyediakan layanan komputasi awan dengan pengembangan *multiplatform* untuk meningkatkan keamanan dan tata kelola. Portal Satu Data Kemenkeu dikembangkan secara bertahap sampai dengan tahun 2024 sebagai layanan *one-stop data services* yang mencakup pencarian, permohonan, dan pemanfaatan data, serta dilengkapi dengan *tools* visualisasi dan analitik data.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.9

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)
			R: 0,0251%	R: 0,0106%	R: 0,0145%	R: 0,0242%	R: 0,0244%	
	2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%	
			R: 98,41%	R: 99,59%	R: 99,86%	R: 108,00%	R: 112,60%	

3. Terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Internal:

- a. Kemenkeu telah melakukan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu dengan diterbitkannya PMK Nomor 83 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Poin-poin

penting dalam penguatan sistem pengendalian intern, antara lain:

- 1) Penajaman fokus pengendalian intern pada penguatan perilaku etis dan berintegritas, kepemimpinan yang efektif, SDM yang kompeten, dan budaya sadar risiko.
 - 2) Restrukturisasi model tiga lini dan penguatan standar kualifikasi, serta kompetensi tiap lini.
 - 3) Integrasi peran tiap lini secara *end to end* dalam pengawasan risiko probis, SDM, dan TIK (*one view of risk*).
- b. Kemenkeu mengimplementasikan audit berbasis teknologi informasi dengan capaian utama berupa kajian revisit *roadmap data analytics* di Inspektorat Jenderal. Kajian ini menjadi fondasi strategis untuk penguatan kompetensi auditor dan integrasi teknologi pengawasan hingga 2029, dengan target tersedianya pengawas yang ahli di bidang *data analytics*.
- c. Selain itu, Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) juga mengembangkan *Continuous Audit-Continuous Monitoring* (CA-CM) untuk mendukung pengawasan terotomasi agar dapat dilakukan pengawasan secara *real-time* dan berkelanjutan melalui akses data secara langsung.
- d. Aplikasi *e-Reviu LK* dikembangkan berbasis *continuous audit* dengan memanfaatkan aliran data dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK). Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini anomali pada laporan keuangan sebelum audit eksternal dilakukan.
- e. Inisiatif pencegahan meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern, sosialisasi anti korupsi, pengelolaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, implementasi *helpdesk* pencegahan, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), pengelolaan saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE), pelaporan harta kekayaan pegawai, *profiling* pegawai, pemantauan media elektronik, media sosial, dan *digital footprint*.
- f. Kegiatan penindakan yang dilakukan meliputi audit investigasi, pengumpulan bahan keterangan/pengumpulan data dan informasi, *saber pungli*, *spotcheck*, klarifikasi/eksaminasi laporan harta kekayaan, pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin, dan digital forensik.
- g. Sebagai bagian dari transformasi digital Kemenkeu, pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi salah satu fokus strategis Kemenkeu. Terkait hal ini, Kemenkeu melalui Itjen menginisiasi pengembangan *continuous monitoring* yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pengawasan pada lini pertama dan kedua. Selain itu, pengembangan *Continuous Audit* (CA) yang telah dilakukan diarahkan untuk terintegrasi dan melengkapi sistem *Continuous Monitoring* (CM), guna menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif dan *real-time*.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.10

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah

Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	1	Indeks integritas	T: 90 (skala 100)	T: 90,5 (skala 100)	T: 91 (skala 100)	T: 91,5 (skala 100)	T: 91,5 (skala 100)	Seluruh UE I Terkait (Itjen)
			R: 104,06 (skala 100)	R: 89,45 (skala 100)	R: 89,45 (skala 100)	R: 92,48 (skala 100)	R: 109,67 (skala 100)	
	2	Indeks opini BPK atas LK BA 015	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	Setjen, Itjen
			R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	

4. Terkait dengan Pengelolaan *Special Mission*

a. LNSW

- 1) Pengelolaan *Indonesia National Single Window* (INSW) dan penyelenggaraan Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) dilaksanakan untuk mendorong peningkatan layanan publik di bidang ekspor-impor dan logistik. Pengelolaan ini mencakup integrasi sistem layanan pada 27 kementerian/Lembaga terkait penyediaan *Indonesia National Trade Repository* (INTR), integrasi dan penyederhanaan proses bisnis perizinan, pengangkutan kapal, layanan pembayaran/*single billing* PNBK kapal, layanan fasilitasi, serta layanan lain yang mendukung tata kelola ekspor-impor dan logistik. Selain itu juga berperan aktif dalam organisasi multilateral, antara lain WTO, WCO, dan IMO, terkait dengan implementasi *National Single Window*, serta menjadi *electronic data exchange authority* untuk mendukung *cross-border paperless trade* melalui pertukaran data dengan negara mitra, baik secara bilateral maupun regional.
- 2) Pengembangan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dilakukan untuk mendukung penguatan pengambilan keputusan berbasis komoditas. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 6 (enam) komoditas pangan dan 11 (sebelas) komoditas non-pangan yang terintegrasi ke dalam Neraca Komoditas. Pengembangan SINAS NK dilaksanakan melalui integrasi proses bisnis dan sistem layanan pada kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dilakukan untuk mendorong optimalisasi pengawasan penerimaan negara, khususnya pada PNBK. Sampai dengan tahun 2024, komoditas yang telah terintegrasi dalam SIMBARA meliputi batubara, timah, nikel, dan bauksit. SIMBARA dilaksanakan melalui integrasi proses bisnis dan sistem pada kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

- 4) Mendorong perbaikan kualitas layanan publik dilakukan melalui transformasi digital, diantaranya yaitu pengembangan Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendorong UMKM dalam kegiatan perdagangan internasional.

b. Lembaga Pengelola Dana

- 1) Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
 - a) LDKPI telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), LDKPI menempatkan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi negara serta menjalankan Investasi sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Telah ditetapkan perubahan atas KMK Nomor 169/KMK.05/2022 dengan ditetapkannya KMK Nomor 4/KMK.05/2024 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 169/KMK.05/2022 yang memperluas fleksibilitas LDKPI dalam mengelola investasi.
- 2) Kerjasama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya, antara lain:
 - a) PIP telah menjalin kerja sama pendanaan dengan Pemkab Bone Bolango, Pemkab Luwu Utara dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
 - b) BPD LH telah menjalin kerjasama dengan lembaga donor untuk mengelola dana lingkungan hidup yang terdiri dari lembaga donor *World Bank*, lembaga donor *United Nations Development Programme* (UNDP), Kerjasama pendanaan pengelolaan dari *Ford Foundation*, dan Kerjasama dengan Pemerintah Norwegia - *FoLU Net Sink* 2030.
 - c) BPD PKS menjalin kerjasama dengan kerjasama dan dukungan pendanaan kegiatan *Workshop FACT Dialogue* dalam rangka peningkatan akses pasar dan keberterimaan standar sertifikasi keberlanjutan sawit (ISPO) di negara-negara konsumen komoditas sawit dalam kerangka penurunan emisi karbon tanggal 7-8 Februari 2023, kerjasama dan dukungan pendanaan program kampanye positif sawit di Uni Eropa kerja sama GAPKI dan DCI Group Tahun 2023, kerja sama dan dukungan pendanaan dan partisipasi delegasi pada *Joint Mission Indonesia – Malaysia to the EU* dalam rangka diplomasi EUDR di Brussel, Kerjasama dan Dukungan pendanaan *Working Meeting & Dialogue with EU Key Industry of Palm Oil* kerja sama CPOPC di Brussel, kerja sama dan dukungan pendanaan dan partisipasi delegasi RI pada SOM CPOPC di Malaysia.
 - d) LDKPI telah melakukan penyaluran hibah pada sektor kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, pertanian, tata kelola, dan energi yang tersebar ke beberapa negara di kawasan Afrika, Eropa, Amerika dan Karibia, Asia dan Pasifik dengan jumlah negara penerima hibah, dengan

rincian sebagai berikut, Tahun 2020: 3 negara; Tahun 2021: 11 negara; Tahun 2022: 15 negara; Tahun 2023: 38 negara; Tahun 2024: 89 negara; memperkuat sinergi dengan unit lain di Kemenkeu, termasuk BLU dan SMV, berkolaborasi dengan BUMN, perusahaan dalam negeri, dan UMKM sebagai bentuk dukungan LDKPI terhadap perekonomian dengan mendorong perluasan ekspor produk dalam negeri, serta melakukan *joint partnership* dan *joint operation* dengan beberapa *development partner*, baik bilateral maupun multilateral, antara lain : World Bank, IsDB, JICA, AfD, GIZ, di sektor kesehatan, *climate change*, energi terbarukan, pertanian, dan perikanan.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.11
Capaian Indikator atas Sasaran Strategis
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	1	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	T: 96,87	T: 100	T: 100	T: 100	T: 100	BLU Pengelola Dana dan SMV terkait
			R: 105,47	R: 115,35	R: 109,35	R: 114,36	R: 111,48	
	2	<i>Dwelling time</i>	T: 3,6 hari - 2,9 hari	T: 3,5 hari-2,9 hari	T: 3,4 hari-2,9 hari	T: 3,3 hari-2,9 hari	T: 2,9 hari	LNSW
			R: 2,83 hari	R: 2,80 hari	R: 2,84 hari	R: 2,62 hari	R: 2,88 hari	

1.1.3 ASPIRASI MASYARAKAT

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin, dari semula 4,34 (empat koma tiga empat) tahun 2020 menjadi 4,48 tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap 10 (sepuluh) aspek layanan pada tahun 2024 juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Meskipun kepuasan agregat sudah tinggi, masih terdapat potensi penguatan kualitas layanan yang berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas, kecepatan, dan infrastruktur digital. Untuk meningkatkan skor ini, Kemenkeu perlu berinvestasi lebih dalam infrastruktur digital dan meningkatkan layanan daring yang lebih responsif.

Upaya perbaikan dirancang untuk menjaga standar pelayanan publik yang tinggi, memperkuat efisiensi operasional, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna di tengah tren digitalisasi. Beberapa rekomendasi terkait antara lain: 1) optimalisasi layanan berbasis digital, 2) optimalisasi layanan telepon dan peningkatan kualitas komunikasi, 3) penyediaan sarana dan prasarana komunikasi visual yang informatif, 4) pembuatan himpunan peraturan yang mudah diakses bagi *stakeholder* 5) penyederhanaan alur dan proses penyelesaian layanan, 6) sosialisasi antikorupsi dan keterbukaan informasi, 7) pengembangan sistem umpan balik dan penanganan pengaduan, serta 8) pengembangan saluran pengaduan untuk pelanggaran integritas.

Dalam rangka menyerap masukan dari *stakeholders*, Kemenkeu juga melaksanakan penjangkaran aspirasi dari para pemangku kepentingan

sebagai upaya memperoleh informasi, kritik, serta saran yang konstruktif guna mendukung proses penyempurnaan kebijakan dan kinerja institusi. Kegiatan ini dilakukan melalui forum diskusi (forum komunikasi/konsultasi publik) bersama masyarakat, asosiasi dan lembaga masyarakat serta edukasi publik kepada mahasiswa yang sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan, menjalin komunikasi yang transparan, serta membangun kemitraan yang sinergis antara Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut diperoleh berbagai masukan strategis antara lain terkait dengan penguatan integritas di lingkungan Kemenkeu, penyederhanaan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, dan perbaikan kualitas layanan dan penyempurnaan regulasi di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran, penguatan daya beli masyarakat, serta peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) agar lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun dari kegiatan edukasi publik teridentifikasi adanya kebutuhan edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara, khususnya kepada kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, guna mendorong pemahaman yang lebih komprehensif serta partisipasi aktif dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kemenkeu telah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Kemenkeu mengidentifikasi kekuatan atau potensi utamanya yaitu komitmen pimpinan, tata kelola dan budaya organisasi Kemenkeu yang proaktif dan adaptif. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengelolaan organisasi, SDM, pengendalian dan pengawasan internal, dan pengembangan TIK dalam mewujudkan kinerja organisasi secara optimal. Adapun kelemahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait dengan kualitas layanan, birokrasi, serta otomasi layanan.

Pada aspek organisasi, pengelolaan organisasi Kemenkeu telah didesain secara modern antara lain ditandai dengan adanya ekosistem kerja yang *reliable* seperti pengimplementasian *office automation*, *reengineering* proses bisnis, serta pengembangan pola kerja kolaboratif dan pelaksanaan reformasi birokrasi berkelanjutan yang ditandai dengan nilai reformasi birokrasi yang secara konsisten meningkat selama lima tahun terakhir (2019:87,7; 2023: 93,34).

Pengelolaan SDM Kemenkeu juga telah diselaraskan dengan implementasi pola kerja baru yaitu dengan diperkenalkannya fleksibilitas dalam bekerja (*Flexible Working Arrangement*) yang didukung optimalisasi penggunaan teknologi seperti *platform* kolaborasi dan *video conference*. Implementasi pola kerja baru ini juga dilengkapi dengan penyempurnaan kebijakan manajemen kinerja, penguatan budaya Kemenkeu, dan pemberdayaan *talent*. Sebagai dampak dari pola kerja baru tersebut, Kemenkeu juga menerapkan kebijakan *negative growth*, sehingga secara konsisten menurunkan jumlah pegawai Kemenkeu selama periode 2019-2023 (tahun 2019: 82.468; tahun 2024: 77.055)

Selain itu, kekuatan Kemenkeu juga dapat dilihat dari pengawasan internal yang efektif yang antara lain melalui implementasi *3 lines of defences* dan ditunjukkan dengan indeks integritas yang semakin baik sejak tahun 2020-2024 (2020: 104,06; 2024: 91,38). Perkembangan teknologi yang makin marak juga mendorong Kemenkeu untuk menjalankan

transformasi digital secara inklusif dan berdampak, ditandai dengan pembangunan dan pengembangan berbagai proyek strategis TIK di antaranya melalui implementasi inisiatif strategis pembangunan *Smart Data Center*, pembangunan *Super Apps* Satu Kemenkeu untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, serta penyelesaian *core system* TIK Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis IT pada periode 2020-2024.

Namun demikian, Kemenkeu juga memiliki beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan dari organisasi. Salah satunya terkait dengan beberapa aspek layanan yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik atas pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. Berdasarkan hasil rekomendasi dari pelaksanaan SKPL dan Evaluasi SBPE, beberapa aspek yang memerlukan perhatian di antaranya terkait utilitas teknologi informasi dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Selain itu, kompleksitas birokrasi di Kemenkeu dengan beban administrasi yang tinggi dan kurangnya optimalisasi aset perlu mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Dalam aspek digital, otomasi layanan dan *shared service* masih perlu dioptimalkan, antara lain meliputi perluasan digitalisasi layanan, interkoneksi antarlayanan yang masih perlu diperkuat, situs antarlayanan belum menjadi *one-stop service*, serta *reskilling* dan *upskilling* kompetensi SDM. Di sisi lain, belum dapat dihindari bahwa di Kemenkeu masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan nilai integritas yang ditunjukkan antara lain jumlah pengaduan melalui WISE yang cenderung meningkat serta perlunya upaya menjaga keberlanjutan bagi unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM, di samping akselerasi bagi unit yang saat ini belum mendapatkan predikat ZI WBK.

Selain kekuatan dan kelemahan, Kemenkeu juga telah mengidentifikasi peluang dan tantangan. Peluang besar Kemenkeu adalah dipercaya sebagai salah satu penggerak pembangunan (*strategic diamond*), khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan ekspektasi Presiden atas penguatan posisi Kemenkeu dalam hal: (1) ketersediaan dan pengalokasian secara tepat dan cermat, (2) fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional, dan (3) sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional. Dengan posisi yang semakin strategis, Kemenkeu harus bekerja *beyond "business as usual"*.

Indonesia memiliki sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia tumbuh resilien dengan daya beli masyarakat tetap terjaga dan tingkat kesejahteraan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di kisaran 5,0-6,0 persen selama periode 2015-2019, dan kembali berkinerja positif pasca Covid-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada tahun 2023. Inflasi yang stabil dan terkendali menciptakan ruang kebijakan guna mendorong pertumbuhan sektor riil.

Selain itu, Indonesia dengan predikat sebagai negara dengan GDP terbesar ke-16 serta ekonomi terbesar ke-4 di dunia dan yang terbesar di kawasan ASEAN (data tahun 2024), memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta ekonomi global. Posisi ini memberikan peluang untuk memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang lebih besar, baik di tingkat regional maupun internasional diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional termasuk di dalamnya sinergi kolaborasi internasional dan antarlembaga.

Salah satu megatren yang membawa peluang signifikan adalah bonus demografi. Dengan lebih dari 281 juta penduduk, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Saat ini populasi penduduk usia produktif Indonesia mendominasi populasi secara keseluruhan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan inovasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Revolusi digital yang semakin pesat dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi di berbagai sektor serta mengidentifikasi dan mengelola risiko teknologi.

Untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah dibutuhkan sektor-sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif, antara lain peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan ekonomi digital.

Pada bidang keuangan negara, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan stabilitas politik yang relatif terjaga, reformasi ekonomi yang terus dilakukan, serta potensi pasar domestik yang besar, Indonesia menjadi negara yang menarik sebagai tujuan investasi. Indonesia berpotensi untuk memperluas basis pajak dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital. Perluasan objek penerimaan negara juga dapat dilakukan dengan memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC). Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, berbagai skema kreatif/*alternative financing* dapat membuka jalan untuk pembiayaan proyek-proyek besar yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Kemenkeu dihadapkan pada berbagai tantangan dan kondisi lingkungan strategis yang dinamis. Kemenkeu dituntut berperan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas ditengah volatilitas pasar dan kondisi global serta domestik yang semakin kompleks.

Dalam ranah domestik, tantangan juga datang dari berbagai dinamika yang semakin beragam. Salah satu masalah yang mengemuka adalah perlunya peningkatan produktivitas ekonomi Indonesia yang didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur baik yang bersifat fisik maupun kebijakan. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, sehingga ekonomi Indonesia sulit tumbuh cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen. Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, penduduk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah sebesar 52,32 persen, lulusan pendidikan menengah 34,82 persen dan lulusan pendidikan atas sebesar 12,86 persen.

Selain itu terdapat pergeseran struktur kelas masyarakat yakni penurunan penduduk kelas menengah, sedangkan masyarakat calon menengah dan yang rentan miskin terus bertambah. Risiko pergeseran ini disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Tingginya angka PHK mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.

Bonus demografi yang dialami Indonesia dapat menjadi pisau bermata dua. Dengan tingginya persentase penduduk usia produktif, maka semakin tinggi pula kebutuhan hidup masyarakat yang dihadapkan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air). Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Megatren yang ada saat ini dapat menjadi tantangan yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan iklim yang semakin nyata menjadi ancaman yang mendalam, tidak hanya bagi kelestarian alam, tetapi juga untuk stabilitas ekonomi dan sosial dan kesiapan APBN dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, eskalasi geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di kawasan Asia maupun global, berpotensi memperburuk ketidakpastian politik dan memperparah ketegangan antarnegara. Dari aspek geoekonomi, dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (kebijakan Trump) berdampak kepada sikap diskriminatif ekonomi yang mengarah ke tren unilateralisme dan melemahnya semangat multilateralisme.

Tantangan besar lain yang dihadapi Indonesia adalah pengelolaan keuangan negara yang belum optimal. Salah satunya adalah rendahnya *tax ratio*, yang menunjukkan bahwa potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal. Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang. Selain itu, efektivitas dan efisiensi belanja negara yang masih rendah juga menjadi masalah besar dalam menjaga kualitas pembangunan.

Berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis secara umum di atas, Kemenkeu telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kemenkeu pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi Kemenkeu, yakni 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Pendapatan Negara, 3) Pengeluaran Negara, 4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan, 5) Birokrasi dan Layanan Publik, serta 6) Pengelolaan Tugas Khusus.

1. Pengelolaan Fiskal

a. Potensi

- 1) Peluang investasi di Indonesia sangat potensial, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang diperkuat dengan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah baru.
- 2) Komitmen pemerintah Indonesia dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim, sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan laju emisi dalam jangka panjang serta didukung potensi sumber pendanaan dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim.
- 3) Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, yang dapat mewakili posisi negara berkembang dan juga berkomitmen untuk mempererat dialog dalam rangka mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan global serta meningkatkan kerjasama internasional.
- 4) Potensi dari pengembangan wilayah baru, antara lain potensi berkembangnya sentra ekonomi baru di wilayah IKN dan sekitarnya serta peningkatan investasi di wilayah baru sebagai wujud pemerataan ekonomi.
- 5) Peluang akselerasi transformasi ekonomi yang didukung dengan kesinambungan fiskal yang terjaga, sumber daya alam yang

melimpah, peningkatan nilai tambah industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan eksportir, pengurangan impor, penajaman fungsi sektoral dan ekosistem BUMN, pengembangan inovasi serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

- 6) Bonus demografi, yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.
- 7) Terdapat rekomendasi *International Budget Partnership* untuk melakukan penyusunan perkiraan anggaran dalam bentuk neraca.
- 8) Pengelolaan risiko fiskal daerah.
- 9) KEM-PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*) – Indeks Sinergi Fiskal dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah.

b. Permasalahan

- 1) Ketidakpastian perekonomian global, akibat konflik dan dinamika perekonomian global serta dinamika perlambatan pertumbuhan.
- 2) Meningkatnya risiko keuangan negara akibat perubahan iklim, antara lain kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai target NDC 2023 dan NZE 2060
- 3) Belum berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang disebabkan antara lain kemampuan SDM, serta paradigma bahwa ekonomi hijau belum menghasilkan profit yang lebih baik daripada ekonomi konvensional.
- 4) Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan banyak sumberdaya, antara lain transformasi fiskal secara holistik.
- 5) Transparansi fiskal masih perlu ditingkatkan.
- 6) Perumusan kebijakan fiskal daerah belum efisien dan efektif yang ditandai pengalokasian anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja/*outcome*, masih bersifat jangka pendek dan terfragmentasi, serta struktur anggaran daerah yang belum selaras dengan struktur anggaran pusat.

2. Pendapatan Negara

a. Potensi

- 1) Perluasan obyek penerimaan negara, antara lain perluasan obyek cukai, optimalisasi penerimaan yang bersumber dari komoditas minerba, penerimaan pajak dari sektor terdampak termasuk sektor energi baru terbarukan, pajak karbon, dan aktivitas *underground economy*, serta intensifikasi dan ekstensifikasi PNB.
- 2) Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi, sehingga perlu dibarengi dengan pemberian berbagai insentif/fasilitas di bidang perpajakan.
- 3) Perkembangan IT yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara, antara lain optimalisasi penerimaan APBN, maupun pemanfaatan data intelijen dengan dukungan teknologi informasi berbasis *artificial intelligence* (AI).
- 4) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan negara, antara lain kemudahan akses dan pertukaran data PNB, optimalisasi data kegiatan intelijen perpajakan dan data intelijen lainnya serta peningkatan integritas data pihak ketiga untuk kepentingan perpajakan.

b. Permasalahan

- 1) Administrasi dan proses bisnis penerimaan negara yang belum optimal, sehingga diperlukan penyempurnaan proses bisnis

kepabeanaan dan cukai serta modernisasi sistem administrasi PNPB di seluruh tahapan pengelolaan PNPB.

- 2) Masih rendahnya kepatuhan stakeholder terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara.
- 3) Belum optimalnya pengawasan terkait penerimaan negara serta peredaran barang terlarang dan dibatasi, antara lain potensi peningkatan peredaran BKC ilegal dan masih adanya penyalahgunaan NPP, risiko penghindaran/penggelapan oleh wajib pajak, penyalahgunaan pemberian berbagai insentif/fasilitas, kurangnya kapasitas SDM pengawasan, serta isu *fraud* dalam hal penerbitan faktur pajak.

3. Pengeluaran Negara

a. Potensi

- 1) Realisasi Belanja Negara semakin optimal dalam menyerap pagu yang ditetapkan.
- 2) Belanja Pemerintah Pusat memberi manfaat langsung untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga.
- 3) Kinerja Belanja K/L cukup baik dengan disiplin tata kelola yang terus terjaga.
- 4) TKD menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- 5) Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sudah mulai berjalan.
- 6) Dana Keistimewaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

b. Permasalahan

- 1) Adanya kebutuhan fleksibilitas anggaran belanja pemerintah sebagai *tool* intervensi kebijakan.
- 2) Sinkronisasi belanja K/L, Transfer ke daerah dan APBD masih belum optimal dilaksanakan.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak cukup memberikan persamaan persepsi capaian program-program pemerintah.
- 4) Kuantitas dan kualitas belanja negara perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
- 5) Belanja K/L belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam mendukung program dan kegiatan strategis yang bersifat prioritas.

4. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

a. Potensi

- 1) Pengelolaan aset kekayaan negara serta optimalisasi pengelolaan dana kas negara telah memberikan PNPB dengan tren meningkat.
- 2) Digitalisasi perbankan dan untuk simplifikasi pengelolaan pelaksanaan anggaran pemerintah melalui pembangunan ekosistem *cashless* pembayaran pemerintah.
- 3) Pengembangan SIMAN untuk mendorong pengelolaan kekayaan negara semakin produktif dan terciptanya *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
- 4) Aplikasi Lelang sebagai inovasi berkelanjutan terbaik nasional menjadi *one stop service* layanan lelang dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara, penegakan hukum, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

- 5) Pengelolaan investasi yang berfokus pada investasi dan pengembangan berkelanjutan.
- 6) Peluang penggunaan Skema Kreatif/Alternatif *Financing* untuk pembangunan nasional dengan pengelolaan risiko yang memadai masih sangat dibutuhkan.
- 7) Pengembangan pasar keuangan dan perluasan pengelolaan pembiayaan termasuk pembiayaan syariah yang *prudent* dan efisien.
- 8) Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan indeks sinergi fiskal.

b. Permasalahan

- 1) Belum tersedia *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian dalam pengambilan keputusan program pembangunan, serta neraca sumber daya alam yang tersedia belum komprehensif untuk mendukung kebijakan fiskal.
- 2) Sistem informasi kinerja dan fiskal nasional masih belum terintegrasi dan *holistic* sebagai akibat belum tersedianya referensi yang standar antara BAS Pusat dan Daerah.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi *Financial Advisor* ke daerah.
- 4) Besarnya nilai piutang negara pada LKPP membutuhkan perbaikan pengelolaan piutang negara pada K/L.
- 5) Integritas data pengelolaan BMN perlu ditingkatkan.
- 6) Kondisi perekonomian dan pasar keuangan global masih dipenuhi ketidakpastian memicu keterbatasan pendanaan dan likuiditas pasar.
- 7) Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan negara, khususnya kekayaan negara lain-lain.
- 8) Perlunya perumusan strategi terkait peran Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam lembaga pengelola dana masyarakat.
- 9) Perlunya peningkatan sinergi UE I di lingkungan Kemenkeu terkait dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
- 10) Imbal hasil tinggi SBN relatif tinggi dibandingkan negara-negara *peers*.

5. Birokrasi dan Layanan Publik

a. Potensi

- 1) Pengelolaan organisasi Kemenkeu yang telah didesain secara modern berlandaskan budaya organisasi yang kuat, antara lain ditandai dengan a) pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel, b) tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi, dan c) reorganisasi yang dilakukan secara terencana.
- 2) Pengelolaan SDM Kemenkeu yang telah diselaraskan dengan ekosistem kerja baru antara lain melalui a) penyelarasan kebijakan pengelolaan ASN dengan regulasi di level nasional, b) pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, dan c) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.
- 3) Tersedianya berbagai program dan fasilitas pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara yang didukung dengan kemitraan strategis, antara lain melalui a) penerapan Kemenkeu *Corpu*, b) implementasi model pembelajaran yang terintegrasi, c) optimalisasi TIK dalam

pembelajaran dan program akreditasi, d) pengelolaan *knowledge management* terintegrasi, e) penguatan kerjasama di bidang pengembangan SDM, dan f) pembinaan jabatan fungsional melalui akreditasi dan peningkatan kompetensi.

- 4) Transformasi digital yang inklusif dan berdampak sehingga TIK mampu berperan tidak saja sebagai pendukung namun menjadi *enabler* proses bisnis organisasi, yang ditandai diantaranya dengan a) pengembangan berbagai *project* strategis TIK dan b) peningkatan pelayanan berbasis IT.
- 5) Implementasi pola pengawasan internal yang secara efektif mampu menjaga integritas organisasi antara lain melalui a) penguatan implementasi 3 *lines of defences*, b) pelaksanaan investigasi secara kuat, c) penjagaan integritas secara berkelanjutan, serta d) penerapan asuransi dan konsultasi yang bernilai tambah dan *combined assurance* yang efektif.

b. Permasalahan

- 1) Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja keuangan negara yang optimal, antara lain ditandai dengan a) respon atas perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, b) masih maraknya penipuan yang mengatasnamakan instansi, c) perlunya optimalisasi pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kebijakan nasional/kementerian untuk mendukung program strategis pemerintah, d) kebutuhan utilisasi IT untuk pelayanan publik yang masih dapat ditingkatkan, e) kebutuhan optimalisasi cakupan pembelajaran, akreditasi program dan sertifikasi/uji kompetensi di bidang keuangan negara serta f) kebutuhan penguatan implementasi tridharma perguruan tinggi.
- 2) Alokasi dan distribusi sumber daya yang belum optimal, antara lain ditandai dengan a) keterbatasan aset untuk pemenuhan operasional kantor (termasuk kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan *green economy* dalam pemenuhan sarana prasarana), b) pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang belum harmonis dengan pelaksanaan anggaran, c) kebutuhan pengadaan SDM dengan kualifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan dari unit eselon I tertentu, dan d) kebijakan organisasi sebagai respon atas pemindahan ke IKN.
- 3) Kebutuhan penguatan integritas organisasi, yang antara lain ditandai dengan a) risiko pelaksanaan pekerjaan di Kemenkeu, b) belum seluruh satker memperoleh predikat ZI WBK-WBBM, c) upaya mempertahankan keberlanjutan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM; d) masih adanya beberapa kasus pelanggaran integritas; dan e) adanya ketidakpatuhan serta potensi risiko khususnya pada instansi vertikal.
- 4) Kebutuhan pengembangan SDM secara cepat dan tepat untuk merespon tuntutan perkembangan lingkungan yang dinamis, antara lain ditandai oleh a) perlunya optimalisasi kegiatan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, b) perlunya penguatan kemitraan strategis, c) kebutuhan pemenuhan jumlah pengajar, d) perlunya *upgrading* kemampuan Widyaiswara secara berkala, e) perlunya peningkatan komitmen pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran dari seluruh unit eselon 1, dan f) kebutuhan perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan minat pegawai pada jabatan yang berisiko tinggi.

6. Pengelolaan Tugas Khusus

a. Potensi

- 1) Pengelolaan dana telah dilakukan secara optimal dan *prudent* melalui berbagai instrumen investasi yang menguntungkan.
- 2) Kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders* telah dilaksanakan dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Perluasan dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat kepada *stakeholders*.
- 4) Utilisasi teknologi informasi telah dimaksimalkan dalam rangka memudahkan pelayanan kepada penerima manfaat, baik eksternal maupun internal.
- 5) Permintaan terhadap lulusan PKN STAN dari berbagai KL maupun Pemda semakin tinggi selaras dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

b. Permasalahan

- 1) Masih adanya hambatan dari sisi regulasi yang mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya peraturan terkait dengan investasi pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung diversifikasi dan percepatan investasi.
- 2) Distribusi penerima manfaat dari dana kelolaan belum merata, misalnya penyaluran pembiayaan UMi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
- 3) Persepsi publik dan reputasi pemerintah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan *special mission*, misalnya masih kuatnya pandangan negatif terhadap minyak sawit yang dianggap berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, serta adanya kasus korupsi yang menurunkan tingkat kepercayaan negara donor.
- 4) Faktor eksternal juga berpengaruh, seperti masih terbatasnya *ownership* dan *engagement stakeholders* kerja sama pembangunan internasional, serta kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

2.1 VISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Visi Kemenkeu Tahun 2025-2029 adalah VISI: **“Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.2 MISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk mencapai Visi Kemenkeu, dicapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.
2. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam rangka mewujudkan Kemenkeu sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kemenkeu. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kemenkeu melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio defisit APBN terhadap PDB.
2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB.
3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara.

4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB.
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kemenkeu, telah ditetapkan enam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kemenkeu selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil.
2. Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNB yang maksimal.
3. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif.
5. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil	Ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi geopolitik	a. Penguatan tata kelola fiskal dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi;	DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJA, DJPPR, DJPK
			b. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama keuangan internasional.	DJSEF, DJSPSK, DJBC
		Tren perubahan iklim semakin meningkat	a. Implementasi ekonomi hijau; b. Implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.	DJSEF, DJSPSK, DJA

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		Literasi sektor keuangan yang masih rendah	Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan.	DJSPSK, DJPPR
2.	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal	Administrasi dan proses bisnis penerimaan negara yang belum optimal	Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
		Masih rendahnya kepatuhan <i>stakeholder</i> terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara	Optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
		Dampak perubahan ekonomi makro terhadap penurunan penerimaan negara	a. Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara; b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
3.	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas	Sinkronisasi Belanja K/L dan Transfer ke daerah masih belum optimal dilaksanakan	a. Konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi; b. Standardisasi dan pemutakhiran sinergi Bagan Akun Standar (BAS) antara pemerintah pusat dan daerah.	DJA, DJPK
		Belanja K/L dan Transfer ke daerah belum sepenuhnya	a. Penguatan <i>value for money</i> , peningkatan <i>evidence based</i>	DJA, DJPK

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		efektif dan efisien	<i>budgeting</i> , dan monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan penganggaran; b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi.	
4.	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, <i>prudent</i> , dan inovatif	Kualitas pelaksanaan anggaran K/L belum optimal	a. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi b. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	DJPb
		Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah atau memberikan manfaat ekonomi	a. Identifikasi dan evaluasi BMN <i>underutilized</i> ; b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	DJKN
		Terjadinya <i>excess cash</i> yang meningkatkan <i>Cost of Fund</i>	Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara <i>cash management</i> dan <i>debt management</i>	DJPPR, DJPb
		Terbatasnya sumber pembiayaan APBN untuk mendanai	Pengembangan dan Implementasi skema pembiayaan kreatif (non-APBN)	DJPPR

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		pembangunan nasional		
5.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.	Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja keuangan negara yang optimal.	a. Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi; b. Penguatan <i>integrated core system</i> Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu (kecerdasan buatan, <i>Single Profile</i> , dan <i>Customer Relationship Management</i> yang berkualitas).	Setjen, BaTii
		Pengelolaan sumber daya organisasi belum optimal	a. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi. b. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penataan Postur SDM, dan kompetensi SDM. c. Optimalisasi pola kerja baru yang didukung <i>office automation</i> sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi. d. <i>Reengineering</i> proses bisnis Pengelolaan BMN,	Setjen, BPPK

No .	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
			menuju konsolidasi dan optimalisasi aset bersama. e. Penguatan kualitas belanja mencakup pengendalian belanja birokrasi	
		Penguatan integritas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan belum terintegrasi	a. Penguatan integritas dalam memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu; b. Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi.	Itjen
6	Pencapaian tugas khusus yang efektif	BLU di lingkungan Kemenkeu belum optimal dalam pelaksanaan mandat	a. Pemanfaatan peluang investasi secara maksimal dan bauran investasi yang lebih baik. b. Perluasan penyaluran dana kelolaan dan akses manfaat sesuai mandat BLU.	BLU Kemenkeu

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dimaksud, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dimaksud dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Sebagai penjabaran dari Tahap 1 RPJPN 2025-2045, dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional, yaitu (1) Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; (2) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (3) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran pembangunan tersebut diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan indikator:
 - 1) Penumbuhan ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029).
 - 2) GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029).
 - 3) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1%(2029).
 - 4) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029).

- b. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan indikator *Global Power Index* yang meningkat, dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029).
- c. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan indikator:
 - 1) Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8,0% (2025) dan 4,5-5,0% (2029), serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026).
 - 2) Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029).
 - 3) Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029).
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029).
- e. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan indikator:
 - 1) Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029).
 - 2) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Sasaran pembangunan nasional dimaksud akan dicapai melalui pemadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN 2025-2045, strategi pembangunan kewilayahan, serta tata kelola pelaksanaan pembangunan. Pemadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN menghasilkan arah pembangunan dan Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun strategi kewilayahan merupakan upaya dalam menyatukan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi prioritas pembangunan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Beberapa strategi yang dilaksanakan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja, serta memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Melalui sinergi dari empat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkesinambungan.

Adapun strategi pembangunan manusia bertumpu pada (1) pemenuhan layanan dasar (antara lain pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial), (2) pembangunan modal manusia (antara lain pendidikan serta kebudayaan dan prestasi olahraga), serta (3)

pembangunan modal sosial budaya (antara lain agama dan budaya). Di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Sedangkan intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas.

Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Delapan strategi dimaksud adalah (1) Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, (2) Industrialisasi/hilirisasi, (3) Pariwisata dan ekonomi kreatif, (4) Ekonomi biru dan ekonomi hijau, (5) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, (6) Transformasi digital, (7) Investasi, dan (8) Belanja negara untuk produktivitas.

Sebagai langkah konkret untuk mencapai target sasaran pembangunan dan strategi prioritas pembangunan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan dimaksud merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Sebagai pengelola fiskal, Kemenkeu memiliki peran strategis dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara, yaitu (1) Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan (2) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029

Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden merupakan inti dari RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi dimaksud akan dicapai melalui Delapan Misi Presiden (Asta Cita), yaitu:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita juga sebagai Prioritas Pembangunan Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis, untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

3. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% sampai dengan 8,0% dengan dilandasi stabilitas ekonomi makro yang kuat. Untuk mencapai sasaran ekonomi makro jangka menengah, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru dan inovatif, memperkuat peran kelas menengah, penguatan peran sektor eksternal, penerapan kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas moneter sebagai *enabler* transformasi, serta pemerataan ekonomi di setiap wilayah.

Penguatan fondasi ekonomi melalui penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru dan inovatif di sektor produktif, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperluas kelas menengah. Penguatan kelas menengah menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mewujudkan status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah melalui belanja pusat dan transfer ke daerah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, seiring dengan penerapan kebijakan fiskal yang adaptif.

Transformasi ekonomi juga akan dipacu melalui pengembangan sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, antara lain hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor manufaktur, digitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan. Investasi ditetapkan sebagai motor utama pertumbuhan yang didukung oleh perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan regulasi. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah diprioritaskan untuk mendukung efisiensi logistik dan distribusi barang dan jasa, serta mendorong perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor guna meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural, meningkatkan pendapatan dan belanja negara secara terukur (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang sehat (*pro-stability* dan *fiscal sustainability*). Di sisi lain, kebijakan moneter akan difokuskan pada stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai *enabler* transformasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Program pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui dukungan modal usaha dan peningkatan akses ke lapangan pekerjaan. Dalam jangka menengah, Pemerintah menetapkan target optimis terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta penurunan rasio gini.

Untuk mendukung akselerasi ekonomi dan kesejahteraan, Pemerintah menyusun strategi ekonomi dan fiskal jangka menengah, yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Strategi ini difokuskan pada: (i) ketahanan pangan, (ii) ketahanan energi, (iii) efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG), (iv) pendidikan bermutu, (v) kesehatan berkualitas, (vi) pembangunan desa, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan UMKM, (vii) penguatan pertahanan semesta, serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Selanjutnya, kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Dan pada akhirnya, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi lebih maju, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah.

Akhirnya, dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi yang lebih maju, pembangunan koridor kewilayahan akan dilakukan dengan memerhatikan karakteristik masing-masing daerah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah dinamika global.

4. Peran Sentral Kementerian Keuangan dalam *Strategic Diamond*

Untuk mewujudkan visi misi Asta Cita Presiden periode 2025–2029, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut organisasi kementerian negara yang mampu memenuhi penguatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintahan. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan kepada 4 (empat) K/L, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk secara bersama-sama melaksanakan/memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan (*Strategic*

Diamond). Konsep *Strategic diamond* ini merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dengan tujuan utama untuk mencari pola yang ideal dan cara yang paling singkat untuk mencapai visi dan misi Presiden, dimana empat K/L yang menjalankan peran sebagai *strategic diamond* bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu cerminan peran penting Menkeu sebagai bagian dari *strategic diamond* adalah fungsi alokasi dalam konteks penyusunan APBN, yaitu bagaimana anggaran negara diperoleh dan digunakan untuk mengarahkan sumber daya pada berbagai sektor, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. APBN sebagai *tools* mencapai visi misi Presiden selama ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, misalnya belum optimalnya keterkaitan langsung antara Program dan Kegiatan K/L dengan visi dan misi Presiden, masih dominannya pendekatan sektoral dibanding pendekatan tematik lintas sektor, serta masih terdapat inefisiensi dalam alokasi anggaran. Kondisi dan dinamika tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Kemenkeu sebagai bagian dari institusi kunci *strategic diamond* dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja.

5. Dukungan Kementerian Keuangan dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Kemenkeu mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Adapun rincian keterlibatan Kemenkeu pada seluruh Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kemenkeu melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 1, melalui arah kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional; Penguatan Komunikasi Publik dan Media; serta Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
- 2) Arah kebijakan penguatan komunikasi publik dan media dilaksanakan melalui penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
- 3) Arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM dilaksanakan melalui strategi internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender.

b. Prioritas Nasional 2: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 2 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional Swasembada Energi; Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi Syariah; Pengelolaan Hutan Lestari; Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi; serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui strategi penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.
- 2) Arah kebijakan Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi proses akses Indonesia ke OECD.
- 3) Arah kebijakan penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui strategi penguatan dana sosial syariah.
- 4) Arah kebijakan pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui strategi peningkatan fungsi sosial kawasan hutan.
- 5) Arah kebijakan keamanan laut dan hidro-oseanografi dilaksanakan melalui strategi kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*.
- 6) Arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati.
- 7) Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi penguatan cadangan pangan.
- 8) Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan melalui strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

c. Prioritas Nasional 3: “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 3 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, serta Pendalaman Sektor Keuangan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif.
- 2) Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui strategi penguatan peran sektor keuangan nonbank.

d. Prioritas Nasional 4: "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas".

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 4 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, serta Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM).

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dilaksanakan melalui strategi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 2) Arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola dilaksanakan melalui strategi produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan.
- 3) Arah kebijakan penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) dilaksanakan melalui strategi peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi.
- 4) Arah kebijakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi pencegahan dan penurunan *stunting*.

e. Prioritas Nasional 5: “Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 5 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi *Backbone* Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional; Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global; serta Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dilaksanakan melalui strategi peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle* (EV); dan peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.
- 2) Arah kebijakan peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dilakukan melalui strategi peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global.
- 3) Arah kebijakan optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan Sistem Logistik Nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

Pada prioritas nasional ini, Kemenkeu berkontribusi dalam pencapaian indikator RPJMN 2025-2029 yaitu:

Tabel 3.1

Target Indikator Waktu Penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Waktu Penahanan (<i>dwell time</i>) di pelabuhan selama fase impor	2,90-2,85 hari	2,66-2,60 hari

f. Prioritas Nasional 6: “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 6 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan perlindungan sosial adaptif dan inklusif dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan.
- 2) Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.

g. Prioritas Nasional 7: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-2029. Salah satu sasaran dalam Prioritas Nasional 7 adalah tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Sasaran dimaksud diukur dengan indikator kinerja tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Target Indikator Sasaran Strategis Pendapatan Negara Yang Optimal

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	12,86% – 18,00%
2	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,24%	11,52% - 15,00%
3	Rasio PNB (Persen PDB)	2,11%	1,33% - 2,99%
4	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	86	88
5	Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	(2,53)%	(2,24)% - (2,50)%
6	Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal	39,43%	38,55% - 38,64%

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi Pendapatan Negara, Optimalisasi Belanja Negara, Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta Pengendalian Inflasi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (1) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (2) intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD.

- 3) Arah kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui strategi optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal dan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pembiayaan nonutang yang inovatif.
- 4) Arah kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

h. Prioritas Nasional 8: “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

Kemenkeu melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 8, melalui arah kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa; dan Pembangunan Berketahanan Iklim.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
- 2) Arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.

6. Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) gender dan inklusi sosial, (ii) tujuan pembangunan berkelanjutan, (iii) transformasi digital, (iv) pembangunan rendah karbon, dan (v) pembangunan berketahanan iklim.

Kementerian Keuangan berkomitmen mengintegrasikan lima pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

a. Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki,

pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada Kemenkeu ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan melalui pengelolaan APBN yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial Kemenkeu antara lain melalui (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender.
- 2) Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.
- 3) Meningkatkan kualitas penganggaran pemerintah pusat, serta Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan HKPD, (2) peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan Keuangan dan Kekayaan Negara yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis Kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (2) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan rencana aksi nasional dan daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (5) Inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat antara lain melalui (1) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, (2) mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan fasilitasi kredit ultra mikro, (3) meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat, (4) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat, dan (5) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup antara lain melalui (1) mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, (2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (3) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (4) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana, (5) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, (6) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya, (7) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKD berbasis pemenuhan pelayanan dasar, dan (8) menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi.
- 3) Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya antara lain melalui (1) melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, event, maupun rapat-rapat di lingkungan Kemenkeu, dan (2) efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan Kemenkeu.

c. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian melalui Penyempurnaan Tata Kelola yang Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika Perkembangan Teknologi, Peningkatan kualitas layanan digital yang andal, berkualitas, dan inklusif, Penguatan pusat data dan infrastruktur TIK, Peningkatan kualitas SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif, Penguatan keamanan informasi dan Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data.

d. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan; (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan; (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Implementasi Pembangunan Rendah Karbon pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)/ *carbon pricing*. NEK adalah pemberian harga terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. NEK menjadi intervensi kebijakan yang mencerminkan terjadinya *market failure* atas eksternalitas yang ditimbulkan dengan memanfaatkan kekuatan pasar. NEK juga dimaksudkan sebagai praktik dari *polluters pay principle*, serta menjadi sumber alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah.

- 2) Peningkatan akses pembiayaan perubahan iklim dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan *Nationally Determined Contributions (NDC) Mitigation Roadmap*, sektor energi membutuhkan porsi pendanaan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk mencapai target *Net Zero Emission (NZE)* di 2060 atau dipercepat, Indonesia menyusun peta jalan menuju transisi energi bersih dan mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.

e. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; serta (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan Anggaran Perubahan Iklim *Climate Budget Tagging (CBT)*.
Dalam rangka mengukur dan mengoptimalkan dukungan APBN terhadap penanganan perubahan iklim, Kemenkeu melakukan kegiatan penandaan CBT. Setiap tahun kegiatan ini menghasilkan laporan sebagai bentuk transparansi publik dan akuntabilitas pengelolaan APBN dalam mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan Kementerian/Lembaga. CBT juga dilaksanakan dalam lingkup pemerintah daerah melalui RCBT yang mencakup seluruh pemerintah provinsi, seiring dengan proses pengembangan sistem *auto-tagging*.
- 2) Pengembangan instrumen pembiayaan kreatif berbasis lingkungan.
Besarnya kebutuhan pembiayaan perubahan iklim mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi APBN dan memobilisasi dana dari berbagai sumber selain APBN, meliputi pendanaan domestik lainnya yang bersumber selain dari APBN, maupun sumber pendanaan internasional lainnya baik yang berasal dari negara lain, swasta, filantropi, organisasi internasional serta mitra potensial lainnya.
- 3) Tata kelola implementasi *Pooling Fund* Bencana.

Pooling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Terdapat 5 (lima) tujuan Kemenkeu periode tahun 2025-2029, yaitu (1) Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi; (2) Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; (3) Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat; (4) Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; dan (5) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Adapun rincian strategi Kemenkeu dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025-2029 serta tujuan Kemenkeu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi

Dalam RPJMN 2025-2029, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,0 persen pada tahun 2029 yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu hal yang menjadi isu adalah kompleksitas tantangan kebijakan fiskal dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan transformasi ekonomi. Pendalaman sektor keuangan dan peningkatan literasi masyarakat di bidang keuangan dibutuhkan dalam rangka merangsang kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dibutuhkan untuk memelihara hubungan internasional agar tetap kondusif dan menjaga kepentingan nasional. Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk

turut menurunkan emisi gas rumah kaca juga terus diwujudkan dengan langkah nyata.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil. Pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan tata kelola fiskal dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyusunan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang (*long term fiscal sustainability*) dalam periode 30 tahun ke depan.
 - 2) Penyusunan kajian perkiraan anggaran dalam bentuk neraca pada Nota Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi *International Budget Partnership*.
 - 3) Optimalisasi proses bisnis pengelolaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah melalui revisi kebijakan tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
 - 4) Penguatan kebijakan fiskal yang mendorong hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA).
- b. Arah kebijakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2) Penyelarasan kebijakan fiskal dan target nasional dengan kebijakan anggaran daerah.
 - 3) Peningkatan sinergi Bagan Akun Standar (BAS) Pusat dan Daerah.
- c. Arah kebijakan pengembangan dan pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan peran perbankan yang difokuskan pada pengembangan berbagai aspek, mulai dari struktur, efisiensi (*cost of fund*), keberagaman produk, jangkauan penyaluran kredit, cakupan aktivitas usaha hingga pemanfaatan teknologi, termasuk penguatan kerangka regulasi.
 - 2) Penguatan sektor keuangan nonbank melalui optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun, dan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang, termasuk penguatan kerangka regulasi.
 - 3) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung oleh edukasi dan sosialisasi produk keuangan, termasuk penguatan kerangka regulasi.
 - 4) Percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah pada sektor perbankan dan sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal), serta penguatan kerangka regulasi.
 - 5) Peningkatan peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi.

- 6) Penguatan stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi antarlembaga, penyelenggaraan simulasi krisis, dan penguatan protokol manajemen krisis.
 - 7) Penguatan peran pembinaan dan pengawasan profesi keuangan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme profesi keuangan, transformasi layanan digital, serta penyusunan kebijakan yang responsif.
 - 8) Penguatan ekosistem profesi keuangan dalam kerangka ekosistem sektor keuangan.
- d. Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Optimalisasi kerja sama internasional melalui rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk penguatan agenda prioritas termasuk diversifikasi kerja sama ekonomi dan investasi, pendanaan inovatif dan penguatan sektor prioritas.
 - 2) Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerja sama kepabeanaan internasional.
- e. Arah kebijakan pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Memberikan insentif perpajakan guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
 - 2) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kemenkeu atau dengan K/L lainnya.
 - 3) Pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan
 - 4) Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanaan dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pembangunan dan pengembangan industri sebagai langkah percepatan hilirisasi industri nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, dan sebagainya.
- f. Arah kebijakan implementasi ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi:
- a. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan kerja sama dengan negara lain/lembaga/forum internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang *robust*, berkelanjutan dan inklusif.
 - b. Implementasi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas, efek rumah kaca serta mendorong transisi ke ekonomi berkelanjutan.
 - c. Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon melalui upaya diantaranya, mendorong pengembangan industri berbasis baterai (elektronik dan otomotif), meningkatkan EBT dalam bauran energi nasional, mendorong pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk investasi teknologi rendah karbon.
- g. Arah kebijakan penguatan sinergi pengelolaan risiko fiskal daerah dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Sinkronisasi kerangka pemantauan risiko fiskal daerah dengan risiko AKN (APBN, Kontijensi dan Neraca).
 - 2) Evaluasi sistem manajemen risiko fiskal daerah, terutama yang berdampak kepada keuangan negara.
 - 3) Penyusunan *grand design* dan *Dashboard* Risiko Fiskal Daerah (DARA) untuk mendukung pengelolaan risiko fiskal daerah.

- 4) Penguatan *Regional Chief Economist* (RCE) dalam identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah yang berdampak ke APBN.

2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional

Pendapatan negara merupakan sumber pendanaan utama dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu besar dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional adalah rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup administrasi *gap* maupun *policy gap* dalam menghimpun pendapatan negara.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal. Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi perpajakan maupun PNBP. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.
 - 2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.
 - 3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
 - 4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.
 - 5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
 - 6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).
 - 7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.
- b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.
 - 2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui *single profile* Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
 - 3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.
 - 4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.
- c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko

antara lain melalui *Big Data/Advanced Analytics* dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (*Intelligence-Led Compliance*).

- 2) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara
- 3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.
- 4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.
- 5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan dan piutang PNB, termasuk melalui optimalisasi implementasi *Automatic Blocking*.
- 6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara.

3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat

Dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan belanja negara diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu hal yang menjadi isu adalah tingkat efektivitas dan efisiensi belanja masih rendah. Oleh karena itu, optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 - 2) Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
 - 3) Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar-*stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
 - 4) Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah.
 - 5) Peningkatan kualitas proses penganggaran melalui monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan *reward and punishment*.
 - 6) Sinergi BAS Kinerja yang meliputi standardisasi referensi antara pemerintah pusat dengan daerah serta penyusunan tata kelola standardisasi dan pemutakhiran sinergi BAS antara pemerintah pusat dan daerah.

- 7) Pengalokasian anggaran untuk pendanaan prioritas pembangunan antara lain: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.
- b. Arah kebijakan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, transfer ke daerah, dan belanja daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - 2) Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
 - 3) Peningkatan edukasi terkait kebijakan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.
 - 4) Optimalisasi interkoneksi pelaporan penerimaan perpajakan daerah yang dilakukan secara *real-time* dalam rangka percepatan dan kepatuhan pelaporan.
 - 5) Penguatan pertukaran dan konsolidasi basis data perpajakan daerah, serta pengawasan wajib pajak bersama untuk mendorong penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah.
 - 6) Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui *Diagnostic Tools* terintegrasi SIKD secara berkesinambungan.
 - 7) Sinkronisasi kebijakan sektoral terkait PDRD untuk kepastian hukum pemungutan, mencegah pajak berganda, dan memastikan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
 - 8) Penguatan pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi atas Kebijakan Opsen Pajak dan *Earmarking* dalam belanja APBD yang bersumber dari pajak daerah.
 - 9) Diseminasi kebijakan PDRD dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan PDRD di daerah.
 - 10) *Revisit* UU HKPD terkait dengan kebijakan PDRD.

4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik

Penggunaan APBN yang tepat sasaran dan produktif akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu besar dalam pelaksanaan APBN dari sisi belanja dan pembiayaan adalah kualitas dan *size* belanja yang belum optimal serta belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan nonutang untuk mendorong sasaran pembangunan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan dilakukan melalui strategi:
- 1) Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara dan lelang melalui penyelesaian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilai dan RUU Perlelangan
 - 2) Penyusunan *Roadmap* R&D penilaian yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan berkelanjutan.
 - 3) Penguatan pengelolaan pinjaman dalam kerangka pembiayaan yang terkendali untuk proyek strategis pemerintah.
 - 4) Optimalisasi Forum Kerjasama Perbendaharaan di regional Asia Tenggara (*ASEAN Treasury Forum/ATF*) dan kerjasama bilateral/multilateral dengan negara/institusi keuangan internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan.
 - 5) Perbaikan dan interkoneksi antarsistem sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan belanja pemerintah pusat antara Kemenkeu dan K/L terkait.
 - 6) Pengembangan sistem informasi guna mendukung penyaluran belanja TKD.
 - 7) Penguatan peran Kemenkeu melalui penajaman fungsi *treasury*, pelaksanaan analisis ekonomi dan fiskal regional, serta *financial advisor* dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah.
 - 8) Penyempurnaan dan simplikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang terintegrasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan serta pengelolaan pertanggungjawaban bendahara.
 - 9) Integrasi Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Kinerja Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung capaian visi pemerintah.
 - 10) Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk mewujudkan *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
 - 11) Implementasi sistem informasi untuk mewujudkan satu data nilai properti, bisnis, dan sumber daya alam nasional yang transparan, akurat, dan terintegrasi.
 - 12) Implementasi digitalisasi pelayanan lelang melalui Aplikasi Lelang yang berkelanjutan.
- b. Arah kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern, dilakukan melalui strategi:
- 1) Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*.
 - 2) Penguatan sinergi dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
 - 3) Penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk mendukung program strategis Presiden.
 - 4) Optimalisasi pengelolaan piutang negara pada K/L yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - 5) Penguatan sinergi dalam rangka pengurusan piutang negara melalui tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik terhadap penanggung utang dan pihak terkait.
 - 6) Penguatan dan simplifikasi kerangka investasi pemerintah permanen dan nonpermanen.
 - 7) Pengukuran efektivitas investasi pemerintah berdasarkan skema yang kredibel dan akuntabel.

- c. Arah kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Kreatif dan Pengelolaan Risiko yang *Prudent*, dilakukan melalui strategi:
- 1) Pengembangan dan implementasi skema *blended financing* yang optimal untuk proyek pembangunan infrastruktur.
 - 2) Sinkronisasi penyediaan sumber pembiayaan (pinjaman dan SBSN Proyek), investasi dan dukungan terhadap BUMN serta SMV, serta penguatan dukungan APBN terhadap proyek KPBU.
 - 3) Penjaminan pemerintah yang mendukung pembiayaan kreatif untuk mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat strategis termasuk pengelolaan sampah.
 - 4) Penguatan pemanfaatan BMN melalui dukungan fasilitas dan pengembangan pembiayaan kreatif.
 - 5) Penyempurnaan strategi komunikasi *Investor Relation Unit* (IRU) dalam rangka perluasan basis investor.
 - 6) Penguatan sistem keuangan domestik dan pasar lokal dalam memobilisasi sumber pendanaan dalam dan luar negeri.
 - 7) Penguatan fasilitas penyiapan proyek/*project development facility* dalam proses penyiapan, pengadaan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyediaan proyek infrastruktur.
 - 8) Penguatan implementasi dan penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko APBN, kewajiban kontinjensi dan neraca konsolidasi sektor publik.

5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Transformasi sektor publik yang bertumpu pada percepatan reformasi birokrasi transformasi digital, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel merupakan pengungkit utama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu terkait transformasi sektor publik yang perlu memperoleh perhatian antara lain keterpaduan layanan publik belum optimal, akses pelayanan publik belum memadai, penerapan sistem merit belum optimal, serta proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi/tidak efektif.

Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi Kemenkeu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor publik pada level nasional melalui upaya mengembangkan birokrasi yang efisien, produktif, dan melayani, memperkuat karakter SDM, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas digitalisasi layanan keuangan negara, dan modernisasi infrastruktur layanan pada kantor layanan. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah: (1) birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas, dan (2) pencapaian tugas khusus yang efektif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan penguatan budaya dijabarkan melalui strategi:
- 1) Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, *leadership*, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai.
 - 2) Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko.

- 3) Penguatan integritas dalam upaya memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu.
 - 4) Optimalisasi pola kerja baru yang didukung *office automation* sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi.
 - 5) *Reengineering* proses bisnis pengelolaan BMN, menuju konsolidasi dan optimalisasi aset bersama.
 - 6) Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek *well-being*, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun.
- b. Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian *intern* dijabarkan melalui strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi.
 - 2) Transformasi proses bisnis yang adaptif.
 - 3) Simplifikasi dan redesain EA dalam Sistem Informasi Kemenkeu guna mempercepat *reengineering* proses bisnis utama Kemenkeu.
 - 4) Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
 - 5) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk *talent* digital), redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.
 - 6) Peningkatan kualitas implementasi Kemenkeu *Corporate University* untuk mewujudkan *learning organization* yang matang.
 - 7) Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas *talent*.
 - 8) Penyelenggaraan akreditasi program pelatihan, sertifikasi, dan/atau uji kompetensi di bidang keuangan.
 - 9) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi.
- c. Arah kebijakan modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja dijabarkan melalui strategi:
- 1) Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*).
 - 2) Penguatan *integrated core system* Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu (kecerdasan buatan, *Single Profile*, dan *Customer Relationship Management* yang berkualitas).
 - 3) Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi, ditandai dengan disusunnya Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu Tahun 2025-2029.
 - 4) Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making*, *alert*, dan *early warning*.
 - 5) Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.

- 6) Penyiapan dan mitigasi kepindahan ke IKN antara lain pada aspek pengadaan kantor dan hunian pegawai serta mekanisme kerja baru IKN dan Jakarta.
 - 7) Perluasan pola kerja kolaboratif berbasis proyek (termasuk *squad team*); dan percepatan ekosistem JF (standardisasi kompetensi, manajemen karier, kinerja, *probation*, dan sistem kerja).
 - 8) Simplifikasi dan digitalisasi regulasi yang mudah diakses publik, serta penguatan perlindungan hukum bagi institusi dan ASN.
- d. Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik dijabarkan melalui strategi:
- 1) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
 - 2) Konsolidasi layanan eksternal dan internal Kemenkeu pada unit vertikal.
 - 3) Pengembangan dan perluasan implementasi *shared service* Kemenkeu.
 - 4) Penguatan strategi komunikasi internal maupun eksternal.
 - 5) Penguatan dukungan pengambilan kebijakan yang optimal di bidang perekonomian dan pengawasan perpajakan.
 - 6) Optimalisasi SINSW dalam fasilitasi implementasi *digital economy* terkait dengan *paperless trade* dan *cross-border paperless trade*.

Kemenkeu juga melaksanakan mandat tugas khusus (*special mission*) dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan RPJMN 2025-2029 antara lain penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang tepat sasaran; perluasan akses dan inovasi pembiayaan; serta perluasan pemanfaatan *biofuel*. Strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam pelaksanaan mandat tugas khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang investasi dengan maksimal dan bauran investasi yang lebih baik.
- 2) Perluasan akses dan penyaluran dana kelolaan sesuai dengan mandat dalam pembentukan masing-masing Badan Layanan Umum (BLU).
- 3) Penguatan pengelolaan aset dan dana jangka panjang yang berkesinambungan oleh LMAN.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara yang bereputasi unggul dan bertaraf internasional.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2025-2029 Kemenkeu memiliki lima program yang terdiri dari:

- 1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi;
- 2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
- 3) Program Pengelolaan Belanja Negara;
- 4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
- 5) Program Dukungan Manajemen.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas

Kemenkeu yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Rincian Rancangan Undang-Undang bidang tugas Kemenkeu adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi); dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Kerangka Regulasi Kemenkeu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perlelangan.

Urgensi pembentukan:

- a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
- b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang.
- c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum.
- d. Digitalisasi proses bisnis dalam era *society* 5.0.
- e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum.
- f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang.
- g. Meminimalisir adanya gugatan.
- h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945).

RUU tentang Perlelangan merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Urgensi pembentukan:

- a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki undang-undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam.
- b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi.
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah pengembangan energi baru dan terbarukan yang konkret.
- d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang Keuangan Negara.
- e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi.
- f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
- g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara.

- h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

3. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Urgensi pembentukan:

- a. Efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.
- b. Menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
- c. Menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat.
- d. Meningkatkan kredibilitas Rupiah.

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027.

4. RUU tentang Penilai.

Urgensi pembentukan:

- a. Mandat Konstitusi.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang misalnya Undang-Undang dibidang sumber daya alam dan atau Undang-Undang (UU) lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU seperti UU Pengadaan tanah, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan lainnya.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistis. Demikian pula dalam Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi.

Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya.

c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksana pelayanan publik (*beesturzorg*) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai *intermediary information provider*, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu *backbone* kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses *Initial Public Offering* (IPO) sampai dengan likuidasi *emiten* (perusahaan).

d. Mewujudkan tata kelola yang baik.

Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *good governance*, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu juga Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Di mana dari profesi tersebut hanya penilailah yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di pasar modal dan perbankan di sektor keuangan yang belum memiliki undang-undang untuk mengatur pengawasan, profesional kerahasiaan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang diisyaratkan.

f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA.

Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya

pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.

RUU tentang Penilai merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Kebijakan Pengelolaan Organisasi

Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan berperan sentral dalam mendukung Presiden menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) selaku Bendahara Umum Negara dan *Chief Operational Officer* (COO) yang memimpin kementerian. Dalam Kabinet Merah Putih, peran Kemenkeu semakin menguat karena berada langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. Dalam hal ini, Kemenkeu bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara merupakan bagian dari “*Strategic Diamond*” yang berperan melakukan koordinasi dengan K/L untuk memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terutama dalam mencapai target penerimaan negara serta dalam menetapkan kebijakan di sektor keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara, strategi dan kebijakan penerimaan negara, serta penguatan dan optimalisasi fungsi sektor keuangan dan kerja sama internasional. Di sisi lain, dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan nasional yang memerlukan respon yang cepat, tepat dan akurat, perlu dilakukan penguatan fungsi intelijen keuangan dalam rangka pendeteksian dan peringatan dini, untuk pencegahan, penangkalan, penanggulangan risiko keuangan negara yang didukung dengan integrasi dan interoperabilitas sistem keuangan negara.

Lebih lanjut, pada tahun 2025, Kemenkeu memiliki target organisasi yang cukup ambisius untuk memastikan ketersediaan APBN dalam mendukung program prioritas nasional. Kemenkeu perlu mengoptimalkan pendapatan negara secara berkeadilan. Dari sisi belanja negara, Kemenkeu juga perlu melakukan penajaman *allocative* dan *operational efficiency* agar belanja negara berkualitas.

Dalam memastikan agar Kemenkeu mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, Kemenkeu juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik melalui penguatan kelembagaan dan fungsi di bidang keuangan negara, strategi dan kebijakan penerimaan negara, penguatan dan optimalisasi fungsi sektor keuangan dan kerja sama internasional, serta penguatan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan intelijen keuangan. Di samping itu, Kemenkeu perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu Kemenkeu memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah.

a. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Kemenkeu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenkeu memiliki fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.
- 3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian.
- 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.
- 6) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.
- 7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

b. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan.

1) Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kemenkeu, saat ini telah ditetapkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkeu, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan (saat ini 3 orang), 13 (tiga belas) Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I serta 9 (sembilan) Staf Ahli. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga dapat dibantu oleh Staf Khusus yang berjumlah maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan kebutuhan.

Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I Kemenkeu terdiri atas:

- a) Sekretariat Jenderal (Setjen);
- b) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF);
- c) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- d) Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- e) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- f) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
- g) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- h) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

- i) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);
- j) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK);
- k) Inspektorat Jenderal (Itjen);
- l) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii); dan
- m) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Staf Ahli Kemenkeu terdiri atas:

- a) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
- b) Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
- c) Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
- d) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- e) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- g) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
- h) Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
- i) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Selain itu, Kemenkeu juga didukung oleh 1 (satu) Pusat, yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri, serta analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.

Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Setjen sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkeu. Sedangkan masing-masing Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing. Adapun Itjen mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemenkeu. Sedangkan BaTii dan BPPK sebagai unsur pendukung mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan (BaTii) serta melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan (BPPK).

Staf Ahli bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, kepatuhan pajak, pengawasan pajak, kebijakan penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak, pengeluaran negara, ekonomi makro dan keuangan internasional, jasa keuangan dan pasar modal, serta hukum dan hubungan kelembagaan. Selain itu Staf Ahli juga dapat membantu pimpinan unit eselon I/unit noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas Kemenkeu.

Staf Khusus Menteri Keuangan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kemenkeu.

2) Organisasi Yang Diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kemenkeu yang berbentuk Lembaga, Sekretariat, Unit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

a) Lembaga *National Single Window*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor dan logistik berbasis transparan, konsisten, efisien dan simpel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, telah dibentuk Lembaga *National Single Window* (LNSW) di lingkungan Kemenkeu. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) dan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, LNSW mendapat tugas untuk mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional. Dalam hal ini, Sistem Indonesia *National Single Window* ditetapkan sebagai salah satu sistem elektronik yang digunakan dalam layanan perizinan usaha, khususnya berkaitan dengan neraca komoditas. Untuk mendukung tugas tersebut dan dalam rangka upaya membangun sistem layanan logistik pemerintah yang terintegrasi, struktur organisasi LNSW dilakukan penataan organisasi kembali melalui PMK Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window*.

b) Sekretariat

(1) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 64 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif.

(2) Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan melalui PMK Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak yang bertugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, Pengadilan Pajak saat ini sedang dalam masa transisi pengalihan ke Mahkamah Agung (MA). Peralihan ini dilakukan untuk memastikan independensi Pengadilan Pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

(3) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 116 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komite Pengawas Perpajakan.

- (4) Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan memberikan dukungan administrasi kepada Pimpinan KNEKS dan anggota KNEKS dalam pelaksanaan tugas KNEKS.

c) Badan Layanan Umum (BLU)

- (1) Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan melalui PMK Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah bertugas untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Badan Pengelola Dana Perkebunan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan dana perkebunan.
- (3) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui PMK Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bertugas melakukan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- (4) Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditetapkan melalui PMK Nomor 35 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara bertugas melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset.
- (5) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang ditetapkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional bertugas melakukan pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.
- (6) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (7) Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan melalui PMK Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Keuangan Negara.

d) BUMN

- (1) PT Geo Dipa Energi (Persero) didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi, dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.
- (2) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.
- (3) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan berdasarkan penugasan pemerintah.
- (4) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), didirikan pada tanggal 10 Januari 2010, merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

e) Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kemenkeu merupakan kementerian yang memiliki karakteristik *holding type organization* dengan tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kemenkeu memiliki beberapa instansi vertikal, yang terdiri dari kantor wilayah dan kantor pelayanan, serta unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) DJP, terdiri dari: 34 Kantor Wilayah (Kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (1 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDP), 2 Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), 1 Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP).

- (2) DJBC, terdiri dari: 20 Kanwil, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan 9 UPT (6 Pangkalan Sarana Operasi (PSO), 3 Balai Laboratorium).
- (3) DJPb, terdiri dari: 34 Kanwil, 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) DJKN, terdiri dari: 17 Kanwil, 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (5) BPPK, terdiri dari: 11 UPT (11 Balai Diklat Keuangan).
- (6) SETJEN, terdiri dari: 5 UPT (5 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN)).

Instansi vertikal dan UPT pada prinsipnya merupakan ujung tombak Kemenkeu dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Keuangan 2025-2029

Transformasi kelembagaan melalui pembangunan kelembagaan yang tangguh dan *agile* serta proses bisnis yang adaptif dan kolaboratif, dan penguatan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas merupakan fondasi untuk mendukung peran Kemenkeu dalam mengawal pertumbuhan ekonomi. Transformasi kelembagaan dimaksud akan diimplementasikan melalui arah kebijakan kelembagaan sebagai berikut:

- 1) Transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis

Seiring dengan penguatan peran Kemenkeu sebagai *Strategic Diamond*, perlu dilakukan pula transformasi proses bisnis Kemenkeu yang akan difokuskan pada digitalisasi layanan internal dan implementasi *shared services* yang terintegrasi didukung Penguatan kapabilitas EA dan AI sebagai pendorong utama untuk mempercepat harmonisasi lintas domain, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkecil silo antarunit. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:

- a) Transformasi proses bisnis bidang fiskal dan sektor keuangan, antara lain melalui:
 - (1) Perubahan proses bisnis dan hubungan koordinasi antarunit pasca-reorganisasi unit baru yang menjalankan fungsi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
 - (2) Penguatan proses bisnis penyalarsan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - (3) Penguatan proses bisnis dan ekosistem profesi keuangan untuk meningkatkan perlindungan publik maupun konsumen.
 - (4) Penguatan ekosistem pelaporan keuangan terintegrasi melalui *Financial Report Single Window* (FRSW).
- b) Transformasi proses bisnis bidang penerimaan negara, antara lain melalui:
 - (1) Penguatan proses bisnis intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara (pajak karbon, pajak ekonomi digital, bea masuk/keluar, cukai, dan PNBPN)
 - (2) Perbaikan proses bisnis administrasi dan pengawasan penerimaan negara.
 - (3) Perbaikan proses bisnis keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa perpajakan.

- (4) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
 - (5) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara.
 - (6) Interoperabilitas data untuk meningkatkan penerimaan negara.
- c) Transformasi proses bisnis bidang pengeluaran negara, antara lain melalui:
- (1) Perbaikan proses bisnis penganggaran melalui penguatan *value for money, evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi penganggaran.
 - (2) Penguatan sinergi harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, perencanaan, dan pengukuran kinerja.
 - (3) Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penyaluran belanja TKD.
 - (4) Integrasi proses bisnis monitoring dan evaluasi belanja secara *end-to-end* dari level regulator hingga level eksekutor sebagai kerangka penguatan akuntabilitas fiskal.
- d) Transformasi proses bisnis bidang perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, antara lain melalui:
- (1) Penguatan tata kelola kelembagaan negara yang sejalan dengan prinsip penganggaran yang baik melalui *revisiting* pola pendanaan, proses bisnis, dan kelembagaan dalam UU Keuangan Negara.
 - (2) Penguatan tata kelola dan layanan di bidang pembiayaan dan risiko.
 - (3) Simplifikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban anggaran yang terintegrasi melalui interoperabilitas sistem informasi perbendaharaan dengan sistem lainnya.
 - (4) Simplifikasi, perbaikan tata kelola, dan penyesuaian substansi terkait pembentukan kerangka investasi pemerintah permanen dan nonpermanen.
 - (5) Penguatan sinergi pengelolaan kas dan utang dalam rangka pengembangan *modern treasury*.
- e) Transformasi proses bisnis bidang manajemen birokrasi, antara lain melalui:
- (1) Penyusunan *Grand Design Office Automation* dalam mengharmonisasikan layanan dukungan manajemen berbasis digital.
 - (2) Perluasan implementasi *shared service* (layanan bersama) Kemenkeu.
 - (3) Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi.
 - (4) Penguatan strategi komunikasi internal maupun eksternal.
 - (5) Penguatan proses bisnis legislasi (hukum) dan advokasi melalui simplifikasi regulasi dan digitalisasi layanan, serta perlindungan hukum bagi institusi dan pegawai.
 - (6) Penguatan implementasi Kemenkeu Corpu melalui pembelajaran terintegrasi yang berdampak tinggi, manajemen pengetahuan yang andal, dan penerapan teknologi digital yang tepat guna.
 - (7) Penyempurnaan infrastruktur dan tata kelola pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara.

- (8) Penguatan tata kelola PKN STAN dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - (9) Penyesuaian kebijakan organisasi (proses bisnis dan mekanisme kerja) dalam konteks pemindahan IKN.
 - (10) Transformasi sistem logistik nasional melalui SINSW.
 - (11) Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem Satu Data Kemenkeu untuk mendukung kebutuhan seluruh UE1, termasuk pembangunan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) mandiri Kementerian Keuangan.
- 2) Penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi jabatan fungsional untuk membangun ekosistem kerja yang lebih *agile*, responsif, dan fokus pada pelayanan publik

Kemenkeu terus bergerak maju dalam melaksanakan program penyederhanaan birokrasi yang berfokus pada simplifikasi proses bisnis, eselonisasi 2 level/*delayering*, dan optimalisasi jabatan fungsional. *Delayering* dalam konteks organisasi Kemenkeu dilakukan secara *prudent*, bertahap, mempertimbangkan berbagai risiko. *Delayering* tidak dilakukan untuk jabatan-jabatan yang dikecualikan dari *delayering* sesuai PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021, serta kriteria tambahan lainnya (rantai komando, menangani lebih dari 3 sub-sub rumpun, risiko keuangan negara, dll.). Sampai dengan 2024, progres *delayering* Kemenkeu sudah dilaksanakan di 9 unit eselon I yang meliputi Setjen, DJA, DJBC, DJKN, DJPK, DJPPR, Itjen, BKF, BPPK. Terdapat 72,32% jabatan yang telah disederhanakan (dari jabatan yang berpotensi di-*delayering*).

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dilakukan konsolidasi dan penyederhanaan terhadap 23 Jabatan Fungsional binaan Kemenkeu menjadi 4 Jabatan Fungsional, yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Konsolidasi JF tersebut dilakukan dengan pendekatan Kemenkeu selaku *Chief Financial Office* (CFO) dan *Chief Operational Officer* (COO).

Selanjutnya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung implementasi *delayering* dan optimalisasi JF, antara lain:

- a) Pelaksanaan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional (*delayering*) melalui evaluasi berkelanjutan serta penyempurnaan terhadap ekosistem dan infrastruktur *delayering* untuk memastikan agar *delayering* dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi.
- b) Melanjutkan implementasi *delayering* yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara bertahap, sebagai berikut:
 - (1) Tahap I: Unit eselon I yang tidak memiliki instansi vertikal.
 - (2) Tahap II: Unit eselon I yang memiliki instansi vertikal.
- c) Penguatan fungsi pengelolaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara untuk mendukung pengembangan kompetensi JF.
- d) Akselerasi implementasi Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara (JFKN) yang dimulai pada tahun 2024 melalui *piloting*

implementasi JFKN di internal Kemenkeu disertai evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilakukan perluasan implementasi di K/L/Pemda untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas strategis dalam rangka pencapaian target prioritas nasional.

- e) Penyempurnaan infrastruktur dan tata kelola JFKN untuk mendukung akselerasi implementasi JF Bidang Keuangan Negara dapat berjalan lebih optimal, melalui:
 - (1) Penyelesaian regulasi mengenai tunjangan jabatan bagi JFKN untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai yang ditugaskan sebagai JFKN.
 - (2) Pembentukan organisasi profesi JFKN sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga kode etik dan perilaku profesi, memberikan advokasi, serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik.
 - (3) Pedoman penyusunan kebutuhan JFKN sebagai acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menghitung dan mengusulkan kebutuhan JFKN yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, serta bagi Kemenkeu dalam menghitung dan mengusulkan kebutuhan JFKN dan JF binaan K/L lain yang digunakan di Kemenkeu.
 - (4) Penyusunan *tools* pendukung mekanisme kerja *delayering* dan fungsional, salah satunya modul tim.
- 3) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan antarmuka nasional

Arah kelembagaan terkait layanan publik akan menyasar pada otomasi dan integrasi layanan serta memperkuat pemanfaatan aset bersama di daerah sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, responsif, dan andal. Beberapa strategi yang dilakukan adalah:

 - a) Modernisasi layanan melalui kolaborasi layanan bersama Kemenkeu di wilayah dan harmonisasi dengan kebijakan Mall Pelayanan Publik, *single profile* pengguna layanan, serta Layanan Digital Kemenkeu (LDK) dalam genggaman untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat yang berbasis *user-centric*.
 - b) Penguatan sinergi antarkantor Kemenkeu maupun instansi lain di daerah melalui Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN), *Regional Chief Economist* (RCE), *joint program*, pembinaan keuangan negara, serta pelaksanaan tugas Kemenkeu lainnya di daerah.
 - c) Modernisasi penilaian kepuasan pengguna layanan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendengar dan menindaklanjuti keluhan dan masukan dari pengguna layanan.
 - d) Penguatan kapasitas SDM dan organisasi dalam penyediaan layanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan.
- 4) Penguatan Budaya Organisasi yang berintegritas dan kolaboratif lintas generasi

Seiring dengan tuntutan masyarakat dan komitmen Kemenkeu untuk menjaga reputasi dan kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenkeu diarahkan untuk mendapat predikat ZI

menuju WBK atau WBBM. Penguatan budaya integritas juga perlu terus diupayakan dengan didukung ekosistem pengawasan yang efektif.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan *gap generation*, menurunkan risiko fragmentasi internal, serta mempercepat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi selaras dengan dinamika yang ada, Kemenkeu akan mengembangkan budaya kerja kolaboratif lintas unit serta lintas generasi melalui pengembangan etika digital, budaya belajar, budaya inovasi, dan akselerasi model kepemimpinan berbasis teladan.

Adapun strategi terkait budaya organisasi sebagai berikut:

- a) Penguatan tata kelola organisasi berbasis ZI-WBK/WBBM, termasuk di dalamnya melalui penilaian kembali ZI terhadap unit kerja yang mengalami reorganisasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM.
 - b) Penguatan budaya integritas melalui implementasi pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi, serta pembangunan lingkungan kerja saling jaga, saling peduli, dan sadar risiko.
 - c) Penguatan budaya belajar Kemenkeu dengan mendorong inisiatif individu dan organisasi untuk terus melakukan pengembangan kompetensi menuju Kemenkeu sebagai *learning organization*.
 - d) Penguatan budaya kerja untuk mengatasi *gap generation* untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, kolaboratif, dan produktif.
 - e) Penguatan budaya inovasi melalui implementasi *sandbox*.
 - f) Penguatan budaya dan etika penggunaan AI untuk memastikan agar pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara bijaksana dengan tetap memerhatikan nilai-nilai etis dan aspek humanis.
 - g) Transformasi budaya kerja struktural ke fungsional.
- 5) Penguatan kelembagaan melalui penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika, Kemenkeu perlu melakukan penguatan kelembagaan melalui simplifikasi proses bisnis dan reorganisasi terhadap struktur saat ini, baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun Unit Pelaksana Teknis. Kemenkeu akan memperkuat penataan organisasinya paska PMK Nomor 124 Tahun 2024 melalui penyusunan ulang struktur berbasis peran strategis dalam transformasi ekonomi nasional serta pengelolaan mandat lintas sektor yang lebih efisien, melalui strategi:

- a) Penyempurnaan infrastruktur organisasi dan jabatan setelah ditetapkannya PMK Nomor 124 Tahun 2024 untuk memperkuat struktur kelembagaan mulai dari penyesuaian proses bisnis dan mekanisme kerja, infrastruktur jabatan yang meliputi informasi jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, rumpun jabatan, dan peta jabatan, serta pelimpahan wewenang dan korespondensi (penomoran, cap dinas, dan kop surat).

- b) Restrukturisasi dan penguatan fungsi pengawasan penerimaan negara untuk mendukung target penerimaan nasional.
 - (1) Penataan organisasi pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan melalui klasterisasi struktur dan fungsi menyesuaikan dengan proses bisnis *Coretax*, penguatan fungsi pengawasan yang lebih komprehensif (*tax supervision* dan *tax surveillance*), penguatan *internal control*. Selanjutnya penataan organisasi pada instansi vertikal dilakukan melalui penguatan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar) dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) dalam rangka mendukung pencapaian penerimaan untuk pengawasan Wajib Pajak strategis nasional dan regional.
 - (2) Penataan organisasi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan, simplifikasi tipologi kantor wilayah dan kantor pelayanan, serta penambahan kantor pelayanan di beberapa wilayah untuk memenuhi tuntutan dari *stakeholders* DJBC dengan mempertimbangkan profil kerawanan penyelundupan NPP dan barang ilegal, serta perkembangan potensi ekonomi daerah dalam rangka optimalisasi *border protection*.
- c) Penguatan kelembagaan untuk mendukung ekosistem penerimaan dan logistik nasional melalui transformasi proses bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan dan penguatan fungsi pengembangan sistem, pengelolaan basis data dan pengelolaan keamanan informasi, serta penguatan fungsi dukungan manajemen.
- d) Penguatan peran kantor Kemenkeu di wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kemenkeu di daerah serta memperkuat peran Kemenkeu sebagai pengelola fiskal negara di tingkat regional. Kantor Kemenkeu di wilayah dirancang untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik serta tantangan fiskal daerah. Struktur organisasi disesuaikan dengan mengedepankan sinergi antarunit vertikal Kemenkeu di daerah.
- e) Penguatan organisasi dan fungsi *treasury* melalui kajian menyeluruh terhadap fungsi perbendaharaan saat ini seiring dengan penguatan peran perbendaharaan ke depan selaku *regional economic surveillance* dan *regional financial advisor*.
- f) Transformasi kelembagaan BLU melalui penyesuaian struktur dan perluasan cakupan layanan dalam mendukung penguatan peran BLU dan SMV sebagai *arm's length* Kemenkeu untuk mendorong transformasi ekonomi nasional.

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan

Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, data kondisi SDM Kemenkeu sebagai berikut:

- 1) Total pegawai Kemenkeu adalah sejumlah 77.055 orang terdiri dari PNS sejumlah 76.978 orang dan PPPK sejumlah 77 orang.

Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 43.754 orang atau 56,78% (lima puluh enam koma tujuh delapan persen) dan terbanyak kedua adalah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 15.828 orang atau 20,54% (dua puluh koma lima puluh empat persen).

- 2) Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 23.920 orang atau 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) generasi Z, sebanyak 32.102 orang atau 41,66% (empat puluh satu koma enam enam persen) generasi Y, sebanyak 21.013 orang atau 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) generasi X, dan sebanyak 20 orang atau 0,03% (nol koma nol tiga persen) generasi *Baby Boomer*. Sehingga, jumlah pegawai generasi milenial (generasi Y dan Z) Kemenkeu mencapai 72,70% (tujuh puluh dua koma tujuh nol persen) dari total pegawai.
- 3) Saat ini komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan di Kemenkeu adalah 7:3 (tujuh berbanding tiga) atau sejumlah 52.391 orang pegawai laki-laki dan 24.664 pegawai perempuan. Dalam kategori golongan jabatan, komposisi pegawai Kemenkeu saat ini pegawai golongan II sebesar 36% (tiga puluh enam persen), diikuti golongan III sebesar 53% (lima puluh tiga persen), dan golongan IV sebesar 11% (sebelas persen).
- 4) Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sejumlah 31.635 orang atau 41,06% (empat puluh koma nol enam persen), diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sejumlah 31.041 orang atau 40,28% (empat puluh koma dua delapan persen), pendidikan S2 sejumlah 14.064 orang atau 18,25% (delapan belas koma dua lima persen) dan pendidikan S3 sejumlah 315 orang atau 0,41% (nol koma empat satu persen).

b. Proyeksi Kebutuhan SDM Kementerian Keuangan 2025-2029

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kemenkeu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memerhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, dan strategi serta kondisi *existing* SDM Kemenkeu. Dengan memerhatikan transformasi proses bisnis, digitalisasi, simplifikasi birokrasi, fungsionalisasi, dan penerapan sistem kerja baru, maka arah kebijakan SDM ke depan menerapkan bauran kebijakan *zero/positive growth* SDM untuk unit fungsi penerimaan negara dan *negative growth* SDM untuk unit fungsi lainnya. Proyeksi kebutuhan SDM ke depan disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Organisasi tidak berubah secara masif, delayering dan fungsionalisasi tetap berjalan.
- 2) Terdapat redistribusi pegawai dari unit yang diproyeksikan kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai, khususnya ke unit penerimaan.
- 3) Penataan komposisi SDM melalui penataan jumlah SDM antarunit eselon I, pengalihan pejabat struktural/pelaksana ke pejabat fungsional dan komposisi kompetensi SDM.
- 4) Penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS (umum dan sekolah kedinasan) dan PPPK dengan mengkaji kemungkinan penerapan rekrutmen ASN fleksibel.
- 5) Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar

nonpensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per 31 Desember 2024.

6) Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan perhitungan atas data *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun tahun 2025 – 2029 sejumlah 5.738 orang. Sementara itu, berdasarkan tren *turn over rate* selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 2.010 orang.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM tersebut di atas, serta proyeksi jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya dan jumlah pegawai yang diperkirakan masuk dari hasil rekrutmen tahun 2024, pada tahun 2025 – 2029 jumlah SDM Kemenkeu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% - 0,50% per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Pengelolaan SDM menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan dinamika global yang semakin cepat dan kebutuhan perubahan internal organisasi Kemenkeu. Menjawab tantangan-tantangan tersebut, Kemenkeu perlu melakukan transformasi pengelolaan SDM secara menyeluruh dengan arah kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu pada tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui:

1) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penataan Postur SDM Kemenkeu

Perencanaan SDM harus memerhatikan aspek produktifitas dan *well-being* pegawai serta mengoptimalkan pemanfaatan data analitik dan sistem teknologi informasi terkini sehingga dapat menghasilkan perencanaan SDM yang berkualitas. Postur dan komposisi SDM yang tepat juga perlu dijaga untuk memenuhi tuntutan perubahan dan tantangan pengelolaan keuangan negara di masa depan serta menunjang pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan strategi perencanaan SDM yang meliputi:

- a) Penyempurnaan kebijakan dan peningkatan akurasi perencanaan SDM;
- b) Penataan komposisi SDM, dan penguatan SDM bidang penerimaan;
- c) Penguatan dukungan pemenuhan kebutuhan SDM Keuangan Negara pada K/L/Pemda dari lulusan PKN STAN; dan
- d) Penguatan kualitas lulusan PKN STAN.

2) Redesain Sistem Rekrutmen dan *Onboarding* Pegawai Baru

Tuntutan peningkatan potensi pegawai/ASN terutama dalam rangka persiapan *talent* terbaik, kemampuan merespon kemajuan teknologi digital, sertaantisipasi pergeseran preferensi generasi Z dan milenial dalam memilih tempat kerja, perlu dilakukan terobosan untuk meredesain sistem rekrutmen dan

onboarding pegawai baru Kemenkeu yang diharapkan dapat menghasilkan pegawai baru yang berkapasitas tinggi dan berkarakter, serta memiliki *engagement* dengan organisasi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui:

- a) Penyempurnaan kebijakan, penguatan *employer branding*, dan simplifikasi/modernisasi sistem rekrutmen ASN; dan
- b) Penyempurnaan kebijakan, penguatan *buddy system* dan *mentorship*, serta digitalisasi Program *Onboarding*.

3) Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM Keuangan Negara

Dinamika tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks serta cepatnya perkembangan teknologi menuntut Kemenkeu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM-nya untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten, adaptif, berkarakter, dan berkinerja tinggi. Hal ini akan dicapai melalui strategi, antara lain:

- a) Pemetaan keahlian yang lebih sistematis dan proaktif terhadap kebutuhan kompetensi masa depan (*future competencies*).
- b) Penguatan serta redesain sistem pengukuran kompetensi.
- c) Pengembangan kompetensi SDM melalui pembelajaran yang lebih terintegrasi.

4) Penyempurnaan Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan

Tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang, termasuk tuntutan terhadap akuntabilitas publik dan pencapaian kinerja yang tinggi, mendorong penyempurnaan manajemen kinerja Kemenkeu yang difokuskan pada tiga hal utama agar selaras dengan arah strategis organisasi, antara lain:

- a) Penyempurnaan kebijakan manajemen kinerja yang bertujuan meningkatkan adaptabilitas proses bisnis manajemen kinerja terhadap dinamika organisasi dan mampu mengakomodasi karakteristik generasi pegawai yang semakin beragam.
- b) Pengembangan infrastruktur manajemen kinerja, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja.
- c) Peningkatan kompetensi pengelola kinerja dan komitmen pegawai untuk memberi kinerja terbaik melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penciptaan lingkungan kerja dan budaya yang positif.

5) Penyempurnaan Manajemen Karir dan Peningkatan Kualitas *Talent*

Kemenkeu terus membangun sistem manajemen karier yang lebih responsif dan berorientasi pada pengembangan potensi pegawai secara menyeluruh, mampu mendukung pertumbuhan karier yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi guna menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan berbagai strategi, antara lain:

- a) Penyempurnaan sistem manajemen karier dan talenta.
- b) Penguatan peran diaspora Kemenkeu yang bertugas di Kementerian/Lembaga lain maupun Pemerintah Daerah.
- c) Pelaksanaan mutasi antarunit eselon I sebagai bentuk mobilitas *talent* dan pengayaan pengalaman lintas bidang.
- d) Pemberdayaan jabatan fungsional untuk meningkatkan kesempatan karier dan spesialisasi fungsi pada pegawai.

6) Penguatan Program Persiapan Pensiun

Kemenkeu berkomitmen untuk mewujudkan layanan Pemberhentian dan Pensiun Pegawai yang tepat waktu dan tepat sasaran, dengan berbagai inisiatif, antara lain:

- a) Optimalisasi tata kelola manajemen pensiun, termasuk pengembangan sistem Klaim Pensiun Otomatis, yang memungkinkan proses pensiun berjalan lebih cepat, efisien, dan terotomasi.
- b) Perumusan program persiapan pensiun yang terstruktur, guna membekali pegawai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam menghadapi masa transisi tersebut secara lebih matang dan positif.

7) Penguatan Program Kesejahteraan dan *Well-being* Pegawai

Kemenkeu secara konsisten memperkuat program kesejahteraan dengan pendekatan yang adaptif dan menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik dan finansial, tetapi juga menyentuh dimensi mental, emosional, dan aktualisasi pegawai. Dengan memerhatikan kesejahteraan secara holistik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, *well-being* pegawai dan psikologis pegawai, yang berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan pegawai lebih tinggi, serta menciptakan pegawai yang berkarakter kuat, memiliki resilien yang baik, dan berkinerja lebih baik. Pendekatan ini diwujudkan melalui langkah konkret antara lain:

- a) Optimalisasi layanan psikologis internal, untuk memastikan kebutuhan dukungan emosional dan kesehatan mental pegawai dapat terfasilitasi secara proaktif dan tepat sasaran.
- b) Penyusunan *grand design* pembinaan mental pegawai, sebagai arah strategis dalam membangun ketahanan pribadi dan karakter pegawai yang selaras dengan nilai-nilai organisasi.
- c) Penyempurnaan kebijakan sistem penghargaan, guna memastikan bahwa apresiasi terhadap kontribusi pegawai diberikan secara adil, objektif, dan memotivasi pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

8) Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Dalam rangka memperkuat karakter kelembagaan yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Kemenkeu, penguatan pengelolaan budaya organisasi terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kinerja dan produktivitas pegawai Kemenkeu yang unggul dan mengedepankan semangat Kemenkeu Satu. Hal ini diimplementasikan melalui strategi berikut:

- a) Penanganan isu stigma antargenerasi, dengan mendorong sinergi antarkelompok usia melalui dialog terbuka, penguatan empati, dan kolaborasi lintas generasi.
- b) Penanganan isu *sandwich manager*, yakni pimpinan menengah yang berada di antara tekanan atasan dan kebutuhan tim, melalui pelatihan kepemimpinan dan penguatan dukungan struktural.
- c) Penanganan isu dinamika internal baik antarindividu maupun antarunit, dengan pendekatan resolusi konflik yang adil dan peningkatan komunikasi yang konstruktif.
- d) Penanganan isu relasi kultur-subkultur, untuk memastikan keselarasan visi-misi organisasi di tengah keberagaman unit

kerja dan karakter lokal.

9) Penguatan Kompetensi dan Mental Pemimpin

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, dibutuhkan pemimpin yang kompeten dan berkarakter. Oleh karena itu Kemenkeu secara konsisten melakukan penguatan kepemimpinan melalui beberapa strategi secara terstruktur. Pendekatan dalam mewujudkan penguatan kompetensi dan menumbuhkan mental pemimpin dilakukan melalui implementasi Kemenkeu *Leadership Development Program* (KLDP), Penguatan Karakter, dan Pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu (*Kemenkeu Leadership Academy*) sebagai wadah pembelajaran terpadu yang didesain untuk membentuk pemimpin yang berkarakter, proaktif, adaptif terhadap perubahan, tepercaya, andal dalam mengelola organisasi, mampu menjadi role model dalam menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dan mampu menginspirasi tim secara berkelanjutan.

10) Penyempurnaan Regulasi SDM yang Adaptif

Penyempurnaan kebijakan dan aturan di bidang sumber daya manusia menjadi agenda prioritas untuk memastikan tata kelola SDM yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan tantangan zaman. Penyempurnaan regulasi SDM misalnya terkait perencanaan, rekrutmen dan *onboarding*, penempatan lulusan PKN STAN, manajemen kompetensi, manajemen karier, penugasan pelaporan harta kekayaan, kode etik dan sistem informasi SDM.

11) Pengembangan Informasi SDM yang Terintegrasi, Berbasis Data Analitik, dan Berkelanjutan.

Kemenkeu melakukan langkah-langkah pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi pengelolaan sumber daya manusia untuk mewujudkan efisiensi biaya dan layanan, meningkatkan produktivitas, *well-being*, kepuasan, keterlibatan, dan hubungan antara pegawai dan organisasi. Hal ini dicapai melalui beberapa strategi, antara lain:

- a) Pengembangan dan integrasi Sistem Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemenkeu, yang dirancang untuk menjadi pusat kendali seluruh proses bisnis organisasi dan SDM secara *end-to-end*.
- b) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data serta optimalisasi dokumen SDM, dengan pendekatan berbasis analitik guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika organisasi.

3. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan

Mengacu pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah pengelolaan TIK Kemenkeu difokuskan pada pengarusutamaan TIK pada sektor ekonomi dengan tujuan mencapai Visi Indonesia Digital 2045 mencakup percepatan transformasi digital dan optimalisasi investasi TIK, antara lain melalui strategi:

- a. Pembangunan dan/atau penguatan sistem informasi Kemenkeu yang andal dan berkualitas untuk mendukung pengelolaan keuangan negara dan sistem informasi nasional melalui interoperabilitas antarsistem informasi Kemenkeu dan penyempurnaan sistem

informasi Kemenkeu dengan melaksanakan implementasi kecerdasan buatan, penguatan *Single Profile*, dan penyediaan *Customer Relationship Management* yang berkualitas.

Strategi ini diarahkan untuk memastikan tersedianya sistem informasi yang terintegrasi, andal, dan memiliki kualitas tinggi guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara serta berkontribusi terhadap pengembangan sistem informasi nasional yang terpadu.

- b. Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*) untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara antara lain melalui peningkatan kualitas data Kemenkeu dan pemanfaatan Portal Satu Data Kemenkeu.

Strategi ini bertujuan untuk mendorong integrasi data lintas unit eselon I/noneselon I dan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), serta meningkatkan kemampuan analisis data guna menghasilkan informasi yang berkualitas, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara.

- c. Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital mencakup antara lain area data, keamanan, riset dan inovasi digital, serta penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional.

Transformasi digital memerlukan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Oleh karena itu, strategi ini mencakup penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional serta penyempurnaan mekanisme pengawasan guna mempercepat implementasi transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- d. Pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi, yang ditandai dengan disusunnya Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu Tahun 2025-2029.

Strategi ini dilakukan dengan menyusun Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu tahun 2025 s.d. 2029 untuk mendapatkan gambaran pengembangan TIK Kemenkeu secara keseluruhan dan terintegrasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

- e. Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making*, *alert*, dan *early warning*.

Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan adanya penambahan proses bisnis baru pada organisasi Kementerian Keuangan terkait dengan *decision making*, *alert*, dan *early warning*.

- f. Penguatan dan modernisasi infrastruktur TIK antara lain melalui optimalisasi pusat data Kemenkeu, penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan keandalan sistem.

Untuk mendukung layanan digital yang efektif dan efisien, strategi ini berfokus pada penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan keandalan sistem untuk mendukung ketersediaan layanan digital yang andal dan inklusif.

- g. Penguatan keamanan informasi antara lain melalui penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan tata kelola dan

pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.

Seiring dengan meningkatnya risiko ancaman siber, strategi ini difokuskan pada penguatan sistem perlindungan informasi melalui penerapan standar keamanan informasi yang ketat, pengembangan kapabilitas pertahanan siber, penguatan pengelolaan keamanan informasi, serta peningkatan kesadaran dan budaya keamanan informasi di seluruh lingkungan Kemenkeu.

- h. Pengembangan *talent* digital antara lain melalui serangkaian program penguatan *digital literacy*, kompetensi, motivasi, dan kolaborasi SDM TIK.

Mempertimbangkan urgensi kebutuhan atas *talent* digital ASN dalam mendukung transformasi digital Kemenkeu, strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan jalur karier berbasis kompetensi, penguatan kompetensi digital yang terarah, penguatan literasi digital pegawai, penerapan *community of practice* peminatan kompetensi digital, serta penguatan *digital leadership* guna menciptakan SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. Kebijakan Penganggaran Kementerian Keuangan

Kebijakan penganggaran dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas belanja dan efisiensi belanja pemerintah. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan efisiensi dan disiplin anggaran secara berkelanjutan untuk mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, namun tetap *agile* dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yg dinamis. Kebijakan di bidang penganggaran diimplementasikan melalui strategi:

- a. Pengendalian Belanja Birokrasi

Belanja birokrasi merupakan belanja yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja *output* yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat/publik. Dalam penyusunan anggaran, belanja birokrasi harus dialokasikan sesuai dengan prinsip *value for money* serta sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan pengendalian belanja birokrasi pada Kemenkeu meliputi tidak terbatas pada pengendalian belanja bahan, belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja perjalanan dinas luar negeri, belanja paket *meeting/konsinyering*, dan honorarium tim.

- b. Skala Prioritas Pengalokasian Anggaran

Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kemenkeu menerapkan strategi prioritas pengalokasian anggaran dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan, dampak yang dihasilkan, serta kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Prioritas utama diberikan pada program dan kegiatan yang bersifat mendesak, menunjang pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan inovasi layanan. Kegiatan pendukung dilaksanakan apabila sumber daya dan pembiayaan mencukupi, tanpa mengganggu pencapaian target

utama. Dengan penerapan skala prioritas ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran, memberikan dampak optimal, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan.

c. Implementasi Standarisasi Biaya

Dalam rangka implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran serta menjaga keselarasan antarunit eselon I dalam penyusunan anggaran, salah satu kebijakan yang perlu diimplementasikan Kemenkeu yaitu standarisasi biaya. Standarisasi biaya dapat dijadikan acuan dalam rangka menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian suatu *output*. Kebijakan standarisasi biaya diterapkan melalui standarisasi struktur biaya, standarisasi biaya keluaran, dan standarisasi harga satuan.

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi					
	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman**	(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%
a.	Kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil					
	1) Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100
	2) Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional					
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB**	12,36%	11,71% - 13,72%	11,70% - 15,06%	12,12% - 16,52%	12,86% - 18,00%
a.	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal					
	1) Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB**	10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52%- 15,00%
	2) Rasio PNBPN (persen PDB)**	2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%
	3) Waktu penahanan (<i>dwell time</i>) di pelabuhan selama fase impor**	2,90- 2,85 hari	2,85- 2,79 hari	2,79- 2,72 hari	2,72- 2,66 hari	2,66- 2,60 hari
3.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat					

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara**		86	86,5	87	87,5	88
	a. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas						
	1)	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	85	85,5	86	86,5	87
	2)	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	100%	100%	100%	100%	100%
	3)	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%
	4)	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	100	100	100	100	100
	5)	Alokasi TKD untuk infrastruktur**	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
	6)	Persentase kinerja hibah daerah**	75%	75%	75%	75%	75%
4.	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik						
	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB**		39,43%	39,13% - 39,85%	39,08% - 39,62%	39,04% - 39,29%	38,55%- 38,64%
	a. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif						
	1)	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	3,26 (skala 4)	3,27 (skala 4)	3,28 (skala 4)	3,29 (skala 4)
	2)	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
	3)	Indeks pengelolaan aset	3,00 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,40 (skala 4)
	4)	Indeks efektivitas kebijakan investasi	100%	100%	100%	100%	100%
	5)	Imbal Hasil (Yield) SBN	7,0%	6,6% - 7,2%	6,3% - 7,3%	6,0% - 7,0%	6,0% - 7,0%
5	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.						
	1)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
	4)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100
	5)	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
	6)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5
	b. Pencapaian tugas khusus yang efektif						
	1)	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100

Keterangan:

*) Indikator dan Target di atas merupakan Indikator dan agregasi Target pada level Kemenkeu. Indikator dan Target pada masing-masing unit eselon I mempertimbangkan *baseline* tahun 2024 dan proyeksi target tahun-tahun berikutnya.

**) Mandat Perpres RPJMN 2025-2029

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemenkeu telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Seluruh pendanaan tersebut bersumber dari APBN, yang terdiri dari Rupiah Murni, PNPB, Hibah, dan BLU, serta tidak terdapat sumber pendanaan yang bersumber dari non-APBN. Adapun rincian indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program/Sumber Dana	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	59.153	90.032	67.975	70.490	71.861
	Rupiah Murni	59.153	90.032	67.975	70.490	71.861
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.369.115	1.997.068	2.364.123	2.460.552	2.508.766
	Rupiah Murni	2.369.115	1.997.068	2.364.123	2.460.552	2.508.766
3	Program Pengelolaan Belanja Negara	48.200	24.407	42.394	43.945	44.720
	Rupiah Murni	42.421	24.407	42.394	43.945	44.720
	Hibah	5.779	0	0	0	0
4	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	238.140	289.233	231.105	243.616	248.893
	Rupiah Murni	223.513	268.048	219.456	231.492	236.531
	PNBP	14.627	21.184	11.649	12.124	12.362
5	Program Dukungan Manajemen	50.480.781	49.615.260	51.941.102	52.978.009	53.497.985
	Rupiah Murni	40.098.613	39.215.369	41.560.308	42.597.161	43.116.994
	PNBP	2.361	23.324	8.137	8.184	8.325
	BLU	10.376.197	10.376.567	10.372.657	10.372.663	10.372.666
	Hibah	3.610	-	-	-	-
Total Pagu		53.195.389	52.016.000	54.646.699	55.796.612	56.372.226

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Direktif Presiden, Kemenkeu menyelenggarakan 59 RO Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp23,923 triliun. Adapun rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025 - 2029 per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi						
1	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	26	-	-	-	-
2	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	520	220	247	-	-
3	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	750	-	-	-	-
4	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	600	-	-	-	-
5	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	1.100	-	-	-	-
6	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)	-	1.000	-	-	-
7	Redesign Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBK pada Komoditas SDA (PN)	-	1.210	-	-	-
8	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)	-	1.210	-	-	-
9	Analisis Kriteria Rincian Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kebutuhan Pokok yang Dikenakan PPN (PN)	-	555	-	-	-
10	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan (PN)	-	499	-	-	-
11	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PN)	-	498	-	-	-
12	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (PN)	-	493	-	-	-
13	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	367	-	-	-	-
14	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	-	3.534	2.326	2.421	2.469
15	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional (PN)	-	481	-	-	-
16	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD (PN)	1.200	1.600	1.200	1.249	1.273
Total		4.563	11.301	3.773	3.670	3.742

Tabel 4.4
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana <i>Output</i>	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Penerimaan Negara						
1	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	880	-	-	-	-
2	Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) (PN)	-	640	-	-	-
3	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis Input <i>Output</i> (PN)	-	800	-	-	-
4	Promosi Ekspor UMKM (PN)	373	175	373	389	396
5	Joint Task Force On Narcotics (PN)	1.628	812	1.628	1.695	1.728
6	Sinergi Patroli Laut Bersama (PN)	1.142	541	1.142	1.188	1.212
Total		4.023	2.968	3.143	3.272	3.336

Tabel 4.5
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Belanja Negara
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Belanja Negara						
1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	1.778	1.710	1.778	1.851	1.887
2	Bimtek BUMDes (PN)	2.387	1.139	2.387	2.484	2.533
3	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	550	-	-	-	-
4	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	1.018	-	-	-	-
5	Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)	-	463	687	756	791
6	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	327	157	327	341	347
Total		6.061	3.469	5.179	5.431	5.557

Tabel 4.6
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko						
1	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	1.172	-	-	-	-
2	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)	-	1.056	484	504	514
3	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	1.509	812	372	387	395
4	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	706	-	-	-	-
5	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)	-	60.994	27.951	29.091	29.661
6	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	3.196	-	-	-	-

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
7	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	400	400	292	337	349
8	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)	1.226	600	896	1.032	1.068
9	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)	888	257	664	765	792
10	Pembangunan Sistem Pemesanan dan Pengembangan Desain Integrasi Channel Social Fund Linked Sukuk (PN)	1.098	363	1.276	1.469	1.520
11	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	207	73	151	174	180
12	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	260	147	209	241	250
13	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)	395	142	296	340	352
14	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	79	71	79	82	84
15	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	1.455	348	1.455	1.514	1.544
Total		12.591	65.265	34.126	35.936	36.708

Tabel 4.7
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Dukungan Manajemen
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukuman Manajemen						
1	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)	2.577	3.579	3.248	3.362	3.427
2	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)	4.169	4.799	4.355	4.507	4.596
3	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	887	888	805	834	850
4	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)	-	2.989	2.712	2.807	2.862
5	Core Tax System (PN)	201.743	-	-	-	-
6	Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Tax Crime Handling System) (PN)	1.200	665	-	-	-
7	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476
8	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	31.714	31.702	31.714	31.714	31.714
9	Sistem INSW Generasi II (PN)	2.500	2.745	2.500	2.500	2.549
10	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	19	-	-	-	-
11	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	5.071	73.005	73.005	73.005	73.005
12	Beasiswa Afirmasi (PN)	8.446	324.236	324.236	324.236	324.236
13	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Riset (PN)	-	111.027	111.027	111.027	111.027

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
14	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)	-	3.233	-	-	-
15	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	600	-	-	-	-
16	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	2.326	-	-	-	-
Total		4.498.728	4.796.344	4.791.080	4.791.468	4.791.743

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Visi dan misi Kemenkeu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun misi Kemenkeu 1) Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif sehingga mampu menggerakkan transformasi ekonomi, 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat, 4) Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik, 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Penyusunan Renstra Kemenkeu tidak terlepas dari proses pengendalian dan evaluasi pada tahap penyusunan maupun pada tahap pelaksanaannya. Penelaahan substansi dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan RPJMN, serta dilaksanakan pula forum penyesuaian Renstra yang menjadi wadah penyalarsan dan koreksi Rancangan Renstra Kemenkeu, sebelum ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian berdasarkan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan proses evaluasi paruh waktu.

Dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kemenkeu dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.

LAMPIRAN

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN KEUANGAN													
Sasaran Strategis	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang produktif dan adaptif Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Pajak Kueria Kabupaten Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	100	100	100	100	100						
			3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)						
Sasaran Strategis	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNPB yang maksimal Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Rasio PNPB (persen PDB) Waktu penanganan (dwell time) di Pelabuhan selama fase impor	10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52% - 15,00%						
			2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%						
			2,90-2,85 hari	2,85-2,79 hari	2,79-2,72 hari	2,72-2,66 hari	2,66-2,60 hari						
Sasaran Strategis	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD Alokasi TKD untuk Infrastruktur Persentase Kinerja Hibah Daerah	85	85,5	86	86,5	87						
			100%	100%	100%	100%	100%						
			6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	-						
Sasaran Strategis	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembayaran dan Risiko yang Akuntabel, Prudent, dan Inovatif Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN Indeks Pengelolaan Aset Indeks efektivitas kebijakan investasi Imbal Hasil (Yield) SBN	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun						
			75%	75%	75%	75%	75%						
Sasaran Strategis	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													DJPPR, BPPK, BaTTL, LNSW
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara		100	100	100	100	100						Seluruh UE 1
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPPR, BaTTL, LNSW
	Nilai evaluasi organisasi		100	100	100	100	100						Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, BaTTL, LNSW
	Indeks Integritas		100	100	100	100	100						Setjen, IJen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, LNSW
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		100	100	100	100	100						Setjen, IJen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, LNSW
	Pencapaian tugas khusus yang efektif												
	Indeks efektivitas kinerja SMV		100	100	100	100	100						Setjen, DJPb, DJKN, DJPPR, BPPK
Program	CE Kebijakan Fiskal							59,152.64	90,032.33	67,974.99	70,489.96	71,861.37	
Sasaran Program	1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, produktif dan adaptif												
Indikator Kinerja Program	Rasio Defisit terhadap PDB	(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	100	100	100	100	100	100						
	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)						
	Akurasi Proyeksi Realisasi APBN	3,25 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)						
	Indeks Kinerja Reformasi Hukum		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal		86,6	86,6	86,6	86,6	86,6						
	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal		100	100	100	100	100						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi		100	100	100	100	100						
	Indeks Kinerja Kebijakan Stabilitas Sektor Keuangan		100	100	100	100	100						
Sasaran Program	2. Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif												
Indikator Kinerja Program	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJSPSK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJIBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan	4762 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional							782.34	-	-	-	-	DJSEF
Sasaran Kegiatan	Diplomasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal												
Indikator Kinerja Kegiatan Output	Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		95,5%	-	-	-	-						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							782.34	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	15 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	480.37	-	-	-	-	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional dalam Sektor Keuangan	4 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	301.97	-	-	-	-	
Kegiatan	4763 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							102.56	-	-	-	-	DJSEF
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan Output	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	-	-	-	-	-						
	Peraturan lainnya							73.27	-	-	-	-	
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	5 Rancangan Peraturan		-	-	-	-	73.27	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.00	-	-	-	-	
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	1 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	
Kegiatan	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							26.29	-	-	-	-	
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	1 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	26.29	-	-	-	-	DJSEF
Kegiatan	4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							553.84	-	-	-	-	DJSEF

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Penjaminan Pemerintah dalam rangka Mengurangi Risiko Fiskal atas Pembiayaan Pembangunan Nasional (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	373.53	273.11	314.42	325.49	
Kegiatan	7790 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi													
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas													
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85	85						
Output	Peraturan Lainnya													
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan		5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	1,592.10	1,481.38	1,592.10	1,657.06	1,689.54	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	502.42	-	-	-	-	
	Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Perkembangan AI (Transformasi Digital) dan Dampaknya terhadap Struktur Tenaga Kerja Indonesia (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	
	Transformasi Struktur Ekonomi: Potensi dan Tantangan Penguatan Kontribusi Sektor Tersier terhadap Pertumbuhan PDB (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	990.00	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								2,450.00	3,975.49	-	-	-	
	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	
	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Ethil Alkohol (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	
	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	
	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	
	Redesign Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBEP pada Komoditas SDA (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	
	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	
	Analisis Kriteria Rincian Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kebutuhan Pokok yang Dikenakan PPN (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	555.49	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output	7793 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi												
	Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas							1,566.67	8,286.57	3,893.00	4,051.84	4,131.25	DJSPSK
	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,566.67	7,105.15	3,526.34	3,670.21	3,742.15	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	498.62	-	-	-	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	498.05	-	-	-	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	493.32	-	-	-	
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	366.67	-	-	-	-	
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	3,534.04	2,326.34	2,421.25	2,468.71	
	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	481.12	-	-	-	
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,200.00	1,600.00	1,200.00	1,248.96	1,273.44	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1,181.42	366.67	381.62	389.10	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	203.30	122.22	127.21	129.70	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	506.17	122.22	127.21	129.70	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	471.95	122.22	127.21	129.70	
	4768 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional							16,182.12	15,850.91	16,182.12	16,842.35	17,172.46	DJBC
	Diplomasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal												
	Indeks efektivitas penyelenggaraan kegiatan pertemuan internasional		3,2	3,1	3,1	3,1	3,1						
	Tingkat keberhasilan mengawal kepentingan nasional terkait sistem klasifikasi barang dalam sidang internasional		72%	73%	73%	73%	73%						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3,359.14	3,151.50	3,359.14	3,496.19	3,564.71	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan		1,839.57	1,969.78	2,050.15	2,090.33		
	Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		300.00	1,389.35	1,446.04	1,474.38		
	Rekomendasi Kebijakan Nilai Pabean Hasil Perundingan Internasional (PU)		-	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,011.93	-	-	-		
	Forum							3 Forum	3,192.77	3,197.77	3,328.24	3,393.48		
	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)		3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3,197.77	3,192.77	3,197.77	3,328.24	3,393.48		
	Kerja Sama								9,506.64	9,625.21	10,017.91	10,214.27		
	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	7,051.23	6,989.42	7,051.23	7,338.92	7,482.76		
	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2,573.98	2,517.23	2,573.98	2,679.00	2,731.51		
	7796 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional								8,813.34	9151.43	8,813.34	9,172.92	DJSPSK	
	Diplomasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan sektor keuangan													
	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerjasama ekonomi dan keuangan internasional		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%							
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								8,813.34	9151.43	8,813.34	9,172.92	9,352.71	
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	4,252.93	2,357.72	4,252.93	4,426.44	4,513.20		
Indikator Kinerja Kegiatan Output	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		5 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	3,893.01	3,518.01	3,304.50	3,463.33	3,542.75		
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	588.52	588.52	588.52	588.52		
	Rekomendasi Posisi Runding Indonesia dalam rangka Perjanjian Perdagangan Internasional		1	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	140.74	975.69	140.74	146.48	149.35		
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	273.50	963.87	273.50	284.66	290.24		
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	253.16	747.61	253.16	263.49	268.65		
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan													
Kegiatan	4769 Komunikasi dan Edukasi							221.66	201.40	221.66	230.71	235.23	DJBC	
Sasaran Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi Hasil Kerja Sama dan Perundingan yang Optimal													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis kepada stakeholder DJBC		80	81	81	81	81							
Output	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							221.66	201.40	221.66	230.71	235.23		
	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai		4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	221.66	201.40	221.66	230.71	235.23		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output	7792 Komunikasi dan Edukasi Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan APBN Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan International Forum National Forum International Tax Forum Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional Forum Nasional Optimalisasi PNB Forum dan Technical Assistance in Fiscal Formulation Forum and Technical Assistance for Regional Economy	80		80	80	80							DJSEF
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,630.29	3,075.84	3,630.28	3,778.37	3,852.46	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,075.46	1,652.55	2,075.46	2,160.14	2,202.47	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00	-	1.00	1.04	1.06	
			1 Kegiatan	-	-	-	-	550.00	212.49	550.00	572.44	583.66	
			1 Kegiatan	-	-	-	-	671.99	-	-	-	-	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00	390.00	1.00	1.04	1.06	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	330.84	410.00	330.83	344.30	351.09	
			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	410.80	671.99	699.41	713.11	
								2,911.12	12,915.74	4,438.57	4,619.66	4,710.21	DJSPSK
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output	7795 Komunikasi dan Edukasi Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan Konferensi dan Event Forum Internasional Keuangan Syariah Forum Internasional Pensiun, Asuransi dan Aktuaria Forum Internasional Literasi Keuangan Penyelenggaraan AARG Inspection Workshop and FSSG Workshop 2026 Komunikasi Publik Komite dan Sekretariat	100		100	100	100	100						
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,911.12	2,138.43	2,911.12	3,029.89	3,089.28	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,743.53	450.60	1,743.53	1,814.67	1,850.23	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	481.24	334.44	481.24	500.87	510.69	
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	686.35	427.91	686.35	714.35	728.35	
			-	1 Kegiatan	-	-	-	-	925.48	-	-	-	
			-	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	-	10,777.30	1,527.45	1,589.77	1,620.93	
			-					-	10,777.30	1,527.45	1,589.77	1,620.93	
								470.04	510.01	470.04	489.21	498.80	DJBC
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Output	4770 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas Indeks efektivitas insentif fiskal Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan 4774 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru Pelayanan Publik Lainnya Penjajaman Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PT)	85		85	85	85	85						DJPPR
			2	2	2	2	2	470.04	510.01	470.04	489.21	498.80	
			Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	470.04	510.01	470.04	489.21	498.80	
								375.36	-	-	-	-	
			100	-	-	-	-						
								375.36	-	-	-	-	
			3 Dokumen	-	-	-	-	375.36	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Sasaran Kegiatan	7791 Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi												
	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas							5,888.66	9,337.50	5,888.65	6,128.91	6,249.04	DJSEF
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat		85%	85%	85%	85%	85%						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							5,888.655	9,337.50	5,888.65	6,128.91	6,249.04	
Output	Strategi di bidang Perpajakan		10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1,501.01	1,620.13	1,501.00	1,562.25	1,592.87	
	Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	2,590.90	1,501.90	2,590.90	2,696.61	2,749.46	
	Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	101.00	1,500.00	101.00	105.12	107.18	
	Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.00	1,465.61	1.00	1.04	1.06	
	Strategi Stabilitas Ekonomi		3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1,693.75	1,784.24	1,693.75	1,762.85	1,797.40	
	Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.00	1,465.62	1.00	1.04	1.06	
Kegiatan	7794 Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi							5,118.78	18419.08	15,338.94	15,964.77	16,277.71	DJSPSK
Sasaran Kegiatan	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan		100	100	100	100	100						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	770.82	1,139.69	770.82	802.27	818.00	
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Dana Penstun, Asuransi dan Aktuaria		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	472.83	1,123.83	472.83	492.13	501.77	
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1,045.86	1,092.62	1,045.86	1,088.54	1,109.87	
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	1,450.41	395.88	1,450.41	1,509.59	1,539.17	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1,378.85	319.08	1,378.85	1,435.11	1,463.27	
	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	5,239.35	2,675.22	2,784.37	2,838.95	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perizinan Profesi Keuangan		-	150 Rekomendasi Keputusan	150 Rekomendasi Keputusan	150 Rekomendasi Keputusan	150 Rekomendasi Keputusan	-	226.20	310.21	322.86	329.19	
	Peraturan lainnya							-	7.10	15.91	16.56	16.88	
	Regulasi Profesi Keuangan		-	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	-	7.10	15.91	16.56	16.88	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							-	8.875.33	7.218.82	7.513.35	7.660.61	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan		-	227 Laporan	227 Laporan	227 Laporan	227 Laporan	-	8.875.33	7.218.82	7.513.35	7.660.61	
Program	CC Pengelolaan Penerimaan Negara							2.369,115.49	1.997,068.48	2.364,123.07	2.460,552.37	2.508,766.21	
Sasaran Program	1. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan												
	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan		10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52% - 13,00%						DJP, DJBC
	Rasio PNPB terhadap PDB		2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%						DJA
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						DJP
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						DJBC
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJA)		100%	100%	100%	100%	100%						DJA
Sasaran Program	2. Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif												
	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan		78%	79%	79%	79%	79%						DJBC
	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik - (DJBC)		88	89	89	89	89						DJBC
	Tingkat efektivitas pengawasan PNPB (DJA)		85%	85%	86%	86%	86%						DJA
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (DJP)		86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%						DJP
	Waktu penanganan (dwell time) di Pelabuhan selama fase impor		2,90-2,85 hari	2,85-2,79 hari	2,79-2,72 hari	2,72-2,66 hari	2,66-2,60 hari						LNSW
Kegiatan	4786 Perumusan Kebijakan Administratif												
	Sasaran Kegiatan							2.427.22	3.036.57	2.427.22	2.526.25	2.575.76	DJA
Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien												
	Indeks penyelesaian rekomendasi harmonisasi peraturan dan kebijakan penganggaran		95	95	95	95	95						
Output	Indeks kualitas rumusan kebijakan penganggaran dan PNPB		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						
	Peraturan Pemerintah							654.37	974.17	654.37	681.07	694.42	
	Peraturan Pemerintah terkait Bidang PNPB		6 PP	5 PP	5 PP	5 PP	5 PP	654.37	974.17	654.37	681.07	694.42	
	Peraturan Menteri							374.30	440.84	374.30	389.57	397.20	
	Peraturan Menteri terkait Bidang PNPB		7 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	374.30	440.84	374.30	389.57	397.20	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							208.19	206.88	208.19	216.69	220.93	

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak		95%	-	-	-	-						
Output	Indeks kinerja reformasi hukum		-	95,5	95,5	95,5	95,5						
	Peraturan lainnya							6,393.93	1,490.36	6,293.92	6,546.63	6,672.96	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	200.00	36.50	200.00	208.16	212.23	
	Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Segitiga Perpajakan Internasional		3 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	600.16	36.50	600.16	624.65	636.89	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan		1 peraturan	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional		8 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	706.25	73.00	706.25	735.06	749.47	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PBB		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	487.52	249.71	487.51	507.40	517.35	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PPN dan PTL		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	600.00	110.37	600.00	624.48	636.71	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	1,800.00	328.50	1,800.00	1,873.44	1,910.15	
	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPS		2 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	400.00	73.00	400.00	416.32	424.48	
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang PPh		7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	1,400.00	509.79	1,400.00	1,457.12	1,485.68	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		-	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	-	73.00	100.00	100.00	100.00	
	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum		5 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	42,471.36	17,621.05	38,560.81	40,134.08	40,920.70	
	Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan		2 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	3,110.56	-	-	-	-	
	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan		3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	752.73	454.00	752.73	783.45	798.80	
	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,262.30	1,429.92	2,262.30	2,354.60	2,400.75	
	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	519.20	413.69	519.20	540.38	550.97	
	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	349.42	285.05	349.42	363.67	370.80	
	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	782.89	334.18	782.89	814.83	830.80	
	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,860.24	1,695.98	1,860.24	1,936.13	1,974.08	
	Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan		11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	528.56	207.19	528.56	550.13	560.91	
	Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan		4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	1,839.24	787.17	1,839.24	1,914.28	1,951.80	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian di Bidang Keberatan dan Banding		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan		1,661.25	1,661.25	1,729.03	1,762.92	
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggalan Potensi Wajib Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Yang Andal		10 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan		4,366.46	4,366.46	4,544.61	4,633.69	
	Kajian terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan		567.69	567.69	590.85	602.43	
	Kajian terkait Penyusunan/Penyempurnaan Proses Bisnis		69 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan		20,513.70	17,513.70	18,350.66	18,769.13	
	Kebijakan dan Strategi Pngamanan Penerimaan Pajak		7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan		1,844.75	1,844.75	1,920.01	1,957.64	
	Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		552.26	552.26	574.79	586.06	
	Kebijakan di bidang Pendataan dan Pemetaan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kebijakan di Bidang Pengawasan Perpajakan		-	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kebijakan di Bidang Penilaian Perpajakan		-	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PU)		1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-		800.00	-	-	-	
	Peraturan Menteri								644.11	1,200.00	1,248.96	1,273.44	
	Peraturan Menteri terkait Bidang PPh		5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen		563.16	1,000.00	1,040.80	1,061.20	
	Regulasi Interkoneksi Data Pendukung Penanganan Tindak Pidana di Bidang Penerimaan Negara		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen		80.95	200.00	208.16	212.24	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								800.00	-	-	-	
	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PN)		-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-		-	800.00	-	-	
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan	Peraturan Pemerintah								133.00	320.85	333.94	340.48	
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh		-	1 PP	1 PP	1 PP	1 PP		133.00	320.85	333.94	340.48	
	6611 Perumusan Kebijakan Administratif								7,355.52	4,277.56	6,052.86	6,388.99	LNSW
	Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien												
	Indeks Kajian integrasi proses bisnis		4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)						
	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program		85%	85%	85%	85%	85%						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan								2,867.14	2,767.14	2,880.03	2,936.48	
	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor		6 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-		-	-	-	-	
									920.05				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor	2 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	-	423.04	-	-	-	-	-
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW	2 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2,767.14	2,867.14	2,767.14	2,880.03	2,936.48		
	Pengelolaan Data SINSW	4 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							560.43	560.43	560.43	560.43	560.43	
	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor dan Logistik							-	-	560.43	560.43	560.43	
Indikator Kinerja Kegiatan	Perjanjian	6 perjanjian	1 perjanjian	6 perjanjian	6 perjanjian	6 perjanjian	6 perjanjian	2,725.30	850.00	2,725.30	2,836.49	2,892.08	
	Perjanjian kerjasama di bidang Single Window							2,725.30	850.00	2,725.30	2,836.49	2,892.08	
	4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							589,605.38	573,829.06	589,605.38	613,661.28	625,689.04	
	1. Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara												
	Indeks kepuasan pengguna jasa	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	80%	80.5%	80.5%	80.5%			
Sasaran Kegiatan	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanaan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%							
	Tingkat efektivitas dukungan UMMK berorientasi ekspor												
	2. Komunikasi dan Edukasi yang efektif												
	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanaan dan cukai	80 (skala 100)	80.5 (skala 100)	80.5 (skala 100)	80.5 (skala 100)	80.5 (skala 100)							
	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	78 (skala 100)	78.5 (skala 100)	78.5 (skala 100)	78.5 (skala 100)	78.5 (skala 100)							
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	698.80	664.89	698.80	727.31	741.56		
Indikator Kinerja Kegiatan	Pengembangan National Logistic Ecosystem							698.80	664.89	698.80	727.31	741.56	
	Sosialisasi dan Diseminasi	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	13,635.81	8,815.73	13,635.81	14,192.15	14,470.32		
	Sosialisasi dan Pemulihan (Eksternal)							8,815.73	13,635.81	14,192.15	14,470.32		
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	105,484.47	95,780.65	105,484.47	109,788.23	111,940.08		
	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	99,276.17	90,946.98	99,276.17	103,326.64	105,351.84		
	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang							4,833.67	6,208.30	6,208.30	6,461.59	6,588.24	
	Komunikasi Publik	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	4,134.27	3,924.46	4,134.27	4,302.95	4,387.28		
	Iklan Layanan Masyarakat												
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	8,668.27	5,317.27	8,668.27	9,021.94	9,198.77		
	Asistensi Di Bidang Cukai	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	130.07	258.27	130.07	135.38	138.03		
	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	125.00	115.23	125.00	130.10	132.65		
	Asistensi Di Bidang Telkris Kepabeanaan	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	118.05	172.77	118.05	122.86	125.27		
	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	532.36	472.23	532.36	554.08	564.94		
	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	94.86	176.29	94.86	98.73	100.67		
	Pembinaan Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	31.3 orang	2,080.47	1,862.98	2,080.47	2,165.35	2,207.79		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	Internalisasi Peraturan/Kebijakan Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai		90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang								
	Asistensi di bidang pengawasan kepabeanaan dan cukai		11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja		71.44	2,828.59	2,944.00	2,944.00	3,001.70		
	Asistensi di bidang audit kepabeanaan dan cukai		10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja		1,786.73	2,307.09	2,401.22	2,448.28			
	Asistensi Di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekusor		10 unit kerja	-	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja		401.33	286.79	298.49	298.49	304.34		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								165.00		165.00	171.73	175.10		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai		19 35	19 35	19 35	19 35	rekomendasi rekomendasi		3,215.50	12,300.60	3,215.50	3,346.69	3,412.29		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan		60	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi		1,010.42	10,320.25	1,010.42	1,051.64	1,072.25		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanaan		27	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi		380.76	564.20	623.22	648.65	661.36		
	Sertifikasi ABO/MITA		10	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi		716.18	683.12	924.51	962.23	981.09		
	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanaan untuk Ibu Kota Negara (IKN)		1	1	-	-	-		421.07	563.31	421.07	438.25	446.84		
	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)		1	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi	rekomendasi		242.46	-	-	-	-		
	Online dan Terintegrasi (PU)		1	rekomendasi					236.28	169.73	236.28	245.92	250.74		
	Pelayanan Publik kepada UMKM			-	-	-	-		208.33	-	-	-	-		
	Benda Meteral dan Cukai		-	161 UMKM	-	-	-		-	753.54	-	-	-	-	
	Pita Cukai		182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar		453.394.79	446.096.46	453.394.79	471.893.29	481.142.40		
Pelayanan Publik kepada UMKM		50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM		373.48	175.46	373.48	388.72	396.34			
Promosi Ekspor UMKM (PN)								373.48	175.46	373.48	388.72	396.34			
Kegiatan															
Sasaran Kegiatan	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Pemerintahan Negara								133,441.32	90,565.37	133,441.30	138,885.72	141,607.88	DJP	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100	-	-	-	-	-								
	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100	-	-	-	-	-								
	Persentase pemenuhan indeks kepuasan pelayanan DJP	-	100%	100%	100%	100%	100%								
	Persentase pemenuhan indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	100%	100%	100%	100%	100%								
Output	Koordinasi														
	Koordinasi terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perajaikan	-	45 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan		11,344.15	4,011.88	11,344.15	11,806.99	12,038.42		
	Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perajaikan Internasional	4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan		5,464.13	2,613.13	5,464.13	5,687.07	5,798.54		
	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perapaikan Internasional	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan		1,428.52	510.29	1,428.52	1,486.80	1,515.95		
	Induksi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional	5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan		3,874.93	636.89	3,874.93	4,033.02	4,112.07		
	Kerja sama								576.57	251.58	576.57	600.10	611.86		
	Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya	10	10	10	10	10	10		646.06	546.36	646.06	672.42	685.60		
	Konferensi dan Event														
Kemitraan Perapaikan Internasional	6 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan		3,978.82	1,226.87	3,978.82	4,141.16	4,222.32		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Data dan Informasi Publik Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1,149.18	846.33	1,149.18	1,196.07	1,219.51	
	Komunikasi Publik Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan		23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	116,323.10	83,933.93	116,323.09	121,069.08	123,442.03	
	Layanan dan Konsultasi Perpajakan		1.073 kegiatan	772 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	2,448.91	2,530.60	2,448.90	2,548.82	2,598.78	
	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan		14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	33,119.29	16,033.68	33,119.29	34,470.56	35,146.18	
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan		701.039 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	801.91	1,431.90	801.91	834.63	850.99	
	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	71,359.23	58,104.11	67,359.23	70,270.69	71,726.39	
	Pembinaan/Edukasi Publik		207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	315.48	93.87	315.48	328.35	334.79	
	Kehumasan Eksternal DJP		30 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	566.01	475.18	566.01	589.10	600.65	
	Publikasi online		17 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	2,609.67	1,283.92	2,609.67	2,716.15	2,769.38	
	Publikasi media cetak		12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	544.02	79.21	544.02	566.21	577.31	
	Publikasi iklan dan Media Placement		12 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	853.34	491.39	853.34	888.15	905.56	
	Redesain dan peningkatan interkoneksi laman edukasi perpajakan		1 media	1 media	1 media	1 media	1 media	3,034.49	1,880.65	3,034.49	3,158.30	3,220.20	
	Pembuatan Aplikasi Mitra Inklusi Berbasis Website		-	1 media	1 media	1 media	1 media	670.75	306.42	670.75	698.12	711.80	
	Pengukuran Indeks Literasi Perpajakan Nasional		-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Sentralisasi Layanan Perpajakan		-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Pelaksanaan Inklusi pada pendididkan jenjang menengah secara bertahap di seluruh Indonesia yang berkelanjutan		-	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	-	123.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
									300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Kegiatan	6206 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi							908.71	651.27	908.71	945.78	964.32	DJA
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	- Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100	100	100	100						
Output	Sosialisasi dan Diseminasi Diseminasi/Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) [PU]		650 orang	400 orang	650 orang	650 orang	650 orang	908.71	651.27	908.71	945.78	964.32	
								908.71	651.27	908.71	945.78	964.32	
Kegiatan	6610 Pelayanan, komunikasi, dan edukasi							720.60	770.95	720.60	750.00	764.70	LNSW
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Informasi Publik		3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)						
Output	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Teknis LNSW		1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	720.60	770.95	720.60	750.00	764.70	
								720.60	770.95	720.60	750.00	764.70	
Kegiatan	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara							210,844.23	157,984.83	210,844.22	219,446.67	223,747.82	DJP
Sasaran Kegiatan	Penggalan Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi (indikator pada RPOMN)		90%	90%	90%	90%	90%						
Output	Data dan Informasi Publik Data dan Informasi Perpajakan Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan		2 data 500 dokumen	2 data 500 dokumen	2 data 500 dokumen	2 data 500 dokumen	2 data 500 dokumen	210,844.23	157,984.83	210,844.22	219,446.67	223,747.82	
								15,181.17	2,059.75	15,181.17	15,800.56	16,110.26	
								537.50	432.03	537.50	559.43	570.39	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi		552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	54.404.00	56.593.76	54.404.00	56.623.68	57.733.50	
	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data		654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	140.721.56	98.899.29	140.721.55	146.463.00	149.333.67	
Kegiatan	4785 Pengawasan dan Penegakan Hukum							2,474.29	2,500.00	2,474.29	2,575.24	2,625.72	DJA
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program berdasarkan target yang ditetapkan		86%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kepatuhan atas regulasi PNBp		92%	92%	92%	92%	92%						
	Rasio Capaian PNBp terhadap target yang ditetapkan (persen)		90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,285.99	1,523.21	1,285.99	1,338.46	1,364.69	
	Joint Program Penerimaan (PU)		3 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	1,134.34	1,523.21	1,134.34	1,180.62	1,203.76	
	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	151.65	-	-	-	-	
	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas)		-	-	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	-	151.65	157.84	160.93	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,188.30	976.79	1,188.30	1,236.78	1,261.02	
	Rekomendasi peningkatan kepatuhan instansi pengelola PNBp		4 rekomendasi	-	4 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	439.74	-	439.74	457.68	466.65	
	Rekomendasi Pengawasan PNBp (PU)		2 rekomendasi	4 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	748.56	976.79	748.56	779.10	794.37	
Kegiatan	4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum							321,032.90	308,563.20	322,878.90	336,052.36	342,638.99	DJBC
Sasaran Kegiatan	1. Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif												
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepatuhan dan cukai		80%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%						
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics		75%	76.5%	76.5%	76.5%	76.5%						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program - DJBC		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan	2. Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kepatuhan atas peraturan kepatuhan dan cukai - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%						
	Persentase efektivitas patroli dan operasi kepatuhan dan cukai		78%	78%	78%	78%	78%						
	Persentase efektivitas kegiatan patroli pengawasan NPP		73%	73%	73%	73%	73%						
Output	Operasi Bidang Keamanan		102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	220,866.66	225,570.04	220,866.66	229,878.02	234,383.63	
	Pemberantasan Narkotika		2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	7,083.88	6,633.54	7,083.88	7,372.90	7,517.41	
	Penyapihan Unit Anjing Pelacak (K-9)		2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	1,480.18	839.40	1,480.18	1,540.57	1,570.77	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)		15 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,023.33	100.00	1,023.33	1,065.08	1,085.96	
	Laporan Kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas negara (PU)		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1,569.29	956.15	1,569.29	1,633.32	1,665.33	
	Sertifikasi dan Penjaminan Keahlian Tenaga Forensik Digital		-	247 laporan	247 laporan	247 laporan	247 laporan	-	18.47	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kolaborasi Penegakan Hukum yang optimal		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	1,699.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Joint Intelligence Perpajakan		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	527.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB)		-	102 laporan	102 laporan	102 laporan	102 laporan	-	524.15	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Joint Audit DJP-DJBC		-	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	-	803.79	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Benda Meterai dan Cukai							706,816.38	534,542.36	706,816.38	735,654.49	750,073.31	
	Benda Meterai		618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	706,816.38	534,542.36	706,816.38	735,654.49	750,073.31	
	Sosialisasi dan Diseminasi							4,089.28	1,672.64	4,089.28	4,256.12	4,339.54	
	Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman Penegakan Hukum oleh APH		1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	3,437.08	1,417.61	3,437.08	3,577.31	3,647.43	
	Diseminasi dalam Rangka Pencegahan Dini Tindak Pidana di Bidang Perpajakan		100 orang	-	-	-	-	652.20	-	-	-	-	
	Diseminasi Penanganan Wajib Pajak yang Terindikasi Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan			100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	255.03	652.20	678.81	692.11	
	Perjaanjan							1,158.92	469.98	1,158.92	1,206.21	1,229.85	
	Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum (PU)		2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	1,158.92	469.98	1,158.92	1,206.21	1,229.85	
	Data dan Informasi Publik							30,007.03	26,115.85	30,007.02	31,231.31	31,843.44	
	Data Digital SPT dan Selain SPT		6 data	6 data	6 data	6 data	6 data	26,783.50	25,586.27	26,783.50	27,876.27	28,422.64	
	Dokumen Risk Engine CRM dan BI Perpajakan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3,223.53	529.58	3,223.52	3,355.04	3,420.80	
	4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan							1,723.14	1,312.63	1,723.14	1,793.45	1,828.60	
	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal												
	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak		55%	56%	56%	56%	56%						
	Penanganan Perkara							1,723.14	1,312.63	1,723.14	1,793.45	1,828.60	
	Putusan Penanganan Perkara		399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	706.84	489.08	706.84	735.67	750.09	
	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai		122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	1,016.31	823.55	1,016.31	1,057.77	1,078.50	
	6209 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan							19,104.90	14,329.41	19,104.89	19,884.37	20,274.10	
	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal												
	Persentase jumlah putusan yang memperbahakan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak		45%	46%	46%	46%	46%						
	Penanganan Perkara							19,104.90	14,329.41	19,104.89	19,884.37	20,274.10	
	Dokumen Penyelesaian Banding DJP		367.991 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	5,796.87	2,974.47	5,796.87	6,033.39	6,151.63	
	SK Keberatan/Non Keberatan		691.616 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	6,968.46	5,010.33	6,968.46	7,252.76	7,394.93	
	Dokumen Peninjauan Kembali DJP		2.474 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	6,339.56	6,344.62	6,339.56	6,598.22	6,727.54	
	CIB Pengelolaan Belanja Negara							48,200.34	24,406.80	42,393.96	43,944.87	44,720.3145	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program	Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJA)		85	85,5	86	86,5	87						D/A
	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)		85	85,5	86	86,5	87						DJPK
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara (DJA)		86	86,5	87	87,5	88						D/A
	Indeks ketimpangan antar wilayah		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27						DJPK
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah		6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%						DJPK
	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara (DJPK)		86	86,5	87	87,5	88						DJPK
	Alokasi TKD untuk Infrastruktur		55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun						DJPK
	Persentase Kinerja Hibah Daerah		75%	75%	75%	75%	75%						DJPK
													DJPK
Kegiatan	4775 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							5,249.16	1,960.20	5,249.16	5,463.33	5,570.41	D/A
Sasaran Kegiatan	Perspektif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas ekosistem perumahan		100	100	100	100	100						
Output	Sosialisasi dan Diseminasi								733.68	1,636.98	1,703.77	1,737.16	
	Diseminasi/Sosialisasi terkait APBN	1,500 orang		1,500 orang	1,500 orang	1,500 orang	1,500 orang		733.68	1,636.98	1,703.77	1,737.16	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								1,226.52	3,612.18	3,759.56	3,833.24	
	Bimtek/Sosialisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	1,300 orang	1,300 orang	200 orang	1,300 orang	1,300 orang	1,300 orang		1,226.52	1,560.50	1,624.17	1,656.00	
	Pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA)	245 orang	245 orang	-	200 orang	200 orang	200 orang		-	630.28	655.99	668.85	
	Bimtek/Sosialisasi Kinerja Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	1,800 orang	1,800 orang	-	1,650 orang	1,650 orang	1,650 orang		-	1,421.40	1,479.39	1,508.39	
Kegiatan	4779 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi												
Sasaran Kegiatan	Perspektif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara							17,683.96	9,265.18	17,683.96	18,405.46	18,766.21	DJPK
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen						
	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	78	78	78	78	78						
	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	70	70	80	80	80	80						
Output	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								6,416.07	13,519.27	14,070.86	14,346.65	
	Internship dan Secondment								74.12	132.33	137.73	140.43	
	Pengelolaan Jafung	750 Orang	750 Orang	185 Orang	185 Orang	185 Orang	185 Orang		215.86	872.96	908.58	926.39	
	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	560 Orang	560 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang		677.48	868.00	903.41	921.12	
	Peningkatan Kapasitas dan Supervisi di Bidang PDRD	-	1,100 Orang	1,100 Orang	1,100 Orang	1,100 Orang	1,100 Orang		770.58	770.58	770.58	770.58	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Keuangan Desa	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		339.05	339.05	339.05	339.05	
	Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	-	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang		429.90	429.90	429.90	429.90	
	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		164.33	260.57	271.20	276.52	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bintek Transfer ke Daerah (PU)		11,500 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	11,385.42	3,744.76	9,845.90	10,310.42	10,542.68	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							1,778.06	1,709.78	1,778.06	1,850.60	1,886.87	
	Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)		1,150 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,778.06	1,709.78	1,778.06	1,850.60	1,886.87	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa							2,386.63	1,139.33	2,386.63	2,484.00	2,532.69	
	Bintek BUMDes (PN)		2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,386.63	1,139.33	2,386.63	2,484.00	2,532.69	
Kegiatan	4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							11,450.93	3,538.48	8,011.75	8,338.63	8,502.07	D/A
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat Efektivitas Money Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran		70 Rekomendasi Kebijakan	70 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	1,904.90	1,760.66	1,904.90	1,982.62	2,021.48	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
	Rekomendasi Hasil Morev Penganggaran Pusat		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	8,995.59	1,777.82	6,106.85	6,356.01	6,480.59	
	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,182.78	1,361.76	4,182.78	4,353.43	4,438.76	
	Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pusat dan Daerah		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	292.18	239.36	292.18	304.10	310.06	
	Laporan Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Program JKN		2 Laporan	-	-	-	-	465.28	95.94	465.28	484.26	493.75	
	Rekomendasi Hasil Money Kinerja		8 Rekomendasi	1 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	2,888.74	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,166.62	80.75	1,166.62	1,214.21	1,238.01	
	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)		1 Kajian	-	-	-	-	550.44	-	-	-	-	
								550.44	-	-	-	-	
Kegiatan	4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD												D/PR
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKD												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		100	100	100	100	100						
Output	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah		80	85	85	85	85						
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1,386.76	1,696.64	1,718.45	1,747.33	1,761.77	
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	230.71	133.97	230.71	240.13	244.83	
	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi		-	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	362.51	412.82	362.51	377.30	384.70	
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda dan Perda DPRD		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	218.02	218.02	218.02	218.02	
	Rekomendasi Kebijakan Analisis Pemerintahan dan Pertumbuhan DPRD		-	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	-	457.94	457.94	457.94	457.94	
	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	544.40	159.60	159.60	159.60	159.60	
									115.71	115.71	115.71	115.71	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)		1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	114.64	139.26	114.64	119.32	121.66	
	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	134.49	59.32	59.32	59.32	59.32	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,018.43	463.12	686.74	755.99	790.62	
	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)		2 Rekomendasi	-	-	-	-	1,018.43	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)		-	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	463.12	686.74	755.99	790.62	
Kegiatan	4777 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	D/A
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan Output	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan kas pemerintah pusat		3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)						
	Pengelolaan Keuangan Negara							185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	
	Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 99907) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908)		2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	
Kegiatan	4781 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							3,328.58	2,636.12	3,030.49	3,075.28	3,097.68	D/PK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal		12	-	-	-	-						
	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		100	-	-	-	-						
	Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SILPA		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25						
Output	Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen					2,230.74	1,932.65	1,932.65	1,932.65	1,932.65	
	Rincian Alokasi DAU		1 Dokumen	-	-	-	-	296.60	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DAK Fisik		1 Dokumen	-	-	-	-	419.00	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DAK Nonfisik		1 Dokumen	-	-	-	-	182.23	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Hibah Daerah		1 Dokumen	-	-	-	-	356.80	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus		1 Dokumen	-	-	-	-	120.56	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Keistimewaan		1 Dokumen	-	-	-	-	166.62	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Desa		1 Dokumen	-	-	-	-	222.16	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Insentif Fiskal		1 Dokumen	-	-	-	-	154.50	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DBH SDA		1 Dokumen	-	-	-	-	156.14	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DBH Non SDA		1 Dokumen	-	-	-	-	156.14	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DTU		-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	594.48	594.48	594.48	594.48	
	Rincian Alokasi DTK		-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	539.04	539.04	539.04	539.04	
	Rincian Alokasi DDIOKK		-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	799.125	799.125	799.125	799.125	
	Pengelolaan Keuangan Negara							770.66	546.48	770.66	802.10	817.82	
	Laporan Keuangan TKD dan Hibah		1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	264.16	275.97	264.16	274.94	280.33	
	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	506.50	270.51	506.50	527.16	537.49	
	Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	327.19	157.00	327.19	340.54	347.21	
	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)							327.19	157.00	327.19	340.54	347.21	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							2,915.50	1,934.13	2,915.50	3,034.45	3,093.93	D/A
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks implementasi penganggaran berbasis kinerja		90	90	90	90	90						
Output	Peraturan Presiden		1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	268.04	164.20	268.04	278.97	284.44	
	Peraturan Presiden Bidang Penganggaran		1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	268.04	164.20	268.04	278.97	284.44	
	Peraturan Menteri		4 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	568.08	134.19	568.08	591.26	602.85	
	Peraturan Menteri Bidang Penganggaran		1 PerMen	-	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	488.74	134.19	488.74	508.68	518.65	
	Peraturan Menteri terkait Anggaran BA-BUN		1 PerMen	-	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	79.34	-	79.34	82.58	84.20	
	Peraturan lainnya							35.33	-	35.33	36.77	37.49	
	Peraturan Lainnya Bidang Penganggaran		1 Peraturan	-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	35.33	-	35.33	36.77	37.49	
	Perencanaan dan Penganggaran							2,044.05	1,635.74	2,044.05	2,127.45	2,169.14	
	Pagu Indikatorif		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	215.55	231.30	215.55	224.34	228.74	
	Pagu Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216.55	208.20	216.55	225.39	229.80	
	Pagu Alokasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222.17	223.20	222.17	231.23	235.77	
	DIPA		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,265.60	973.04	1,265.60	1,317.23	1,343.05	
	Dokumen Anggaran BA-BUN		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124.18	-	124.18	129.25	131.78	
Kegiatan	4782 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							4,981.41	2,904.84	2,912.30	2,931.21	2,940.67	D/PPK
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD yang Kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		86	-	-	-	-						
Output	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	90	90	90	90						
	Peraturan Presiden		1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	149.50	150.05	149.50	155.60	158.65	
	Perpres Jukris DAK		1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	149.50	150.05	149.50	155.60	158.65	
	Peraturan Menteri		5 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	239.53	271.68	239.53	249.30	254.19	
	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa							239.53	271.68	239.53	249.30	254.19	
	Peraturan Lainnya							74.56	253.40	293.56	296.60	298.12	
	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	74.56	34.40	74.56	77.60	79.12	
	KMK terkait Dana Transfer ke Daerah		-	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	-	219.00	219.00	219.00	219.00	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							4,517.82	2,229.71	2,229.71	2,229.71	2,229.71	
	Rekomendasi Kebijakan DAU		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,909.29	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,139.34	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	172.53	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	172.53	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus		Rekomendasi Kebijakan ²	-	-	-	-	-	230.16	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan		Rekomendasi Kebijakan ¹	-	-	-	-	-	111.56	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal		Rekomendasi Kebijakan ¹	-	-	-	-	-	216.11	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa		Rekomendasi Kebijakan ⁴	-	-	-	-	-	342.00	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DBH SDA		Rekomendasi Kebijakan ¹	-	-	-	-	-	112.15	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA		Rekomendasi Kebijakan ¹	-	-	-	-	-	112.15	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Transfer Umum		-	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	-	570.15	570.15	570.15	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Transfer Khusus		-	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	Rekomendasi Kebijakan ³	-	373.61	373.61	373.61	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		-	Rekomendasi Kebijakan ⁵	Rekomendasi Kebijakan ⁵	Rekomendasi Kebijakan ⁵	Rekomendasi Kebijakan ⁵	Rekomendasi Kebijakan ⁵	-	870.90	870.90	870.90	
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan IKN		-	Rekomendasi Kebijakan ¹	Rekomendasi Kebijakan ¹	Rekomendasi Kebijakan ¹	Rekomendasi Kebijakan ¹	Rekomendasi Kebijakan ¹	-	415.05	415.05	415.05	
Program	CD Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko								238.139.79	289.232.57	231.105.32	243.616.11	248.892.53
Sasaran Program	1. Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang - DJPb		3,25 (skala 4)	3,26 (skala 4)	3,27 (skala 4)	3,28 (skala 4)	3,29 (skala 4)						
	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN - DJPb		98,8	98,8	98,8	98,8	98,8						
Sasaran Program	2. Pengelolaan kekayaan negara dan gelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Pengelolaan Aset		3,00	3,10	3,20	3,30	3,40						
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara		100%	100%	100%	100%	100%						
	Indeks Efektivitas Kebijakan Investasi - Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program	3. Pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif dan risiko yang prudent												
Indikator Kinerja Program	Imbal Hasil (Yield) SBN		7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0						
	Rasio utang terhadap PDB - DJPPR		39,43	39,13-39,85	39,08-39,62	39,04-39,29	38,55-38,64						DJPPR
	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali - DJPPR		100	100	100	100	100						DJPPR
	Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik - DJPPR		100	100	100	100	100						DJPPR
	Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang - DJPPR		3,25 (Skala 4)	3,26 (Skala 4)	3,27 (Skala 4)	3,28 (Skala 4)	3,29 (Skala 4)						DJPPR
Kegiatan	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							9,306,49	7,442,89	9,306,49	9,686,20	9,876,05	DJKN
Sasaran Kegiatan	Persepsi Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kelayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		-	74	75	76	77						
Output	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		100	-	-	-	-						
	Sosialisasi dan Diskriminasi							9,306,49	7,442,89	9,306,49	9,686,20	9,876,05	
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara		1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	5.781,37	5.667,52	5.781,37	6.017,25	6.135,19	
	Sosialisasi Pengelolaan Pinang Negara		1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.525,59	1.052,33	1.525,59	1.587,84	1.618,96	
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang		2123 orang	2123 orang	1.037 orang	795 orang	580 orang	1,999,52	723,04	1,999,52	2,081,10	2,121,89	
Kegiatan	4797 Money Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							8,788,03	12,367,24	8,788,03	9,146,58	9,325,85	DJKN
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		-	100%	100%	-	-						
	Persentase Produktivitas lelang		-	80%	80%	80%	80%						
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkan		100%	-	-	-	-						
Output	Money Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko							8,788,03	12,367,24	8,788,03	9,146,58	9,325,85	
	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Seripikasi		19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	5,669,74	8,850,60	5,669,74	5,901,07	6,016,73	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara		27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	1,607,42	2,664,56	1,607,42	1,673,01	1,705,80	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang		199 Rekomendasi	199 Rekomendasi	180 Rekomendasi	109 Rekomendasi	57 Rekomendasi	1,244,74	692,28	1,244,74	1,295,53	1,320,92	
	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)		4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	96,51	67,63	96,51	100,45	102,41	
	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	169,61	92,17	169,61	176,53	179,99	
Kegiatan	4798 Pengelolaan Aset							93,049,19	203,053,38	93,049,19	96,845,59	98,743,77	DJKN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		-	100%	100%	100%	100%						
	Persentase realisasi pokok lelang		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase evaluasi kinerja BMN		-	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas layanan penilaian		70%	72%	74%	76%	78%						
	Indeks efektivitas kinerja SMV		100	100	100	100	100						
Output	Peraturan Lainnya												
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara		11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	21,376.32	34,939.72	16,011.12	16,664.38	16,991.00	
	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara		9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	14,493.67	25,547.60	11,707.18	12,184.84	12,423.66	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	6,882.65	9,392.12	4,303.94	4,479.54	4,567.34	
	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	4,460.82	11,585.07	5,308.85	5,525.46	5,633.75	
	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	270.58	133.01	60.95	63.44	64.68	
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset		26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	135.21	75.57	34.63	36.04	36.75	
	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		- Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	2,822.30	6,181.69	2,832.76	2,948.34	3,006.12	
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	3,467.00	1,588.75	1,653.57	1,685.98	
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	998.90	1,026.61	470.44	489.64	499.24	
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota		- Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	233.83	315.97	144.79	150.70	153.66	
	Rekomendasi Dukungan APBN kepada BUMN		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	339.31	155.49	161.83	165.00	
	Pelayanan Publik Lainnya		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	45.91	21.04	21.90	22.33	
	Risalah Lelang		34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	2,043.95	6,816.84	3,123.82	3,251.27	3,314.99	
	Laporan Penilaian		-	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	2,043.95	2,149.12	984.83	1,025.02	1,045.11	
	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN							-	4,667.72	2,138.98	2,226.25	2,269.89	
	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan		5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	183.08	95.00	43.53	45.31	46.20	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							183.08	95.00	43.53	45.31	46.20	
	Pengelolaan Jafung		550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	4,416.72	2,977.01	1,364.21	1,419.87	1,447.70	
	Sertifikasi Penilai Pemerintah		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	490.84	374.22	171.49	178.48	181.98	
	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	436.91	520.32	238.43	248.16	253.03	
								569.97	448.78	205.65	214.04	218.24	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang		1.963 Orang	1.963 Orang	473 Orang	508 Orang	543 Orang	2.433,23	567,87	260,23	270,84	276,15	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemilai Pemerintah pada Instansi Daerah		37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	485,77	1.065,83	488,42	508,34	518,31	
	Perencanaan dan Penganggaran							74,25	37,16	17,03	17,73	18,07	
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	74,25	37,16	17,03	17,73	18,07	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	12.349,56	41.515,95	19.024,68	19.800,89	20.188,98	
	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan		273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	225,30	302,91	138,81	144,47	147,30	
	Rekomendasi di Bidang Keuangan Negara		188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	3.880,97	25.883,08	11.860,92	12.344,84	12.586,80	
	Rekomendasi Hasil Penilaian		12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	2.615,63	5.209,56	2.387,28	2.484,68	2.533,38	
	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Putang Negara		176 Rekomendasi	176 Rekomendasi	266 Rekomendasi	277 Rekomendasi	286 Rekomendasi	1.084,70	1.599,76	733,09	763,00	777,96	
	Penggalan Potensi Lelang		40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	3.822,47	2.731,60	1.251,75	1.302,83	1.328,36	
	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang		27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	195,28	1.09,08	49,99	52,03	53,05	
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)		-	-	-	-	-	-	5.262,41	2.411,50	2.509,89	2.559,08	
	Peta Tematik BMN (PU)		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	505,21	417,55	191,34	199,15	203,05	
	Pengelolaan Aset BUN		3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	41.561,66	42.223,88	19.349,09	20.138,53	20.533,24	
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.387,09	1.868,31	856,15	891,09	908,55	
	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)		-	-	-	-	-	1.171,62	-	-	-	-	
	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	-	1.056,45	484,12	503,87	513,74	
	Rekomendasi Penyajian Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.509,20	811,87	372,04	387,22	394,81	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	-	60,994	27,951	29,091	29,661	
	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)		-	-	-	-	-	-	60,994,45	27,950,70	29,091,09	29,661,27	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		27.090 Rekomendasi	-	-	-	-	3.195,75	-	-	-	-	
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)		-	-	-	-	-	3.195,75	-	-	-	-	
Kegiatan	4799 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara							1.167,17	518,38	1.167,17	1.214,79	1.238,60	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas belanja dan investasi		-	100	100	100	100						
Output	Indeks deviasi perencanaan kas pemerintah pusat		3,25	-	-	-	-						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.167,17	518,38	1.167,17	1.214,79	1.238,60	

DJKN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)		3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	75.81	17.84	75.81	78.90	80.45	DUKN
	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	43.52	43.75	43.52	45.30	46.19	
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan		21 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1,038.84	456.78	1,038.84	1,081.22	1,102.41	
	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah		4 Rekomendasi Kebijakan	-	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	9.00	-	9.00	9.37	9.55	
														DUKN
Kegiatan	4800 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara													
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN		-	92	92.5	93	93.5							
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian LBMN		82	-	-	-	-							
Output	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		91	-	-	-	-							
	Pengelolaan Keuangan Negara		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	272.12	138.87	272.12	283.22	288.77	
	Laporan Barang Milik Negara		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	35.00	30.27	35.00	36.42	37.14	
	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144.00	93.60	144.00	149.88	152.81	
	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	93.13		93.13	96.92	98.82	
Kegiatan	4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif								2,228.57	2,129.80	2,228.57	2,319.50	2,364.96	DUKN
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95.5	95.5	95.5	95.5							
	Nilai kinerja regulasi		85	-	-	-	-							
Output	Undang-Undang								976.75	1,019.25	976.75	1,016.60	1,036.52	
	RUU terkait Penilai		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	191.05	430.80	191.05	198.84	202.74	
	RUU terkait Perdelangan		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	369.83	493.96	369.83	384.92	392.47	
	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	415.86	94.50	415.86	432.83	441.31	
	Peraturan Pemerintah								318.32	51.20	318.32	331.31	337.80	
	RPP Penetapan Investasi Pemerintah		12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	318.32	51.20	318.32	331.31	337.80	
	Peraturan Menteri								489.58	379.52	489.58	509.55	519.54	
	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	489.58	379.52	489.58	509.55	519.54	
	Peraturan Lainnya								145.39	304.16	145.39	151.32	154.29	
	Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	6 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	145.39	304.16	145.39	151.32	154.29	
	Perizinan Lembaga								80.00	80.00	80.00	83.26	84.90	
	Perizinan Balai Lelang		10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	80.00	80.00	80.00	83.26	84.90	
	Perizinan Profesi								218.53	295.68	218.53	227.45	231.91	
	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II		187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	218.53	295.68	218.53	227.45	231.91	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4807 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi												
Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas komunikasi kebijakan publik												
Indikator Kinerja Kegiatan	Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100	100	100	100						
Output	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah		2 forum	2 forum	2 forum	2 forum	2 forum	138.29	28.76	101.11	116.41	120.51	
	Data dan Informasi Publik							138.29	28.76	101.11	116.41	120.51	
	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat		14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	152.00	43.10	79.73	91.79	95.03	
	Sistem Informasi Pemerintahan							744.78	-	-	-	-	
	Modernisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi Dalam Rangka Transformasi Layanan Setelmen Pembiayaan		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	744.78	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	244.71	66.40	178.92	205.98	213.24	
	Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung							451.20	194.50	390.34	449.39	465.22	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		13	13	13	13	13	392.68	178.70	345.30	397.54	411.54	
	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	58.52	15.80	45.04	51.85	53.68	
	Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor												
Kegiatan	4808 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara							22,470.90	13,116.99	19,585.02	22,547.66	23,341.72	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan		100	100	100	100	100						
Output	Tingkat Efektifitas Kerjasama Kelembagaan		100	100	100	100	100						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	Pengembangan Tools Debt Service Calculator (DSC) (PU)		0	1	1	1	1	918.34	1,016.36	1,333.77	1,535.53	1,589.60	
	Kajian atas Revisi Penggunaan Progress Variant (PV) sebagai Formula Project Rating atas Kegiatan yang Didanai oleh Pinjaman dan Hibah (PU)		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	-	388.76	465.74	536.19	555.07	
	Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing Roadmap) 2025-2029		0 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	352.40	557.73	642.10	664.71	
	Penyusunan Model/Framework Analisis Kestimbangan Daya Serap Pasar SEN Domestik (PU)		1	1	1	1	1	459.43	275.20	310.30	357.24	369.82	
	Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN (PU)		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	217.36	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		2 Kajian	-	-	-	-	241.55	-	-	-	-	
	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang		44	11	11	11	11	1,766.20	1,158.55	1,262.89	1,453.93	1,505.13	
	Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang		32	16	16	16	16	950.00	131.03	542.66	624.74	646.74	
	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko		8	9	9	9	9	417.77	712.56	324.54	373.63	386.79	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	398.43	314.96	395.70	455.55	471.60	
								16,174.03	9,322.35	13,859.40	15,955.92	16,517.83	

DJPPR

DJPPR

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyusunan rekomendasi kebijakan creative financing untuk pembiayaan proyek SBSN (PU)		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	409.16	819.87	943.89	977.13	
	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	386.63	200.00	282.68	325.44	336.90	
	Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	949.75	450.00	694.41	799.45	827.60	
	Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai Sumber Dana Lainnya Untuk Akum		1 Dokumen	-	-	-	-	295.18	-	-	-	-	
	Penyusunan SDG Bond Allocation and Impact Report (PU)		1 Dokumen	-	-	-	-	612.57	-	-	-	-	
	Evaluasi dan Pengembangan Pricing Model SBSN		1 Dokumen	-	-	-	-	219.90	-	-	-	-	
	Profiling Donor dan Pemetaan Sebaran Proyek yang Dibiayai Hibah (PU)		1 Dokumen	-	-	-	-	861.98	-	-	-	-	
	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur		45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	2,359.83	1,218.18	2,460.57	2,832.79	2,932.55	
	Register Pinjaman dan Hibah		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	101.64	100.14	74.31	85.56	88.57	
	Seretlen Transaksi Kewajiban pembiayaan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	322.13	346.90	270.85	311.83	322.81	
	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02		9 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	278.14	161.84	221.89	255.45	264.45	
	Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	122.64	62.12	98.63	113.56	117.55	
	Pengelolaan underlying aset dan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh SBSN		24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	211.80	100.12	170.34	196.11	203.02	
	Penerimaan SBSN		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	745.75	338.24	664.61	765.15	792.09	
	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN		42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	653.71	713.93	551.45	634.87	657.23	
	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor		5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	24.10	127.49	19.38	22.32	23.10	
	Pemasaran Kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	939.56	573.30	733.37	844.30	874.04	
	Perjanjian Pinjaman dan Hibah		129 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	694.18	693.92	588.16	677.13	700.98	
	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah		21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	359.44	73.52	311.42	358.53	371.16	
	Pengaturan Hubungan Kelembagaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	800.00	800.00	1,133.27	1,304.70	1,350.65	
	Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara		32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	1,334.90	538.97	921.62	1,061.04	1,098.40	
	Edukasi Investasi Keuangan dan Perlindungan Basis Investor		12 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	2,543.58	833.76	1,348.08	1,552.00	1,606.66	
	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	936.51	578.30	684.72	788.30	816.06	
	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN		36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	420.10	258.99	353.23	406.66	420.99	
	Penyusunan Impact Report dan Pembiayaan Proyek Budget Tagging Melalui SUN Tematik		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	742.11	1,456.52	1,676.85	1,735.90	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			1	1	1	1	1,626.06	1,000.00	1,188.88	1,368.72	1,416.93	
	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/ Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	400.00	400.00	292.46	336.70	348.56	
	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/ atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	1,226.06	600.00	896.42	1,032.03	1,068.37	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							1,986.28	619.73	1,940.09	2,233.57	2,312.22	
	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	887.90	256.69	664.39	764.89	791.83	
	Pembangunan Sistem Pemesanan dan Pengembangan Desain Integrasi Channel Social Fund Linked Sukuk (PN)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,098.38	363.04	1,275.70	1,468.68	1,520.40	
Kegiatan	4809 Pengelolaan risiko Keuangan Negara							5,386.60	2,732.48	4,981.60	5,735.17	5,937.14	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Produktif dengan Risiko yang Terkendali												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara		100	100	100	100	100						
Output	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pembiayaan Risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Bencana Alam (PU)		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4,524.53	2,369.88	4,325.42	4,979.73	5,155.10	
								-	132.12	274.13	315.60	326.72	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L		90 (Nilai)	-	-	-	-						
	Indeks kualitas nilai IKPA K/L		-	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks						
	Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah		-	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks						
Output	Sosialisasi dan Diskominasi							4,156.93	1,402.13	4,156.92	4,326.53	4,411.33	
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah		400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	2,104.86	624.34	2,104.86	2,190.74	2,233.68	
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	957.74	286.743	957.74	996.82	1,016.35	
	Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	6.66	3.658	6.66	6.93	7.07	
	Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah		245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	722.73	333.075	722.73	752.22	766.96	
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	364.93	154.314	364.93	379.82	387.27	
	Komunikasi Publik							4,220.80	2,369.37	4,220.80	4,393.00	4,479.11	
	Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digital		218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	4,220.80	2,369.37	4,220.80	4,393.00	4,479.11	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		19,998 Unit Kerja	16,055 Unit Kerja	16,055 Unit Kerja	16,055 Unit Kerja	16,055 Unit Kerja	12,562.17	4,791.63	12,562.17	13,074.72	13,330.98	
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi		3,720 Orang	4,664 Orang	4,664 Orang	4,664 Orang	4,664 Orang	6,893.15	2,659.68	6,893.15	7,174.39	7,315.00	
	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1,900.07	1,083.43	1,900.07	1,977.59	2,016.35	
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU		248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	584.65	123.2	584.65	608.50	620.43	
	Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS		173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	46.08	24.3	46.08	47.96	48.90	
	Penyusunan Metode Analitical BLU		1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	1,787.64	665.709	1,787.64	1,860.58	1,897.05	
	Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan		19,213 Orang	19,213 Orang	19,213 Orang	19,213 Orang	19,213 Orang	128.95	7.92	128.95	134.22	136.85	
	Pengelolaan Keuangan Negara							1,221.63	227.394	1,221.63	1,271.48	1,296.40	
	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kluasa BUN		744 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	8,936.80	3,700.73	8,936.79	9,301.41	9,483.73	
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)		273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	6,890.70	3,016.73	6,890.70	7,171.84	7,312.41	
	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKRI dan LRPUN		356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	706.45	415.358	706.45	735.27	749.69	
	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		273 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	1,339.64	268.641	1,339.64	1,394.30	1,421.63	
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas		10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13,306.56	8,957.24	13,306.56	13,849.46	14,120.91	
	Konsultasi Pencatran Dana		1,792 Kegiatan	1,802 Kegiatan	1,802 Kegiatan	1,802 Kegiatan	1,802 Kegiatan	2,947.75	1,288.39	2,947.75	3,068.02	3,128.15	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							360.69	259.991	360.69	375.40	382.76	
	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)		100.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	9,998.12	7,408.86	9,998.12	10,406.04	10,610.00	
								78.96	71.42	78.96	82.18	83.79	
								78.96	71.416	78.96	82.18	83.79	
Kegiatan	6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Sasaran Kegiatan	Pencapaian tugas khusus yang efektif							26,307.65	15,124.73	26,307.65	27,381.00	27,917.66	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas kinerja BLU sesuai hasil Performance Metrics		3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU		100%	-	-	-	-						
	Persentase Pencapaian Target Kinerja BLU		-	100%	100%	100%	100%						
	Indeks pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman												
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah		67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	1.780.67	874.40	1.780.67	1.853.33	1.889.65	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							1.780.674	874.398	1.780.67	1.853.33	1.889.65	
	Movev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM,		1.806 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	2.027.40	268.94	2.027.40	2.110.12	2.151.47	
	Pendataan dan Pengelola Perpendaharaan							2027.398	268.938	2.027.40	2.110.12	2.151.47	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							13.095.49	8.804.19	13.095.49	13.629.80	13.896.93	
	Movev Pengelolaan Kas Negara		2	2	2	2	2	424.09	311.312	424.09	441.39	450.04	
	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN		Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	245.79	139.214	245.79	255.82	260.83	
	Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah		8	8	8	8	8	2.477.63	939.275	2.477.63	2.578.72	2.629.26	
	Rekomendasi Terkait Kemitraan dengan Perbankan		2	2	2	2	2	98.65	30.803	98.65	102.68	104.69	
	ALCo Regional		34	68	68	68	68	3.331.61	2.743.21	3.331.61	3.467.54	3.535.50	
	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah		437	435	435	435	435	4.392.77	2.938.84	4.392.77	4.572.00	4.661.61	
	Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)		2	2	2	2	2	2.124.95	1.701.54	2.124.95	2.211.65	2.255.00	
	Pengelolaan Keuangan Negara		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.99	8.15	28.99	30.17	30.76	
	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah							28.99	8.153	28.99	30.17	30.76	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							9.375.10	5.169.05	9.375.10	9.757.60	9.948.85	
	Movev Penerimaan dan Pengeluaran Kas		246 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.332.90	5.322	1.332.90	1.387.28	1.414.47	
	Rekomendasi atas Pelaksanaan Disbursement		4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	36.00	-	36.00	37.47	38.20	
	Revi Belanja Pemerintah		319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	8.006.20	5.163.73	8.006.20	8.332.85	8.496.18	
Kegiatan	6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara							5.505.44	1.403.26	5.505.44	5.730.05	5.842.37	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas		3 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks						
Sasaran Kegiatan	Penyaluran dana investasi yang optimal dan tepat sasaran												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase imbal hasil dana kelolaan		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Indeks kinerja penyaluran investasi dan subsidi			4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks						
	Perencanaan							98.95	25.75	98.95	102.98	105.00	
	Pencapaian/Perencanaan Investasi Pemerintah dengan OIP		2 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	80.95	13.6	80.95	84.25	85.9	
	Perencanaan Terkait Investasi Pemerintah		15 Perencanaan	15 Perencanaan	15 Perencanaan	15 Perencanaan	15 Perencanaan	18	12.15	18	18.73	19.1	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1.793.15	595.77	1.793.15	1.866.31	1.902.89	
	Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah		41	41	41	41	41	1.553.69	595.765	1.553.69	1617.08	1.648.77	
	Rekomendasi Outstanding Pinjaman		38	0	38	38	38	59.46	-	59.46	61.89	63.1	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			2 Rekomendasi	0 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	180	-	180	187.34	191.02	
	Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OPI)		39 Laporan	0 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	2.22	-	2.22	2.31	2.36	
	Pengelolaan Keuangan Negara		39 Laporan	0 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	2.22	-	2.22	2.31	2.36	
	Konsolidasi LK K/L dan LK BUN		39 Laporan	0 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	2.156.47	433.30	2.156.48	2.244.45	2.288.45	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan		241 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	751.675	29.777	751.68	782.34	797.68	
	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		472.572 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	611.47	200.25	611.47	636.42	648.89	
	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengeshahan Dana		5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	793.327	203.27	793.33	825.69	841.88	
	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara		5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	1.454.65	348.45	1.454.65	1.514.00	1.543.67	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.454.65	348.45	1.454.65	1514	1543.67	
	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PI)												
Kegiatan	6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara												
Sasaran Kegiatan	Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP		96%	-	-	-	-	3.681.04	1.927.63	3.681.03	3.831.22	3.906.31	
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		92%	-	-	-	-						
	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara		152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	3.681.04	1.927.63	3.681.03	3.831.22	3.906.31	
	Government Financial Statistic (GFS)		873 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	1.411.89	721.305	1411.89	1469.49	1498.3	
	Laporan Keuangan BUN		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.510.80	1.042.40	1510.8	1572.44	1603.26	
	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	724.363	143.56	724.36	753.92	768.69	
	Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	33.984	20.372	33.98	35.37	36.06	
Kegiatan	6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif												
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan perbendaharaan yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi		85 (Nilai)	-	-	-	-						
Output	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan		-	90,25 Indeks	90,25 Indeks	90,25 Indeks	90,25 Indeks						
	Undang-Undang			1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	573.38	330.47	573.38	596.77	608.47	
	RUU P2 APBN		1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	573.379	330.47	573.38	596.77	608.47	
	Peraturan Pemerintah							80.54	346.94	80.54	83.82	85.46	
	RPP Pelaksanaan Anggaran		1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	80.535	80.54	80.54	83.82	85.46	
	RPP Investasi Pemerintah			1 PP	-	-	-	266.4					
	Peraturan Menteri			3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	1.060.36	457.66	1.060.36	1.103.62	1.125.25	
	Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	504.96	207.59	504.96	525.56	535.86	
	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	514.80	231.12	514.8	535.8	546.31	
	Peraturan, ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah		4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	40.60	18.95	40.6	42.26	43.08	
	Peraturan lainnya												
	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah		9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	5165.73	3.790.17	5.165.73	5.376.49	5.481.86	
								3820.33	3.374.60	3820.33	3976.2	4054.13	

DJPB

DJPB

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	267,31	108,17	267,31	278,22	283,67	
	Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	68,50	68,25	68,5	71,29	72,69	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	433,29	232,36	433,29	450,97	459,81	
	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	576,30	6,8	576,3	599,81	611,56	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan		1	1	1	1	1	2761,25	1.215,57	2.761,25	2.873,91	2.930,24	
	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia		Rekomendasi 34	Rekomendasi 41	Rekomendasi 41	Rekomendasi 41	Rekomendasi 41	128,80	12,00	128,8	134,06	136,68	
	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan		Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	Rekomendasi 2	256,24	186,24	256,24	266,69	271,92	
	Kajian Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN		Rekomendasi 10 Laporan	Rekomendasi 10 Laporan	Rekomendasi 10 Laporan	Rekomendasi 10 Laporan	Rekomendasi 10 Laporan	2263,40	859,29	2263,4	2355,75	2401,92	
	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	112,81	158,05	112,81	117,41	119,72	
Kegiatan	6217 Move Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							1,951,39	1,187,74	2,343,64	2,698,16	2,793,18	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek Pemerintah		100	100	100	100	100						
Output	Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek		89	89	89	89	89						
	Pemantauan dan Evaluasi serta Laporan							1,951,39	1,187,74	2,343,64	2,698,16	2,793,18	
	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)		13 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	565,841	154,057	190,943	219,828	227,569	
	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman Dan Hibah		16 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	1385,546	1033,681	2152,697	2478,336	2565,615	
Program	WA Dukungan Manajemen							50,480,781,02	49,615,259,82	51,941,101,66	52,978,008,61	53,497,985,13	
Sasaran Program	1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (SETJEN)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJP)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (LNSW)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DUSEP)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPPR)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (BPPK)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJA)		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (BPPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (Sejen)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (LNSW)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJKN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPB)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (ITJEN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJA)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJSEF)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (BaTII)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPk)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (LNSW)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BaTI)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJA)		100	100	100	100	100						
Sasaran Program	2. Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara												
Indikator Kinerja Program	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (BaTI)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJKN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJPB)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (LNSW)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100%	-	-	-	-						
Sasaran Program	3. Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi												
Indikator Kinerja Program	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (ITJEN)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPk)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (LNSW)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJA)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (BPPK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJEC)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJKN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (LNSW)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPB)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJP)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJA)												
Sasaran Program	4. Pencapaian tugas khusus yang efektif												
Indikator Kinerja Program	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4672 Legislasi dan Litigasi												D/SEF
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal							24.30		-	-	-	
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
Output	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		95	-	-	-	-						
	Peraturan Lainnya							12.15		-	-	-	D/SEF
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		1 Peraturan	-	-	-	-	12.15		-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12.15		-	-	-	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	-	-	-	-	12.15		-	-	-	
Kegiatan	4673 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum							32.015.40					D/SEF
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		100	-	-	-	-						
Output	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	-	-	-	-						
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-		-	-	-	D/SEF
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21.845.21		-	-	-	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoliran		12 Layanan	-	-	-	-	2.915.06		-	-	-	
	Kerumahainggaan		12 Layanan	-	-	-	-	198.32		-	-	-	D/SEF
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengeloilaannya Unit		1 Layanan	-	-	-	-	135.87		-	-	-	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	-	-	-	-	18.595.77		-	-	-	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							9.160.25		-	-	-	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		52 Unit	-	-	-	-	2.535.24		-	-	-	D/SEF
	Kendaraan Bermotor		7 Unit	-	-	-	-	5.222.77		-	-	-	
	Gedung/Bangunan		400 m2	-	-	-	-	1.402.24		-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1 Dokumen	-	-	-	-	1.009.93		-	-	-	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	42.44		-	-	-	D/SEF
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Laporan	-	-	-	-	707.12		-	-	-	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	-	-	-	-	105.74		-	-	-	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	17.30		-	-	-	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Laporan	-	-	-	-	137.34		-	-	-	D/SEF
Kegiatan	4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik												
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan							2.291.54		-	-	-	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100	-	-	-	-						
Output	Komunikasi Publik							2.291.54		-	-	-	D/SEF
	Pembinaan/Edukasi Publik		13 Layanan	-	-	-	-	1.628.34		-	-	-	
	Kerumahainggaan		12 Layanan	-	-	-	-	313.15		-	-	-	
	Publikasi Media Cetak		6 Layanan	-	-	-	-	132.08		-	-	-	
	Publikasi Media Elektronik		6 Layanan	-	-	-	-	146.64		-	-	-	D/SEF
	Publikasi Media Website		1 Layanan	-	-	-	-	71.33		-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
Kegiatan													DUSEF				
Sasaran Kegiatan	4675 Pengelolaan Organisasi dan SDM Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerjanya Tinggi													-			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	94%	-	-	-	-	-										
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96	-	-	-	-	-										
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal													-			
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Rekomendasi	-	-	-	-	-							-			
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	-	-	-	-	-							-			
	Layanan Manajemen SDM Internal													-			
	Pengembangan SDM	476 Orang	-	-	-	-	-							-			
	Administrasi Kepegawaian	528 Orang	-	-	-	-	-							-			
	Pengelolaan Jabatng	180 Orang	-	-	-	-	-						-				
Kegiatan	4676 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal													DUSEF			
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif														-		
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diundaklanjuti	98%	-	-	-	-	-										
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82%	-	-	-	-	-										
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal														-		
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1 Rekomendasi	-	-	-	-	-								-		
Kegiatan	4677 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi															DUSEF	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal																-
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat downtime sistem TIK	0.1 Persen															
Output	Sistem Informasi Pemerintahan														-		
	Layanan Teknologi / Sistem Informasi	12 Layanan	-	-	-	-	-								-		
Kegiatan	4678 Legislasi dan Litigasi																
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal														22.80		
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi	86 (Indeks)	-	-	-	-	-										
	Indeks kualitas rumusan kebijakan	-	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)										
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal														22.80		
	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan								22.80		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4679 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							119,759.32	97,767.02	154,439.76	172,030.22	180,094.61	BPPK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		84.1 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100 (point)	-	-	-	-						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							196.93	5,384.12	196.93	196.93	200.79	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		72 Unit	181 Unit	72 Unit	72 Unit	72 Unit	196.93	5,384.12	196.93	196.93	200.79	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							84,575.94	71,152.74	119,256.38	136,815.98	144,190.18	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	199.09	24.68	199.09	207.21	211.27	
	Dukungan Pimpinan dan Keptokokleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,789.95	965.73	2,789.95	2,903.78	2,960.70	
	Kerumahainggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,693.83	418.38	2,693.83	2,803.73	2,858.69	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	78,893.07	60,743.94	113,573.51	130,901.25	138,159.52	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							34,345.92	21,180.16	34,345.92	34,350.63	35,023.91	
	Kendaraan Bermotor		7 Unit	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit	196.00	-	196.00	196.00	199.84	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		1,501 Unit	51 Unit	1,501 Unit	1,501 Unit	1,501 Unit	9,998.82	2,604.24	9,998.82	10,003.54	10,199.61	
	Gedung/Bangunan		8,950 m2	7,185 m2	8,950 m2	8,950 m2	8,950 m2	24,151.09	18,575.92	24,151.09	24,151.09	24,624.45	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							640.84	50.00	640.84	665.67	679.74	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101.89	10.00	101.89	106.04	108.12	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	166.87	10.00	166.87	173.68	177.08	
Kegiatan	4680 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							91,651.77	22,999.58	91,651.77	93,489.98	95,322.38	BPPK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU		100%	-	-	-	-						
Output	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							45,054.20	22,999.58	45,054.20	46,892.41	47,811.50	
	Dukungan Pimpinan dan Keptokokleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	58.92	33.29	58.92	61.32	62.53	
	Kerumahainggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	361.08	100.00	361.08	375.81	383.18	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	44,634.20	22,866.29	44,634.20	46,455.28	47,365.80	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							46,597.57	-	46,597.57	46,597.57	47,510.88	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2,306 Unit	-	2,306 Unit	2,306 Unit	2,306 Unit	8,006.50	-	8,006.50	8,006.50	8,163.43	
	Gedung/Bangunan		11,800 m2	-	11,800 m2	11,800 m2	11,800 m2	38,591.07	-	38,591.07	38,591.07	39,347.45	
Kegiatan	4681 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							973.56	304.66	973.56	1,013.29	1,033.15	BPPK
Sasaran Kegiatan	Perspsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100 (point)	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Komunikasi Publik							973.56	304.66	973.56	1,013.29	1,033.15	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jurnal BPPK	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	94.54	59.46	94.54	98.40	2029	100.33	
	Corpu TV	1 Layanan	-	-	-	-	7.22	-	-	-	-	-	-
	Strategi Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	300.00	10.00	307.22	319.76	326.03	326.03	
	Pameran/Eksibisi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	505.00	225.20	505.00	525.60	535.91	535.91	
	Publikasi Media Elektronik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	66.80	10.00	66.80	69.53	70.89	70.89	
Kegiatan	4682 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik						991.53	240.35	991.53	1,031.99	1,052.22		BPPK
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (point)	-	-	-	-							
Output	Indeks efektivitas komunikasi	-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)							
	Komunikasi Publik						991.53	240.35	991.53	1,031.99	1,052.22		
	Jurnal Keuangan Negara	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	424.80	140.35	424.80	442.13	450.80		
	Layanan Kepustakaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	566.73	100.00	566.73	589.86	601.42		
Kegiatan	4683 Pengelolaan Organisasi dan SDM Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi						305,037.61	215,083.70	305,037.61	317,483.14	323,705.81		BPPK
Sasaran Kegiatan	Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya		87%	87%	87%	87%							
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	87%	87%	87%	87%	87%							
Output	Peraturan Menteri		1 Permen	1 Permen	1 Permen	1 Permen	32.19	10.00	32.19	33.50	34.16		
	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi						32.19	10.00	32.19	33.50	34.16		
	Peraturan lainnya						17.56	10.00	17.56	18.28	18.63		
	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	17.56	10.00	17.56	18.28	18.63		
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		24	24	24	24	1,288.45	540.00	1,288.45	1,341.02	1,367.30		
	Kajian Akademis BPPK	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	788.45	540.00	788.45	820.62	836.71		
	Center of Case Study	Rekomendasi Kebijakan	-	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	500.00	-	500.00	520.40	530.60		
Akreditasi Lembaga	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	152.99	15.30	152.99	159.24	162.36		
	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara						152.99	15.30	152.99	159.24	162.36		
	Konferensi dan Event						-	381.48	900.00	936.72	955.08		
	Regional Training Center	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	381.48	900.00	936.72	955.08		
	Sarana Bidang Pendidikan	-	311 Unit	311 Unit	311 Unit	311 Unit	-	480.01	3,256.48	3,389.34	3,455.77		
	Program dan Materi Pembelajaran	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	1,500.00	1,561.20	1,561.20	1,591.80		
	Alat Uji	-	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	-	195.01	1,223.80	1,223.80	1,298.69		
	Manajemen Pengetahuan	-	390 Unit	390 Unit	390 Unit	390 Unit	-	135.00	532.68	554.41	565.28		
	Pelatihan Bidang Ekonomi dan keuangan						275,324.52	201,847.80	271,168.04	282,231.70	287,763.44		
	Program dan Materi Pembelajaran	240 Orang	-	-	-	-	1,500.00						
	Pembelajaran Digital	170.042 Orang	170.042 Orang	170.042 Orang	170.042 Orang	170.042 Orang	9,605.80	6,483.18	9,605.80	9,997.72	10,193.67		
	Pembelajaran Klasikal	17,226 Orang	17,226 Orang	17,226 Orang	17,226 Orang	17,226 Orang	66,986.93	966.97	66,986.93	69,719.99	71,086.50		
	Sertifikasi Kompetensi	14,276 Orang	235 Orang	14,276 Orang	14,276 Orang	14,276 Orang	14,521.67	4,050.00	14,521.67	15,114.15	15,410.39		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Alat Uji		13 Orang	-	-	-	-	1,223.80	-	-	-	-	-
	Manajemen Pengetahuan		396 Unit	-	-	-	-	532.68	-	-	-	-	-
	Karyasiswa Beasiswa		290 Orang	288 Orang	290 Orang	290 Orang	290 Orang	162,662.63	161,371.95	162,662.63	169,299.27	172,617.54	-
	Regional Training Center		2 Kegiatan	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
	Pembelajaran Dengan Kriteria Tertentu		-	2.510 Orang	1.240 Orang	1.240 Orang	1.240 Orang	-	28,652.73	16,590.77	17,267.68	17,606.12	-
	E-Learning Empowering Leadership for Workplace Well-being Daerah (PU)		12,000 Orang	-	-	-	-	800.24	-	-	-	-	-
	Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kepala Daerah (PU)		342 Orang	-	-	-	-	3,009.00	-	-	-	-	-
	Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan (PU)		13.717 Orang	-	-	-	-	7,519.36	-	-	-	-	-
	Training of Trainers Pengelola Pajak Daerah (PU)		228 Orang	-	-	-	-	1,979.52	-	-	-	-	-
	Pelatihan Global Security: Green Customs (PU)		60 Orang	-	-	-	-	795.96	-	-	-	-	-
	Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)		859 Orang	-	-	-	-	1,771.29	-	-	-	-	-
	Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pacific Public Policymakers (PU)		35 Orang	-	-	-	-	1,515.64	-	-	-	-	-
	E-Learning Digital Leadership Awareness (PU)		-	60,000 Orang	60,000 Orang	60,000 Orang	60,000 Orang	-	98.75	244.67	254.65	259.64	-
	Program Pembelajaran Strategis Dukungan Teknis Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi SDM Kementerian Keuangan (PU)		-	328 Orang	328 Orang	328 Orang	328 Orang	-	50.87	126.04	131.18	133.75	-
	Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Perpajakan - Penguatan Kompetensi Dasar Perpajakan bagi SDM Direktorat Jenderal Pajak Pengampu Fungsi Kepatuhan Perpajakan 2026 (PU)		-	2.216 Orang	2.216 Orang	2.216 Orang	2.216 Orang	-	127.49	315.87	328.76	335.20	-
	Pembelajaran terkait Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir (PU)		-	176 Orang	176 Orang	176 Orang	176 Orang	-	45.88	113.66	118.30	120.62	-
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,965.83	9,032.90	12,965.83	13,494.83	13,759.33	-
	Penjaminan Mutu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	255.75	25.58	255.75	266.19	271.40	-
	Learning Organization		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,760.48	458.45	1,760.48	1,832.30	1,868.22	-
	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,239.14	469.39	1,239.14	1,289.70	1,314.97	-
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	241.10	24.11	241.10	250.94	255.85	-
	Pengelolaan Inovasi BPPK		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	161.38	16.14	161.38	167.96	171.25	-
	AKP Kewilayahan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,357.31	330.00	1,357.31	1,412.69	1,440.38	-
	Layanan Analisis Data Pembelajaran		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.40	14.84	148.40	154.45	157.48	-
	Layanan Pemantauan Dukungan Pembelajaran		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.40	14.84	148.40	154.45	157.48	-
	Layanan Perencanaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,653.88	7,679.56	7,653.88	7,966.15	8,122.29	-
	Layanan Manajemen SDM Internal		1,982 Orang	1,753 Orang	1,982 Orang	1,982 Orang	1,982 Orang	15,256.07	2,766.20	15,256.07	15,878.15	16,189.73	-
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		1,258 Orang	1,258 Orang	1,258 Orang	1,258 Orang	1,258 Orang	12,249.07	2,200.00	12,249.07	12,748.83	12,998.70	-
	Administrasi Kepegawaian		353 Orang	403 Orang	353 Orang	353 Orang	353 Orang	162.00	16.20	162.00	168.61	171.91	-
	Pengelolaan Jafung		-	-	-	-	-	2,845.00	550.00	2,845.00	2,961.08	3,019.11	-
	4684 Pengelolaan Organisasi dan SDM		-	-	-	-	-	37,769.63	20,728.07	37,769.63	39,310.63	40,081.12	-
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik		93%	93%	93%	93%	93%	-	-	-	-	-	-
Output	Pendidikan Tinggi		4,523 Orang	4,548 Orang	4,523 Orang	4,523 Orang	4,523 Orang	35,125.89	18,545.30	34,925.89	36,350.87	37,063.35	-
	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Kuantan		50 Orang	23 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	32,683.61	13,033.42	32,683.61	34,017.11	34,683.84	-
	Program Pengabdian Masyarakat		70 Orang	85 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	1,112.83	511.89	1,112.83	1,158.23	1,180.93	-
	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa		-	-	-	-	-	1,129.45	5,000.00	1,129.45	1,175.53	1,198.57	-

BPPK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Desa dan BUM Desa (PU)		40 Orang	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2,243.23	2,182.76	2,243.23	2,334.76	2,380.52	
	Penjaminan Mutu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	167.68	100.00	167.68	174.52	177.94	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,075.55	2,082.76	2,075.55	2,160.24	2,202.58	
	Layanan Manajemen SDM Internal							400.50	-	600.50	625.00	637.25	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		262 Orang	-	262 Orang	262 Orang	262 Orang	400.50	-	600.50	625.00	637.25	
Kegiatan	4685 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	BPPK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		82 (Indeks)	-	-	-	-						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti		97%	-	-	-	-						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		-	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		-	95.3%	95.3%	95.3%	95.3%						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	1	1	1	1	142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	
Kegiatan	4686 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	BPPK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Integritas		91.1 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)						
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	4	4	4	4	86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	
Kegiatan	4688 Legislasi dan Litigasi							17.58	27.04	17.58	18.3	18.65	D/A
Sasaran Kegiatan	Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		83	83	83	83	83						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							17.58	27.04	17.58	18.29	18.65	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	17.58	27.04	17.58	18.29	18.65	
Kegiatan	4689 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							37,694.94	22,727.94	43,547.53	47,160.67	48,876.93	D/A
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		100	100	100	100	100						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28,634.42	19,421.40	34,487.02	38,036.29	39,573.71	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	254.23	30.43	254.23	264.60	269.79	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,253.15	1,242.64	3,253.15	3,385.88	3,432.24	
	Kerumahainggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,882.69	870.63	1,882.69	1,959.50	1,997.91	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	20,846.19	17,277.69	26,698.79	29,930.30	31,308.85	
	Rekomendasi Data dan Informasi Anggaran		1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,924.02	-	1,924.02	2,002.52	2,041.77	
	Rekomendasi Data dan Informasi PNPB		1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	474.13	-	474.13	493.47	503.15	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							7,495.12	2,802.25	7,495.12	7,495.12	7,642.02	
	Getung/Bangunan		2,462 m2	1,546 m2	2,462 m2	2,462 m2	2,462 m2	5,686.95	2,802.25	5,686.95	5,686.95	5,798.42	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1,808.17	-	1,808.17	1,808.17	1,843.61	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,565.40	504.30	1,565.40	1,629.26	1,661.20	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.14	20.00	75.14	78.20	79.74	
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	202.96	-	202.96	211.24	215.38	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,054.34	469.00	1,054.34	1,097.35	1,118.86	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.96	15.30	232.96	242.46	247.22	
Kegiatan	4690 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							891.72	198.50	891.72	928.10	946.30	D/A
Sasaran Kegiatan	Pesepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi												
Output	Komunikasi Publik		100	100	100	100	100						
	Publikasi Media Elektronik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	891.72	198.50	891.72	928.10	946.30	
Kegiatan	4691 Pengelolaan Organisasi dan SDM							13,374.76	7,708.32	13,374.76	13,920.45	14,193.29	D/A
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM		97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%						
Output	Nilai evaluasi organisasi		100	100	100	100	100						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							10,361.18	7,256.32	10,361.18	10,783.91	10,995.28	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2,646.59	154.00	2,646.59	2,754.58	2,808.56	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,714.58	7,102.32	7,714.58	8,029.34	8,186.71	
	Layanan Manajemen SDM Internal							3,013.59	452.00	3,013.59	3,136.54	3,198.02	
	Pengembangan SDM		843 orang	843 orang	843 orang	843 orang	843 orang	2,451.52	368.12	2,451.52	2,551.55	2,601.56	
	Rekomendasi Pengelolaan SDM		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	562.06	83.88	562.06	584.99	596.46	
Kegiatan	4692 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							439.52	124.46	439.52	457.46	466.42	D/A
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							439.52	124.46	439.52	457.46	466.42	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	439,52	124,46	439,52	457,46	466,42	
Kegiatan	4694 Legislasi dan Litigasi							1,991,16	1,254,43	1,991,16	2,072,40	2,113,02	DJBC
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai												
Output	Persentase kualitas pemberian bantuan hukum terkait penegakan hukum pidana		79%	79%	79%	79%	79%						
	Peraturan Lainnya		6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	466,75	309,19	466,75	485,79	495,31	
	Harmonisasi Peraturan / Kebijakan							466,75	309,19	466,75	485,79	495,31	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1,524,42	945,25	1,524,42	1,586,62	1,617,71	
	Layanan Bantuan Hukum		35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	1,524,42	945,25	1,524,42	1,586,62	1,617,71	
Kegiatan	4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							1,929,564,91	1,790,966,87	2,139,879,90	2,271,412,36	2,344,389,72	DJBC
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		80	80	80	80	80						
	Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi		80%	81%	81%	81%	81%						
Output	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan		78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	331,011,39	443,239,53	331,011,39	331,280,90	337,774,01	
	Sarana Operasi Pengawasan							331,011,39	443,239,53	331,011,39	331,280,90	337,774,01	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		114 unit	35 unit	114 unit	114 unit	114 unit	3,093,33	239,73	3,093,33	3,093,33	3,153,96	
	Perangatan Pengolah Data dan Komunikasi							3,093,33	239,73	3,093,33	3,093,33	3,153,96	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	845,072,52	655,027,56	1,055,387,51	1,175,428,09	1,226,924,17	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengololaannya Unit		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	1,637,09	1,089,01	1,637,09	1,703,88	1,737,28	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	65,488,41	61,881,48	65,488,41	68,160,34	69,496,28	
	Kerumahanggaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	28,832,06	19,317,09	28,832,06	30,008,41	30,596,57	
	Layanan Perkantoran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	749,114,96	575,739,98	959,429,95	1,075,555,47	1,125,094,04	
	Layanan Sarana dan Prasana Internal							475,474,83	411,846,74	475,474,83	475,480,75	484,800,17	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		7,589 unit	4,682 unit	7,589 unit	7,589 unit	7,589 unit	132,387,23	86,105,47	132,387,23	132,393,14	134,988,05	
	Kendaraan Bermotor		271 unit	248 unit	271 unit	271 unit	271 unit	60,877,58	74,124,80	60,877,58	60,877,58	62,070,78	
	Gedung/Bangunan		29,695 m2	39,039 m2	29,695 m2	29,695 m2	29,695 m2	276,325,49	250,251,95	276,325,49	276,325,49	281,741,47	
	Tanah		20,211 m2	3,886 m2	20,211 m2	20,211 m2	20,211 m2	5,884,55	1,364,53	5,884,55	5,884,55	5,999,88	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6,540,66	3,984,44	6,540,66	6,807,52	6,940,95	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1,306,80	823,28	1,306,80	1,360,11	1,386,77	
	Laporan Keuangan Unit		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,900,53	1,188,10	1,900,53	1,978,07	2,016,84	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1,455,48	916,95	1,455,48	1,514,86	1,544,55	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	299,14	95,72	299,14	311,35	317,45	
	Dokumen Perencanaan Strategis		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	356,78	214,35	356,78	371,34	378,61	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1,221,94	746,04	1,221,94	1,271,80	1,296,72	
	OM Sarana Bidang Perintahan dan Keamanan							268,272,17	273,628,88	268,272,17	279,217,68	284,690,35	
	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		3,744 unit	3,744 unit	3,744 unit	3,744 unit	3,744 unit	260,301,58	265,406,80	260,301,58	270,921,89	276,231,95	
	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai		344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	7,970,59	8,222,08	7,970,59	8,295,79	8,458,39	
	Peraturan Lainnya							100,00	-	100,00	104,08	106,12	
	Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara		1 peraturan	-	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	100,00	-	100,00	104,08	106,12	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan	4696 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							15,796.11	6,567.62	15,796.11	16,440.59	16,762.82	DJBC	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan													
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya		2.75%	-	-	-	-							
	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100	100	100	100							
	Indeks opini publik terhadap DJBC		-	70	70	70	70							
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100							
Output	Komunikasi Publik							15,796.11	6,567.62	15,796.11	16,440.59	16,762.82		
	Pembinaan/Edukasi Publik		1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	2,430.53	406.72	2,430.53	2,529.69	2,579.28		
	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	591.62	217.42	591.62	615.76	627.83		
	Contact Center		179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	1,985.77	1,315.30	1,985.77	2,066.79	2,107.30		
	Kehumasan		5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1,378.88	345.70	1,378.88	1,435.14	1,463.27		
	Pemeran/Playbiji		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	390.67	115.76	390.67	406.61	414.58		
	Publikasi Media Cetak		6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	847.26	518.94	847.26	881.82	899.11		
	Publikasi Media Elektronik		4 media	4 media	4 media	4 media	4 media	498.90	235.32	498.90	519.26	529.43		
	Publikasi Iklan dan Media Placement		20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	4,323.06	2,161.53	4,323.06	4,499.44	4,587.63		
	Implementasi PUG		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	168.13	105.92	168.13	174.99	178.42		
	Strategi Komunikasi		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	2,110.11	918.25	2,110.11	2,196.20	2,239.25		
	Hubungan Antar Lembaga		10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	395.80	87.05	395.80	411.95	420.02		
	Bimbingan Pengguna Jasa		9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	675.38	139.72	675.38	702.94	716.72		
Kegiatan	4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM							202,946.42	175,493.23	202,946.42	211,226.63	215,366.68	DJBC	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi													
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering		100%	-	-	-	-							
	Tingkat implementasi learning organization - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%							
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC		100	100	100	100	100							
	Persentase Penentuan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dan WBKM - DJBC		75%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		97.30%	97.30%	97.30%	97.30%	97.30%							
Output	Peraturan Menteri							14.04	-	14.04	14.61	14.90		
	Peraturan Menteri Terkait Organisasi		1 RPermen	-	1 RPermen	1 RPermen	1 RPermen	14.04	-	14.04	14.61	14.90		
	Peraturan Lainnya							168.08	-	168.08	174.94	178.37		
	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi		3 peraturan	-	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	168.08	-	168.08	174.94	178.37		
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							539.58	355.98	539.58	561.59	572.60		
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelenbagaan Unit Eselon I		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	539.58	355.98	539.58	561.59	572.60		
	Layanan Manajemen SDM Internal		14,757 orang	14,757 orang	14,757 orang	14,757 orang	14,757 orang	61,511.11	35,892.47	61,511.11	64,020.76	65,275.57		
	Pengembangan SDM		1,950 orang	1,950 orang	1,950 orang	1,950 orang	1,950 orang	60,738.42	35,170.61	60,738.42	63,216.55	64,455.60		
	Administrasi Kepegawaian							772.68	721.86	772.68	804.21	819.97		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							140,713.61	139,244.78	140,713.61	146,454.72	149,325.24		
	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	347.98	359.40	347.98	362.17	369.27		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			10 unit 91 layanan 3 laporan 147 layanan 300 dokumen 12 layanan	10 unit 91 layanan 3 laporan 147 layanan 300 dokumen 12 layanan	10 unit 91 layanan 3 laporan 147 layanan 300 dokumen 12 layanan	10 unit 91 layanan 3 laporan 147 layanan 300 dokumen 12 layanan	10 unit 91 layanan 3 laporan 147 layanan 300 dokumen 12 layanan	395,65 1,935.94 564.99 293.43 137.24 137,038.38	129.49 929.51 369.31 234.05 184.65 137,038.38	395,65 1,935.94 564.99 293.43 137.24 137,038.38	411.80 2,014.93 588.04 305.40 142.84 142,629.54	419.87 2,054.42 599.57 311.39 145.64 145,425.08	
Kegiatan	4698 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							4,461.23	2,507.70	4,461.23	4,643.25	4,734.26	DJBC
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal		82 (skala 100)	-	-	-	-						
	Persentase efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal		80%	81%	81%	81%	81%						
	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI)		-	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)						
Output	Peraturan Lainnya												
	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	4,58	-	4,58	4,76	4,85	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4,456.66	2,507.70	4,456.66	4,638.49	4,729.40	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	4,213.87	2,359.73	4,213.87	4,385.79	4,471.75	
	Rekomendasi Manajemen Risiko		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	242.79	147.98	242.79	252.69	257.65	
Kegiatan	4699 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							524,740.36	406,077.43	524,740.67	537,028.33	547,553.58	DJBC
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase efektivitas implementasi CEISA 40		81%	81%	81%	81%	81%						
	Tingkat response time sistem aplikasi kepabeanaan (CEISA 40)		75%	-	-	-	-						
	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem		-	80%	80%	80%	80%						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan		-					278,155.69	10,610.00	278,156.00	280,383.00	285,878.00	
	Sistem Aplikasi Kepabeanaan dan Cukai		25 modul aplikasi sistem informasi	-	-	-	-	1,074.83	-	-	-	-	
	CEISA 40: Driving Digital Transformation (PU)		1 sistem informasi	-	-	-	-	277,080.86	-	-	-	-	
	Smart Customs and Excise System (PU)		-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	-	10,610.00	278,156.00	280,383.00	285,878.00	
	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							246,584.67	395,241.09	246,584.67	256,645.33	261,675.58	
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai		1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	246,584.67	306,541.66	246,584.67	256,645.33	261,675.58	
	Infrastruktur CEISA		-	1 unit	-	-	-		88,699.43				
	Layanan Manajemen SDM Internal							-	96.00	-	-	-	
	Asistensi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai		-	25 orang	-	-	-	-	96.00	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							-	130.34	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeaan dan Cukai		-	1 Laporan	-	-	-	-	130.34	-	-	-	
Kegiatan	4700 Legalisasi dan Litigasi							5,783.37	3,395.82	5,783.37	6,019.33	6,137.31	
Sasaran Kegiatan	Litigasi yang optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penanganan permasalahan hukum												
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Layanan Bantuan Hukum												
			1,891 Perkara	1,891 Perkara	1,891 Perkara	1,891 Perkara	100	5,783.37	3,395.82	5,783.37	6,019.33	6,137.31	
Kegiatan	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan keuangan yang akuratabel dan BMN yang produktif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - DJKN												
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan - DJKN		100	100	100	100	100						
	Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki/Drenovasi		90	-	-	-	-						
	Persentase Pendanaan Pengadaan Tanah yang Tepat Waktu		90	-	-	-	-						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							8,516.00	6,079.56	8,516.00	8,516.00	8,682.91	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		309 Unit	-	-	-	-	8,516.00	6,079.56	8,516.00	8,516.00	8,682.91	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							215,279.86	217,577.46	208,844.22	299,419.02	312,535.41	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	569.78	191.55	569.78	593.03	604.65	
	Kerumahanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	15,650.76	32,559.39	15,650.76	16,289.31	16,608.58	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokolran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	8,269.96	7,944.53	8,269.96	8,607.38	8,776.08	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	190,789.36	176,881.99	244,353.72	273,929.31	286,546.11	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							251,103.31	201,634.76	251,103.31	251,103.31	256,024.93	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2,565 Unit	2,350 Unit	2,350 Unit	2,350 Unit	2,350 Unit	21,079.13	5,187.53	21,079.13	21,079.13	21,492.28	
	Kendaraan Bermotor		126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	16,499.38	29,344.22	16,499.38	16,499.38	16,822.77	
	Gedung/Barugunan		18,658 m2	18,658 m2	18,658 m2	18,658 m2	18,658 m2	213,524.80	167,103.01	213,524.80	213,524.80	217,709.89	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,132.01	1,132.01	1,537.14	1,599.85	1,631.21	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	377.98	377.98	377.98	393.40	401.11	
	Laporan Keuangan Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	295.97	295.97	295.97	308.04	314.08	
	Dokumen Perencanaan Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	198.94	198.94	198.94	207.05	211.11	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Risiko Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	380.61	105.73	380.61	396.14	403.91	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	283.64	153.40	283.64	293.21	301.00	
Kegiatan	4702 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							5,878.00	5,009.19	5,878.00	6,117.82	6,237.73	
Sasaran Kegiatan	Komunikasi publik yang efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi - DJKN		-	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan - DJKN		100	-	-	-	-						
	Komunikasi Publik												
	Pembinaan/Edukasi Publik		4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang		5,878.00	5,878.00	6,117.82	6,237.73	
			1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	1,891.16	1,184.40	1,891.16	1,968.32	2,006.90	
	Khumasan							2,232.45	2,481.18	2,232.45	2,323.53	2,369.07	
	Pameran/Eksibisi		65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	692.69	791.08	692.69	720.95	735.08	
	Layanan Perpustakaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	64.87	55.25	64.87	67.52	68.84	
	Publikasi Media Website		13 Media	13 Media	12 Media	12 Media	12 Media	42.22	17.85	42.22	43.94	44.80	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		15 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	22 Kegiatan	25 Kegiatan	426.28	337.24	426.28	443.67	452.37	
	Strategi Komunikasi		2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	64.80	60.04	64.80	67.44	68.77	
	Contact Center		14.282 Customer	14.282 Customer	3.200 Customer	3.400 Customer	3.000 Customer	463.54	82.16	463.54	482.45	491.90	
Kegiatan	4703 Pengelolaan Organisasi dan SDM							51,366.77	54,439.75	51,366.77	53,462.54	54,510.40	DJKN
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan organisasi yang efektif dan pengelolaan SDM yang adaptif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - DJKN		-	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - DJKN		-	100	100	100	100						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJKN		96	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian program IS RBTK - DJKN		94	-	-	-	-						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan								1,763.23	806.89	839.81	856.27	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembaruan Unit Eselon		18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	806.89	1,763.23	806.89	839.81	856.27	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28,573.66	28,084.62	28,573.66	29,739.47	30,322.36	
	Unit yang Mempromote Predikat Zi/WBK/WBBM		18 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	123.78	149.84	123.78	128.83	131.35	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	310.49	306.32	310.49	323.15	329.49	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	28,139.40	27,628.47	28,139.40	29,287.49	29,861.52	
	Layanan Manajemen SDM Internal							21,986.22	24,591.90	21,986.22	22,883.26	23,331.77	
	Pengembangan SDM		1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	21,986.22	24,591.90	21,986.22	22,883.26	23,331.77	
								3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	DJKN
Kegiatan	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas - DJKN		-	100	100	100	100						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - DJKN		-	93	93	93	93						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal - DJKN		82	-	-	-	-						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Ijen yang Ditindaklanjuti - DJKN		98	-	-	-	-						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal		463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal							3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4705 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi												DJKN
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan - DJKN												
	Persentase pengembangan sistem aplikasi		95	-	-	-	-						
Output	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	Pemeliharaan Sistem TIK DJKN		713 Unit	713 Unit	713 Unit	713 Unit	713 Unit	14,590.87	17,010.66	15,437.37	15,975.81	16,288.94	
	Sistem Informasi Pemerintahan							5,376.98	1,147.91	1,041.74	1,078.08	1,099.21	
	Sistem TIK		10 Modul	10 Modul	10 Modul	10 Modul	10 Modul	5,376.98	1,147.91	1,041.74	1,078.08	1,099.21	
	Sistem Informasi Pemerintahan							7,632.71	12,254.87	11,121.44	11,509.34	11,734.92	
	Sistem Informasi Manajemen Pusatang Negara (SIMPaN) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,577.03	3,579.33	3,248.28	3,361.58	3,427.47	
	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	4,169.16	4,799.27	4,355.39	4,507.31	4,595.65	DJP
	Sistem Informasi Manajemen Aset Migas (SIHM) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	886.52	887.55	805.46	833.56	849.89	
	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	2,988.72	2,712.30	2,806.90	2,861.91	
	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)		-										
Kegiatan	4706 Legislasi dan Litigasi												
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa		60%	-	-	-	-						
	Nilai kinerja optimalisasi penanganan perkara/sengketa yang ditujukan kepada DJP		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal		100 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	1,772.88	835.61	1,772.88	1,845.21	1,881.37	
	Layanan Bantuan Hukum							1,772.88	835.61	1,772.88	1,845.21	1,881.37	
													DJP
Kegiatan	4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		100	-	-	-	-						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100	100	100	100						
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	100	100	100	100						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		383 Unit	783 Unit	783 Unit	783 Unit	783 Unit	6,206.02	10,026.53	6,206.19	6,206.19	6,327.65	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							6,206.02	10,026.53	6,206.19	6,206.19	6,327.65	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,578,138.45	1,854,003.20	3,241,448.86	3,616,489.04	3,777,124.79	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,362,697.10	1,747,964.52	3,025,937.50	3,392,184.94	3,548,424.21	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoliran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	6,232.42	3,041.92	6,232.42	6,486.60	6,613.84	
	Kerumahaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12,723.49	12,723.49	12,723.49	13,242.60	13,502.16	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	196,555.45	90,273.27	196,555.45	204,574.90	208,584.58	
								445,137.46	385,183.88	445,137.45	445,160.13	453,885.30	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							322,161.66	173,490.26	119,819.12	119,116.65	121,661.33	
	Software Hardware SIDJP							106,950.49	159,889.51	106,950.48	105,240.58	107,336.81	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital							11,268.65	11,391.65	11,268.64	11,635.27	11,863.33	
	Asset Recovery Management System Fase II (PU)							1,000.00	544.45	1,000.00	1,040.80	1,061.19	
	Peralatan khusus intelijen, sarpras. dan infrastruktur kegiatan operasi intelijen							-	1,000.00	600.00	1,200.00	1,400.00	
	Core Tax System (PN)							201,742.53	-	-	-	-	
	Sistem Peningkatan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Tax Crime Handling System) (PN)							1,200.00	664.65	-	-	-	
	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							180,457.16	451,053.40	382,199.68	389,562.34	397,197.75	
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi							180,457.16	252,004.68	180,457.15	187,819.81	191,501.07	
	Pemeliharaan coretax system DJP							-	199,048.72	201,742.53	201,742.53	205,696.68	
Kegiatan													
Sasaran Kegiatan	4711 Legislasi dan Litigasi							176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	
Indikator Kinerja Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Output	Indeks penanganan perkara hukum keuangan Negara												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	
	Layanan Bantuan Hukum							176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	
Kegiatan													
Sasaran Kegiatan	4712 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit							6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	
Indikator Kinerja Kegiatan	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan												
	Persentase Tingkat Harga CPO												
	Persentase Imbal Hasil Pengelolaan Dana												
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	Perangan Pengolah Data dan Komunikasi							500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							103,184.36	98,118.05	103,184.36	103,184.36	103,184.36	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi							4,018.00	5,208.14	4,018.00	4,018.00	4,018.00	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran							4,786.00	5,072.74	4,786.00	4,786.00	4,786.00	
	Layanan Perkantoran							94,380.36	87,837.16	94,380.36	94,380.36	94,380.36	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran							1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,397.00	2,681.90	2,397.00	2,397.00	2,397.00	
	Pengembangan SDM							2,397.00	2,681.90	2,397.00	2,397.00	2,397.00	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							2,953.64	3,884.69	2,953.64	2,953.64	2,953.64	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit							155.10	293.58	155.10	155.10	155.10	
	Laporan Keuangan Unit							330.54	450.83	330.54	330.54	330.54	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal							2,218.00	2,833.10	2,218.00	2,218.00	2,218.00	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan							250.00	307.18	250.00	250.00	250.00	
	Sistem Informasi Pemerintahan							3,915.00	3,909.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Aplikasi Internal		3 Modul	3 Modul	4 Modul	5 Modul	6 Modul	3,915.00	3,909.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	
	Hasil Kelolaan Dana							1,704,660.00	1,708,516.36	1,704,660.00	1,704,660.00	1,704,660.00	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		565 Miliar	688 Miliar	688 Miliar	688 Miliar	688 Miliar	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan		85 Rupiah	85 Rupiah	85 Miliar	85 Miliar	85 Miliar	118,000.00	119,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	
	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan		80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	
	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan		43,011 Hektar	21,011 Hektar	21,011 Hektar	21,011 Hektar	21,011 Hektar	1,260,660.00	1,261,016.36	1,260,660.00	1,260,660.00	1,260,660.00	
	Pendanaan untuk SDM Perkebunan		6,500 Orang	6,500 Orang	6,500 Orang	6,500 Orang	6,500 Orang	120,000.00	121,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan		16,000 Rupiah	16,000 Rupiah	16,000 Rupiah	16,000 Rupiah	16,000 Rupiah	117,000.00	118,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
	Hasil Kelolaan Dana		1,000.000 Kilo Liter	1,000.000 Kilo Liter	1,000.000 Kilo Liter	1,000.000 Kilo Liter	1,000.000 Kilo Liter	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	
	Pendanaan untuk Volume Penyuluran Selasih Harga Biodiesel (PN)							4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	
Kegiatan	4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah							95,640.78	95,640.78	95,640.77	95,640.77	95,640.77	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan pembiayaan ultra mikro yang inklusif, prudent dan optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro		100%	100%	100%	100%	100%						
			100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Realisasi PNBP layanan utama BLU												
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi												
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Kerumahainggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	58,923.49	58,923.49	58,923.49	58,923.49	58,923.49	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,289.86	3,289.86	3,289.86	3,289.86	3,289.86	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	411.06	411.06	411.06	411.06	411.06	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							55,222.57	55,222.57	55,222.57	55,222.57	55,222.57	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1,145.00	1,339.88	1,145.00	1,145.00	1,145.00	
	Layanan Manajemen SDM Internal		49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	1,145.00	1,339.88	1,145.00	1,145.00	1,145.00	
	Pengembangan SDM							2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,072.32	1,084.32	1,072.32	1,072.32	1,072.32	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	
	Dokumen Perencanaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	363.48	363.48	363.48	363.48	363.48	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.96	18.96	18.96	18.96	18.96	
	Sistem Informasi Pemerintahan							658.13	670.13	658.13	658.13	658.13	
	Sistem Aplikasi Internal		1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	300.00	105.12	300.00	300.00	300.00	
	Hasil Kelolaan Dana		336 Miliar	336 Miliar	336 Miliar	336 Miliar	336 Miliar	300.00	105.12	300.00	300.00	300.00	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU							72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
	Hasil Kelolaan Dana							72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMe (PN)		1,470.000 Usaha Mikro	1,480.000 Usaha Mikro	1,480.000 Usaha Mikro	1,480.000 Usaha Mikro	1,480.000 Usaha Mikro	31,714.22	31,702.22	31,714.22	31,714.22	31,714.22	
								31,714.22	31,702.22	31,714.22	31,714.22	31,714.22	
Kegiatan	4714 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup							69,603.24	69,603.24	66,062.98	66,062.98	66,062.98	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dana lingkungan hidup yang berkelanjutan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup		100%	100%	100%	100%	100%						

DJPB

DJPB

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output	Peraturan lainnya		10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89		
	Peraturan Lainnya terkait Organisasi Komunikasi Publik							96,89	96,89	96,89	96,89	96,89		
	Pembinaan/Edukasi Publik		1 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.515,40	2.515,40	2.515,40	2.515,40	2.515,40		
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							2.515,40	2.515,40	2.515,40	2.515,40	2.515,40		
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							41.525,49	43.194,39	41.525,50	41.525,50	41.525,50		
	Kerumahanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	483,60	483,60	483,60	483,60	483,60		
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	41.041,90	42.710,79	41.041,90	41.041,90	41.041,90		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gedung/Bangunan		1.461 M2	-	-	-	-	3.540,28	-	-	-	-		
	Layanan Manajemen SDM Internal							866,37	866,37	866,37	866,37	866,37		
	Pengembangan SDM		65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	809,42	809,42	809,42	809,42	809,42		
	Administrasi Kepegawaian		78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	56,95	56,95	56,95	56,95	56,95		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.277,81	1.277,81	1.277,82	1.277,82	1.277,82		
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08		
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	467,73	467,73	467,73	467,73	467,73		
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	176,48	176,48	176,48	176,48	176,48		
	Rekomendasi Manajemen Risiko		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	362,72	362,72	362,72	362,72	362,72		
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	220,81	220,81	220,81	220,81	220,81		
	Sistem Informasi Pemerintahan							457,30	1.535,45	457,30	457,30	457,30		
	Sistem Aplikasi Dana Hasil Kelolaan Dana		1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	457,30	1.535,45	457,30	457,30	457,30		
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		505 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	19.323,70	20.116,93	19.323,70	19.323,70	19.323,70		
	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup		5.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	3.813,68	3.813,68	3.813,68	3.813,68	3.813,68		
	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Unggulan Hidup		100 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	8.320,71	9.113,94	8.320,71	8.320,71	8.320,71		
Kegiatan								7.189,31	7.189,31	7.189,31	7.189,31	7.189,31		
	4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							731.887,77	327.032,76	831.129,39	903.608,29	938.925,46		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel													
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks							
Indikator Kinerja Kegiatan														
	Output		84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks	84,1 Indeks							
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		155 Unit	-	155 Unit	155 Unit	155 Unit	1.642,88	-	1.642,88	1.642,88	1.675,08		
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi							1.642,88	-	1.642,88	1.642,88	1.675,08		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	465.844,95	272.848,51	595.964,27	667.906,68	698.604,07		
	Kerumahanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	18.722,26	8.167,11	18.722,26	19.486,13	19.888,06		
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleraan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.444,85	11.059,03	12.444,85	12.952,60	13.206,47		
	Rencana kebutuhan BMN dan Penggilaannya Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.511,20	426,40	1.511,20	1.572,86	1.603,68		
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	433.166,64	253.195,96	563.285,96	633.895,09	663.925,86		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							251.250,38	45.120,86	220.372,67	220.372,67	224.691,99		
	Kendaraan Bermotor		89 Unit	-	-	-	-	30.877,59	-	-	-	-		
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		1065 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	11.646,60	36.428,00	36.428,00	36.428,00	37.142,00		
	Gedung/Bangunan		26.384 M2	7.628 M2	7.628 M2	7.628 M2	7.628 M2	183.944,67	33.474,26	183.944,67	183.944,67	187.549,99		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							13.149,57	9.063,39	13.149,57	13.686,06	13.954,32		
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		433 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.084,71	2.057,73	4.084,71	4.251,37	4.334,70		
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		501 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	4.329,25	3.422,80	4.329,25	4.505,88	4.594,19		
	Dokumen Perencanaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.226,30	619,83	1.226,30	1.276,33	1.301,35		
	Laporan Keuangan Unit		71 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	1.624,21	1.361,24	1.624,21	1.690,47	1.723,61		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		3 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,885.10	1,601.79	1,885.10	1,962.01	2,000.47	
Kegiatan	4718 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik												
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	6,131.71	4,852.00	6,131.71	6,381.88	6,506.97	
Output	Komunikasi Publik							6,131.71	4,852.00	6,131.71	6,381.88	6,506.97	
	Penunaaan/Edukasi Publik		429 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	2,958.55	2,047.94	2,958.55	3,079.25	3,139.61	
	Kehumasan		322 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	2,897.50	2,577.50	2,897.50	3,015.72	3,074.83	
	Implementasi PUG		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	275.66	226.56	275.66	286.91	292.53	
Kegiatan	4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM							152,110.37	128,115.64	152,110.37	158,316.48	161,419.46	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		430	427	427	427	427	99,441.31	98,612.13	99,441.32	103,498.52	105,527.07	
	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		Rekomendasi 360 Laporan	Rekomendasi 360 Laporan	Rekomendasi 360 Laporan	Rekomendasi 360 Laporan	Rekomendasi 360 Laporan	18,384.93	18,819.65	18,384.93	19,135.03	19,510.08	
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		440	438	438	438	438	1,328.44	553.45	1,328.44	1,382.64	1,409.73	
	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBKM		Dokumen 4 Dokumen	Dokumen 4 Dokumen	Dokumen 4 Dokumen	Dokumen 4 Dokumen	Dokumen 4 Dokumen	743.73	744.38	743.73	774.07	789.24	
	Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penipuan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216.06	97.45	216.06	224.88	229.28	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	455.13	94.45	455.13	473.70	482.98	
	Layanan Manajemen SDM Internal							78,313.03	78,302.75	78,313.03	81,508.20	83,105.76	
	Pengembangan SDM		5.360 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	52,669.07	29,503.51	52,669.07	54,817.97	55,892.39	
	Administrasi Kepegawaian		1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	20,409.32	7,870.25	20,409.32	21,242.02	21,658.36	
	Pengelolaan Jabatan Fungsional		275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	32,055.28	21,547.06	32,055.28	33,363.14	34,017.05	
								204.47	86.20	204.47	212.81	216.98	
Kegiatan	4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal												
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif							1,250.90	737.15	1,250.90	1,301.94	1,327.46	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI												
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal		82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks						
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		74 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	1,250.90	737.15	1,250.91	1,301.94	1,327.46	
	Rekomendasi Manajemen Risiko		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	458.15	376.42	458.15	476.84	486.19	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	102.85	48.12	102.85	107.04	109.14	
								689.91	312.61	689.91	718.06	732.13	
Kegiatan	4725 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi												
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal							506,431.60	361,341.94	506,431.58	518,090.53	528,245.10	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027		2028
Indikator Kinerja Kegiatan Output	Indeks Implementasi <i>Blueprint</i> TIK DJPB		3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks					
	Sistem Informasi Pemerintahan							263,251.92	359,638.67	263,251.92	273,992.60	279,362.86
	<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi BUN		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	89,745.88	129,396.44	89,745.88	93,407.51	95,238.30
	<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi Saktir		9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	117,920.51	164,463.87	117,920.51	122,731.67	125,137.21
	<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi Perbendaharaan		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	55,585.53	65,778.36	55,585.53	57,853.42	58,987.35
	Sistem Informasi Pemerintahan							243,179.68	1,703.27	243,179.68	244,097.94	248,882.26
	Sistem Pengelolaan Data Analitik		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	837.68	180.68	837.68	871.86	888.95
	Sistem Aplikasi BUN		3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	7,551.80	308.13	7,551.80	7,859.91	8,013.97
	Sistem Aplikasi Perbendaharaan		1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	5,067.78	518.72	5,067.78	5,274.55	5,377.93
	Sistem Aplikasi Saktir		1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	7,483.63	159.08	7,483.63	7,788.97	7,941.63
	<i>Software Hardware</i> SPAN SAKTI dan MPN		5 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	220,673.50	-	220,673.50	220,673.50	224,998.70
	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen 2 dan EKA		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	917.12	247.82	917.12	954.54	973.25
Kegiatan	Sistem Monrev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)		2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	270.15	88.32	270.15	281.18	286.69
	Sistem Layanan <i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	378.00	200.51	378.00	393.43	401.14
	4728 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							32,791.98	22,521.01	38,369.26	41,840.49	43,415.22
	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel											
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BAO15		100	100	100	100	100					
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25,843.49	19,105.96	31,420.77	34,744.16	36,179.81
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	256.35	58.11	256.35	266.81	272.04
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,386.15	500.00	1,386.15	1,442.71	1,470.98
	Kerumah Tanggan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,335.45	4,674.86	4,335.45	4,512.33	4,600.77
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	19,865.54	13,873.00	25,442.82	28,522.31	29,836.01
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		101 unit	1 unit	101 unit	101 unit	101 unit	3,325.13	2,508.59	3,325.13	3,390.30	3,390.30
Kegiatan	Peralatan Fasilitas Perkantoran		589 m2	1.178 m2	1.178 m2	1.178 m2	1.178 m2	823.80	53.00	823.80	823.80	839.94
	Gedung/Bangunan		3 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2,081.33	860.16	2,081.33	2,122.12	2,122.12
	Kendaraan Bermotor							3,623.37	906.46	3,623.37	3,771.20	3,845.12
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	318.82	23.04	318.82	331.83	338.33
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	730.37	250.00	730.37	760.16	775.06
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	108.21	129.42	108.21	112.63	114.83
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	157.60	139.72	157.60	164.03	167.24
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,927.17	139.35	1,927.17	2,005.80	2,045.11
	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	381.20	224.93	381.20	396.76	404.53
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan											
	Kegiatan	4729 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							1,094.98	544.42	1,094.98	1,139.66
Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indeks efektivitas komunikasi			100	100	100	100	100					
Indikator Kinerja Kegiatan												

DJPK

DJPK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Komunikasi Publik		12 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	1,094.98	544.42	1,094.98	1,139.66	1,161.99	
	Layanan Kepustakaan		3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	58.68	47.68	58.68	61.07	62.27	
	Pembinaan/Edukasi Publik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	186.66	100.00	186.66	194.28	198.08	
	Kehumasan		5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	458.00	118.80	458.00	476.69	486.03	
	Publikasi Media Cetak		3 Media	1 Media	3 Media	3 Media	3 Media	266.64	227.94	266.64	277.52	282.96	
	Publikasi Media Elektronik							125.00	50.00	125.00	130.10	132.65	
Kegiatan	4730 Pengelolaan Organisasi dan SDM							8,250.20	7,462.35	8,250.20	8,586.81	8,755.11	DJPK
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics		94	100	100	100	100						
Output	Indeks Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia			87	87	87	87						
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							20.40	20.40	20.40	21.23	21.65	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	20.40	20.40	20.40	21.23	21.65	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	6,172.49	6,927.85	6,172.49	6,424.32	6,550.24	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,748.20	2,503.56	1,748.20	1,819.52	1,855.19	
	Layanan Perantoran							4,424.29	4,424.29	4,424.29	4,604.80	4,695.05	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,057.32	514.10	2,057.32	2,141.26	2,183.23	
	Pengembangan SDM		538 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	2,057.32	514.10	2,057.32	2,141.26	2,183.23	
Kegiatan	4731 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							163.01	96.45	163.01	169.66	172.99	DJPK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas		100	100	100	100	100						
Output	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ljen yang ditindaklanjuti		98%										
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	163.01	96.45	163.01	169.66	172.99	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal												
Kegiatan	4733 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							31,738.52	31,196.86	44,964.79	45,384.14	46,524.33	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	84.1	84.1	84.1	84.1						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informat dan Komunikasi							20.00	2,129.87	3,326.68	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	20.00	2,129.87	3,326.68			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	28,910.00	22,857.80	35,185.86	39,538.09	41,320.57	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,858.37	2,640.72	2,299.11	2,646.90	2,740.11	
	Kerumahanggaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	732.96	499.75	589.25	678.38	702.27	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengeloalaannya		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	259.70	173.29	203.20	233.93	242.17	
	Layanan Perantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	25,058.97	19,544.04	32,094.31	35,978.87	37,636.01	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,870.28	5,848.98	5,817.33	5,115.07	4,447.05	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kendaraan Bermotor		-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	5.848.98	2.082.96	2.082.96	2.082.96	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		11 Unit	-	147 Unit	147 Unit	147 Unit	500.00	-	2.364.09	2.364.09	2.364.09	
	Gedung/Bangunan		610 m2	-	610 m2	610 m2	-	1.370.28	-	1.370.28	668.02	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							938.24	360.20	634.93	730.97	756.72	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.05	-	10.28	11.83	12.25	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	411.29	107.67	292.46	336.70	348.56	
	Dokumen Perencanaan Unit		84 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	90.00	23.56	65.80	75.76	78.43	
	Laporan Keuangan Unit		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	160.00	41.89	73.19	84.26	87.23	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	102.70	26.89	76.08	87.58	90.67	
	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	160.20	160.20	117.13	134.85	139.60	
Kegiatan	4734 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							8.242.59	1.788.49	6.283.22	7.233.68	7.488.43	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Perspektif Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Komunikasi		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							8.242.59	1.788.49	6.283.22	7.233.68	7.488.43	
	Layanan Informasi dan Dokumentasi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1.386.09	573.94	1.192.38	1.372.75	1.421.09	
	Strategi Komunikasi		9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3.851.36	374.05	2.732.42	3.145.76	3.256.54	
	Publikasi Media Elektronik		6 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	2.205.14	740.50	1.773.50	2.041.78	2.113.68	
	Iklan dan Media Placement		5 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	800.00	100.00	584.92	673.40	697.11	
Kegiatan	4735 Pengelolaan Organisasi dan SDM							8.513.83	5.556.07	7.583.89	8.271.91	8.495.66	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit		100	100	100	100	100						
Output	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM		96%	96%	96%	96%	96%						
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							625.56	117.91	457.37	526.56	545.10	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	625.56	117.91	457.37	526.56	545.10	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.543.23	4.303.95	4.587.02	4.821.70	4.923.94	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	45.00	145.00	32.90	37.88	39.21	
	Standar Mutu Layanan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	494.08	154.79	397.37	457.48	473.59	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4.004.15	4.004.15	4.156.75	4.326.34	4.411.14	
	Layanan Manajemen SDM Internal							3.345.04	1.134.22	2.539.51	2.923.66	3.026.62	
	Pengelolaan Jafung		1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	42.70	-	31.22	35.94	37.21	
	Pengembangan SDM		512 Orang	512 Orang	533 Orang	533 Orang	533 Orang	2.989.08	976.25	2.246.31	2.586.11	2.677.19	
	Administrasi Kepegawaian		512 Orang	512 Orang	533 Orang	533 Orang	533 Orang	313.26	157.97	261.97	301.60	312.22	
Kegiatan	4736 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							404.10	94.00	303.51	349.43	361.73	DJPPR
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/(Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Indeks Efektivitas Komunikasi	-	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)						
	Komunikasi Publik	12 Layanan	-	-	-	-	-	896.54	200.02	896.54	933.12	951.40	
	Layanan Kepustakaan	60 Volume	-	-	-	-	-	107.36	-	-	-	-	
	Publikasi Media Cetak	-	-	-	-	-	-	789.18	-	-	-	-	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	200.02	896.54	933.12	951.40		
Kegiatan	4740 Pengelolaan Organisasi dan SDM						11,166.39	6,471.52	11,166.39	11,621.98	11,849.77		
	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Learning Organization (ITJEN)	90%	-	-	-	-	-						
Output	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	-	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	5	4	4	4	4	4	216.59	21.41	216.59	225.43	229.85	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Ketenagakerjaan Unit Eselon I	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	216.59	21.41	216.59	225.43	229.85	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,841.72	4,303.74	4,841.72	5,039.26	5,138.03	
	Layanan Perencanaan	709 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	5,992.12	2,146.36	6,108.09	6,357.29	6,481.90	
	Pengembangan SDM	709 Orang	-	-	-	-	-	5,661.98	2,056.06	5,661.98	5,892.99	6,008.49	
	Administrasi Kepegawaian	709 Orang	-	-	-	-	-	75.37	-	-	-	-	
	Pengelolaan Jafung	488 Orang	-	-	-	-	-	254.77	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM	-	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang		90.30	446.10	464.30	473.40	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13 Laporan	-	-	-	-	-	115.97	-	-	-	-	
Kegiatan	Laporan Penilaian Integritas							115.97					
	4741 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							24,640.19	12,959.27	24,640.19	25,645.50	26,148.16	
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
	Tingkat Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	73 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	60 Indeks						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Ijtjen yang Ditindaklanjuti	82 Persen	82 Persen	82 Persen	82 Persen	82 Persen	82 Persen						
Output	Layanan Manajemen SDM Internal	1	-	-	-	-	-	147.79	-	-	-	-	
	Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai	Rekomendasi						147.79	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3	10	10	10	10	10	24,492.40	12,959.27	24,640.19	25,645.50	26,148.16	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal Negara	3	48	48	48	48	48	924.34	362.43	924.34	962.05	980.90	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara	2	25	25	25	25	25	5,309.57	2,364.05	5,309.57	5,526.20	5,634.51	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara	3	40	40	40	40	40	1,198.54	1,075.05	1,198.54	1,247.44	1,271.89	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	8	87	87	87	87	87	2,006.25	1,858.23	2,006.25	2,088.10	2,129.03	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	7,584.06	3,610.61	7,584.06	7,893.49	8,048.20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4746 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							2,051.75	1,532.03	2,051.75	2,135.45	2,177.31	LNSW
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)						
Output	Komunikasi Publik		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2,051.75	1,532.03	2,051.75	2,135.45	2,177.31	
	Pembinaan/Edukasi Publik		10.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	982.93	-	982.93	1,023.03	1,043.08	
	Contact Center		10.000 Layanan	1.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	1,018.49	1,532.03	1,018.49	1,060.04	1,080.82	LNSW
	Publikasi Media Cetak		10 Layanan	-	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	50.33	-	50.33	52.38	53.41	
Kegiatan	4747 Pengelolaan Organisasi dan SDM							9,675.41	7,280.41	9,675.41	10,070.16	10,267.54	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		94%	94%	94%	94%	94%						LNSW
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							7,796.44	7,280.41	7,796.44	8,114.52	8,273.57	
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		2 Layanan	4 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	233.10	413.15	233.10	242.61	247.37	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Layanan	-	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	156.57	-	156.57	162.95	166.15	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,406.77	6,867.26	7,406.77	7,708.96	7,860.05	
	Layanan Manajemen SDM Internal							1,878.98	-	1,878.98	1,955.64	1,993.97	LNSW
	Pengembangan SDM		243 Orang	-	243 Orang	243 Orang	243 Orang	1,710.44	-	1,710.44	1,780.23	1,815.12	
	Administrasi Kepegawaian		243 Orang	-	243 Orang	243 Orang	243 Orang	168.53	-	168.53	175.41	178.85	
Kegiatan	4748 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							41.51	-	41.51	43.21	44.05	LNSW
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		97%	97%	97%	97%	97%						
Output	Indeks efektivitas UKI		75	75	75	75	75						
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	41.51	-	41.51	43.21	44.05	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal							41.51	-	41.51	43.21	44.05	LNSW
Kegiatan	4749 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							55,418.00	65,037.55	51,022.45	53,002.16	54,041.00	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		92%	92%	92%	92%	92%						
Output	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	48,375.69	62,292.55	48,375.69	50,349.42	51,336.26	LNSW
	Operasional Sistem INSW		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	23,510.81	28,895.00	23,510.81	24,470.05	24,949.66	
	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	24,249.40	32,745.30	24,249.40	25,238.77	25,733.45	
	Lisensi Sistem INSW		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	615.48	652.25	615.48	640.60	653.15	
	Sistem Informasi Pemerintahan		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	4,542.32	-	4,542.32	152.74	155.74	
	Design Teknis Perancangan Sistem		3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	128.28	-	128.28	133.51	136.13	LNSW
	Infrastruktur Sistem INSW		-	-	-	-	-	4,414.04	-	18.48	19.23	19.61	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Informasi Pemerintahan Sistem INSW Generasi II (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,500.00	2,745.00	2,500.00	2,500.00	2,549.00	
								2,500.00	2,745.00	2,500.00	2,500.00	2,549.00	
Kegiatan	4750 Legislasi dan Litigasi							10,757.39	5,556.91	10,757.39	11,196.29	11,415.74	Setjen
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Reformasi Hukum		95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks						
	Indeks Kualitas Penanganan Regulasi		95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks						
	Indeks Kualitas Advokasi Keuangan Negara		80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks						
	Indeks efektivitas penanganan/ penyelesaian regulasi (SETJEN)		95 Indeks	0	0	0	0						
	Indeks putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang dinenungkan		90 Indeks	0	0	0	0						
Output	Peraturan Menteri							2,065.02	407.83	2,065.02	2,149.27	2,191.39	
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Telaahan Hukum		105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	2,065.02	407.83	2,065.02	2,149.27	2,191.39	
	Peraturan lainnya		85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	162.48	5.91	162.48	169.11	172.43	
	Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan							162.48	5.91	162.48	169.11	172.43	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	8,529.90	5,143.17	8,529.90	8,877.91	9,051.92	
	Layanan Hukum		100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	17.66	10.86	17.66	18.38	18.75	
	Layanan Bantuan Hukum		324 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	8,512.23	5,132.30	8,512.23	8,859.53	9,033.18	
Kegiatan	4751 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)							28,819.77	7,794.26	25,097.14	26,121.12	26,633.09	Setjen
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks rata-rata capaian kualitas kajian/rekomendasi		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Indeks Penyelesaian Administrasi Sengketa Pajak		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Tingkat Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Pushaka		100%	88.50%	88.50%	88.50%	88.50%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							17,173.08	4,527.96	17,153.75	17,853.64	18,203.57	
	Kajian/Suran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan		12 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	5,003.01	1,012.51	5,003.01	5,207.14	5,309.20	
	Perizinan Profesi Keuangan		260 Rekomendasi Kebijakan	-	260 Rekomendasi Kebijakan	260 Rekomendasi Kebijakan	260 Rekomendasi Kebijakan	36.80	-	36.80	38.31	39.06	
	Rekomendasi/Kajian Perpajakan		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1,267.34	826.78	1,267.34	1,319.05	1,344.90	
	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		7 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	10,846.60	2,688.66	10,846.60	11,289.14	11,510.41	
Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)			1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	19.32	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi							1,167.38	-	1,167.38	1,215.01	1,238.82	
	Koordinasi Tugas Komite Pengawas Perpaikalan		6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan		1,167.38	-	1,167.38	1,215.01	1,238.82	
	Penanganan Perkara							924.26	268.50	924.26	961.97	980.83	
	Administrasi Persidangan		13.000 Perkara	15.000 Perkara	15.000 Perkara	15.000 Perkara		924.26	268.50	924.26	961.97	980.83	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							7,999.44	2,997.80	5,851.75	6,090.50	6,209.87	
	Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri		162 Laporan	538 Laporan	538 Laporan	538 Laporan		5,851.75	2,997.80	5,851.75	6,090.50	6,209.87	
	Dukungan Manajerial Pelaksanaan PFM-MDTF		1 Laporan	-	-	-	-	2,147.69	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,555.61	-	-	-	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan		227 Laporan	-	-	-	-	1,555.61	-	-	-	-	
Kegiatan	4752 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan							3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	Sejalan
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Imbal Hasil Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan		100	100	100	100	100						
Output	Indeks Luaran Riset dan Talenta yang Berkualitas		100	100	100	100	100						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	390,850.95	192,714.20	192,714.20	192,714.20	192,714.20	
	Kerumahanggaan		10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	65,903.75	16,501.03	16,501.03	16,501.03	16,501.03	
	Sosialisasi Program Layanan LPDP		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,708.62	1,708.62	1,708.62	1,708.62	1,708.62	
	Layanan Perkantoran							323,236.58	174,504.55	174,504.55	174,504.55	174,504.55	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,878.31	2,014.82	2,014.82	2,014.82	2,014.82	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		200 Orang	228 Orang	228 Orang	228 Orang	228 Orang	2,878.31	2,014.82	2,014.82	2,014.82	2,014.82	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							571.83	400.28	400.28	400.28	400.28	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	571.83	400.28	400.28	400.28	400.28	
	Hasil Kelolaan Dana		10.667 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	3,526,335.02	3,230,754.77	3,230,754.77	3,230,754.77	3,230,754.77	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,161.32	3,612.93	3,612.93	3,612.93	3,612.93	
	Seleksi Beasiswa		-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	-	57,338.50	57,338.50	57,338.50	57,338.50	
	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Beasiswa		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,608,369.79	2,608,369.79	2,608,369.79	2,608,369.79	2,608,369.79	
	Penilaian Program dan Penerima Beasiswa		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	773.00	773.00	773.00	773.00	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi		23 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
	Persiapan Kebraangkatan (PK) Penerima Beasiswa		-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	-	9,001.19	9,001.19	9,001.19	9,001.19	
	Seleksi Riset		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	664.37	664.37	664.37	664.37	
	Penilaian Program dan Penerima Riset		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	994.99	994.99	994.99	994.99	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset		10.500 Orang	-	-	-	-	1,750,192.77	-	-	-	-	
	Hasil Kelolaan Dana		25 Orang	-	-	-	-	1,220,980.93	-	-	-	-	
	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)		1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	13,516.94	508,268.98	508,268.98	508,268.98	508,268.98	
	Beasiswa Alfrmasi (PN)		1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	5,070.97	73,005.22	73,005.22	73,005.22	73,005.22	
	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Riset (PN)		-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	8,445.97	324,236.48	324,236.48	324,236.48	324,236.48	
								-	111,027.29	111,027.29	111,027.29	111,027.29	
Kegiatan	4753 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							1,219,520.29	739,821.52	1,477,820.72	1,618,417.82	1,683,579.05	Sejalan
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan	4757 Pengelolaan Organisasi dan SDM							26,745,527.97	27,309,355.86	26,742,853.06	26,754,823.04	26,760,807.94	Setjen	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal				100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)							
	Indeks Evaluasi AKIP Setjen				100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)							
Output	Peraturan Menteri		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	72.66	99.96	72.66	75.62	77.11		
	Peraturan Menteri terkait Keorganisasian							72.66	99.96	72.66	75.62	77.11		
	Peraturan lainnya							3,088.53	-	3,088.53	3,214.54	3,277.54		
	Peraturan Lainnya terkait Keorganisasian		11 Peraturan	-	11 Peraturan	11 Peraturan	11 Peraturan	2,758.76	-	2,758.76	2,871.31	2,927.59		
	Peraturan Lainnya terkait SDM		52 Peraturan	-	52 Peraturan	52 Peraturan	52 Peraturan	329.77	-	329.77	343.23	349.95		
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							807.84	202.00	807.84	840.80	857.28		
	Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS		1	1	1	1	1	807.84	202.00	807.84	840.80	857.28		
	Rekomendasi Pengelolaan Keuangan		1	1	1	1	1	235,752.23	98,816.03	235,752.23	245,370.92	250,180.19		
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							233,502.38	98,816.03	233,502.38	243,029.28	247,792.65		
	Rekomendasi Pengelolaan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan		1	1	1	1	1	2,249.84	-	2,249.84	2,341.64	2,387.53		
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I		1	1	1	1	1	26,461,416.52	27,197,513.98	26,438,741.61	26,459,119.85	26,450,308.96		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		38,815 Layanan	38,815 Layanan	38,815 Layanan	38,815 Layanan	38,815 Layanan	6,805.88	5,083.41	6,805.88	7,083.56	7,222.40		
	Kesehatan Pegawai		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	162.32	91.44	162.32	168.94	172.25		
	Laporan Analisa Beban Kerja		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	512.73	85.51	512.73	533.65	544.11		
	Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	401.30	186.25	401.20	417.68	425.86		
	Laporan Hasil Survey Keorganisasian		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	96.00	96.00	96.00	96.00		
	Laporan Pengelolaan Pelayanan Publik Kementerian Keuangan		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	361.90	361.90	361.90	361.90		
	Laporan Pengelolaan Pelayanan Fungsional di Lingkungan Kemenkeu		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	360.32	200.73	360.22	375.02	382.37		
	Dokumen Infrastruktur Organisasi Kementerian Keuangan		150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	183.60	43.90	183.50	191.09	194.84		
	Asistensi Pembangunan, Penilaian, dan Money Keberlanjutan Z/ WBK/WBKM kepada Setker Lingkup Kemenkeu		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	844.35	580.65	844.25	878.80	896.02		
	Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	26,449,471.11	27,190,784.19	26,449,013.61	26,449,013.22	26,449,013.22		
	Laporan Proses Kementerian Keuangan		2,432 Orang	2,432 Orang	2,432 Orang	2,432 Orang	2,432 Orang	44,390.20	12,723.89	44,390.20	46,201.32	47,106.87		
	Layanan Manajemen SDM Internal		60,000 Orang	60,000 Orang	74,000 Orang	74,000 Orang	74,000 Orang	7,933.30	1,186.05	7,933.30	8,256.98	8,418.82		
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Kementerian Keuangan		7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	802.37	2,678.82	2,678.82	2,788.11	2,842.76		
	Pengelolaan Jajug		2,100 Orang	4,350 Orang	4,350 Orang	4,350 Orang	4,350 Orang	901.24	108.15	901.24	938.01	956.40		
	Rekrutmen Pegawai Kemenkeu		14,047 Orang	13,468 Orang	13,468 Orang	13,468 Orang	13,468 Orang	9,562.50	7,832.16	9,562.50	9,952.65	10,147.72		
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		800 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	15,074.45	997.82	15,074.45	15,689.49	15,997.00		
	Pengembangan SDM Tingkat Kementerian Keuangan							8,239.89	1,797.34	8,239.89	8,576.08	8,744.17		
Kegiatan	4759 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	Setjen	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi		92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi		92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	
Kegiatan	4761 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							2,852.18	-	-	-	-	Setjen
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Downtime Sistem TIK - Setjen	0.1 Persen	-	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Setjen	95 Persen	-	-	-	-	-						
	Tingkat Pemulihan Layanan TIK	100 Persen	-	-	-	-	-						
Output	Peraturan lainnya							13.00	-	-	-	-	
	Peraturan/Kebijakan Terkait TIK	2 Peraturan	-	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	
	Sistem Informasi Pemerintahan							2,839.18	-	-	-	-	
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	17 Layanan	-	-	-	-	-	523.05	-	-	-	-	
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	194.02	-	-	-	-	
	Sistem Pelaporan Keuangan Indonesia	1 Modul Aplikasi	-	-	-	-	-	108.48	-	-	-	-	
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	1,875.36	-	-	-	-	
	Sistem Informasi Property Nasional (PU)	1 Modul Aplikasi	-	-	-	-	-	138.27	-	-	-	-	
													DJP
Kegiatan	6199 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	
Sasaran Kegiatan	Penerimaan Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	-	-	-	-	-						
Output	Indeks efektivitas komunikasi	-	100	100	100	100	100	330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	DJPPR
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	
	Kehumasan Internal DJP												
Kegiatan	6389 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional							43,013.92	43,013.92	44,268.22	43,013.92	43,013.92	
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100	100	100	100	100	100						
	Persentase Penyaluran Dana Hibah	85	85	85	85	85	85						
Output	Komunikasi Publik							446.48	446.48	446.48	446.48	446.48	
	Strategi Komunikasi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	446.48	446.48	446.48	446.48	446.48	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6.70	268.20	6.70	6.70	6.70	6.70

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6,70	268,20	6,70	6,70	6,70	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1	1	1			36,472.73	36,796.86	36,472.73	36,472.73	36,472.73	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi dan Kinerja		Rekomendasi 12 Layanan	Rekomendasi 12 Layanan	Rekomendasi 12 Layanan	Rekomendasi 12 Layanan	Rekomendasi 12 Layanan	2,403.23	2,727.36	2,403.23	2,403.23	2,403.23	
	Layanan Perkantoran							34,069.51	34,069.51	34,069.51	34,069.51	34,069.51	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							333.30	75.48	1,587.60	333.30	333.30	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	333.30		333.30	333.30	333.30	
	Gedung dan Bangunan		-	-	500 m2	-	-	-	-	1,254.30	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							760.45	760.45	760.45	760.45	760.45	
	Pengembangan SDM		38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	760.45	760.45	760.45	760.45	760.45	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							859.75	873.75	859.75	859.75	859.75	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.85	494.85	480.85	480.85	480.85	
	Rekomendasi Satuan Pemeriksaan Intern		Rekomendasi 1 Dokumen	Rekomendasi 1 Dokumen	Rekomendasi 1 Dokumen	Rekomendasi 1 Dokumen	Rekomendasi 1 Dokumen	50.60	50.60	50.60	50.60	50.60	
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran							328.30	328.30	328.30	328.30	328.30	
	Hasil Kelolaan Dana							4,134.51	3,792.70	4,134.51	4,134.51	4,134.51	
	Hasil Kelolaan Dana Investasi		597 Milyar 17 Dokumen	596 Milyar 17 Dokumen	596 Milyar 17 Dokumen	596 Milyar 17 Dokumen	596 Milyar 17 Dokumen	925.20	660.84	925.20	925.20	925.20	
	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman							3,209.31	3,131.86	3,209.31	3,209.31	3,209.31	
Kegiatan	6609 Legislasi dan Litigasi							223.23	94.82	223.23	232.34	236.89	DJPB
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
Output	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95,5	95,5	95,5	95,5						
	Peraturan Lainnya		6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	194.25	67.96	194.25	202.18	206.14	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan							194.25	67.96	194.25	202.18	206.14	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	28.98	26.86	28.98	30.17	30.76	
	Layanan Bantuan Hukum							28.98	26.86	28.98	30.17	30.76	
Kegiatan	6885 Legislasi dan Litigasi							122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	Itjen
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi		85 Indeks	-	-	-	-						
Output	Nilai Kinerja Reformasi Hukum		-	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks						
	Peraturan lainnya							122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	
Kegiatan	6990 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua							57,875.08	66,011.37	57,875.08	60,236.38	61,417.02	DJPB
Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus Badan Pengarah Papua yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Dukungan Kesekretariatan Badan Pengarah Papua		70%	70%	70%	70%	70%						
	Tingkat Efektivitas Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi Badan Pengarah Papua		70%	70%	70%	70%	70%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							25,544.89	11,344.85	25,544.89	26,587.12	27,108.23	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua		4 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	25,544.89	11,344.85	25,544.89	26,587.12	27,108.23	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	32,330.19	54,666.52	32,330.19	33,649.27	34,308.79	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,685.13	4,364.98	1,753.88	1,753.88	1,788.26	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	30,645.07	50,301.54	30,645.07	31,895.38	32,520.53	
Kegiatan	7061 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional							163,471.00	163,471.00	163,471.00	163,471.00	163,471.00	DJKN (BLU-LMAN)
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Aset yang Inovatif dan Berkelanjutan, serta Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang Optimal dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas BLU - LMAN		100	100	100	100	100						
	Persentase Realisasi Manfaat Non Finansial Pengelolaan Aset - LMAN		100	100	100	100	100						
	Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN - LMAN		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik												
	Kehumasan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	5,063.70	5,063.70	5,063.70	5,063.70	5,063.70	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4,178.24	4,178.24	4,178.24	4,178.24	4,178.24	
	Strategi Komunikasi		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	559.03	697.03	559.03	559.03	559.03	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							326.43	188.43	326.43	326.43	326.43	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								267.84	267.84	267.84	267.84	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	-	267.84	267.84	267.84	267.84	
	Kerumahanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	102,528.12	102,528.12	102,528.12	102,528.12	102,528.12	
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBHM		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi							49.58	49.58	49.58	49.58	49.58	
	Layanan Bantuan Hukum		Rekomendasi 60 Layanan	Rekomendasi 60 Layanan	Rekomendasi 60 Layanan	Rekomendasi 60 Layanan	Rekomendasi 60 Layanan	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	673.87	673.87	673.87	673.87	673.87	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							100,711.27	100,711.27	100,711.27	100,711.27	100,711.27	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	4,154.44	170.64	2,004.04	2,004.04	2,004.04	
	Kendaraan Bermotor		5 Unit	-	-	-	-	2,004.04	170.64	2,004.04	2,004.04	2,004.04	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,150.40	-	-	-	-	
	Pengembangan SDM		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	2,924.40	2,924.40	2,924.40	2,924.40	2,924.40	
	Administrasi Kepegawaian		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	2,600.80	2,770.80	2,600.80	2,600.80	2,600.80	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	323.60	153.60	323.60	323.60	323.60	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,052.75	2,052.75	2,052.75	2,052.75	2,052.75	
	Laporan Keuangan Unit		11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.22	66.22	66.22	66.22	66.22	
	Dokumen Perencanaan Unit		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	1,421.61	1,421.61	1,421.61	1,421.61	1,421.61	
	Rekomendasi Kepadatan Internal		5 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	370.87	370.87	370.87	370.87	370.87	
	Sistem Informasi Pemerintahan							194.06	194.06	194.06	194.06	194.06	
			18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	994.03	1,477.04	994.03	994.03	994.03	
	Pengelolaan Aset BUN							994.03	1,477.04	994.03	994.03	994.03	
	Perencanaan Pengelolaan Aset		190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	45,153.57	45,753.57	47,636.13	47,636.13	47,636.13	
	Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi		299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	4,251.75	4,251.75	4,485.51	4,485.51	4,485.51	
	Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		39,000 Unit	39,000 Unit	39,000 Unit	39,000 Unit	39,000 Unit	38,869.18	40,149.83	41,006.23	41,006.23	41,006.23	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2,032.63	1,351.98	2,144.38	2,144.38	2,144.38	
								-	3,232.95	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG PN)		-	1 Rekomendasi	-	-	-	-	3,232.95	-	-	-	-
	Pengelolaan Aset BUN							600.00	-	-	-	-	-
	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-
Kegiatan	7062 Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Tinggi							15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	BPPK
Sasaran Kegiatan													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi		365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)						
Output	Pendidikan Tinggi												
	Penerimaan Mahasiswa Baru		7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	11,100.38	10,000.38	11,100.38	11,100.38	11,100.38	
	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama		1.000 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	5,013.60	4,513.60	5,013.60	5,013.60	5,013.60	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.000 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	6,086.78	5,486.78	6,086.78	6,086.78	6,086.78	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Gedung/Bangunan		-	522 m2	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-
	Layanan Manajemen SDM Internal		-	-	-	-	-	-	900.26	900.26	900.26	900.26	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	900.26	900.26	900.26	900.26	900.26	
Kegiatan	7774 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							500,948.38	886,722.44	634,424.15	708,257.55	740,199.98	BaTU
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran		100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Kerumahainggaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	478,724.79	863,063.10	612,200.56	686,033.96	717,540.81	
	Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,281.23	3,213.66	3,281.23	3,413.10	3,482.03	
	Layanan Perkantoran		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-20.00	20.00	-20.00	20.82	-21.22	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							475,423.56	859,829.45	608,809.34	682,598.05	714,037.55	
	Kendaraan Bermotor		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22,219.89	23,655.34	22,219.59	22,219.59	22,655.17	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		15 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	430.08	430.08	430.08	430.08	438.51	
	Gedung/Bangunan		500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	5.39	1,437.14	5.39	5.39	5.49	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							21,784.12	21,788.12	21,784.12	21,784.12	22,211.17	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	Dokumen Perencanaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Laporan Pembendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Rencana Strategis Tingkat Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7775 Pengelolaan Organisasi dan SDM							6,715.60	16,886.02	6,715.60	6,989.60	7,126.59	BaTU
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Pengembangan Talenta Digital		95%	95%	95%	95%	95%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25	
	Layanan Perkantoran							2,899.81	4,852.47	2,899.81	3,018.17	3,077.34	
	Layanan Manajemen SDM Internal							326.64	992.20	326.64	339.97	346.63	
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Eselon I							424.12	797.21	424.12	441.43	450.08	
	Pengelolaan Jefung							2,149.05	3,063.06	2,149.05	2,236.77	2,280.63	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal												
Kegiatan	7776 Manajemen Sistem Informasi							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	BaTH
Sasaran Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi yang Berkualitas dan Efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi yang Bermilai Tambah		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	3,456.48	7,997.76	3,456.48	3,597.51	3,668.02	
	Sistem Informasi Property Nasional (PU) (PPPK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,394.27	1.00	2,394.27	2,394.27	2,441.20	
	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU) (DJPK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1,521.55	1.00	1,521.55	1,548.72	1,579.07	
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	10,709.11	12,777.56	10,709.11	11,146.05	11,364.51	
	Dukungan Teknis Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	194,708.81	618,606.67	194,708.81	194,708.81	198,525.14	
	Layanan Pusat Data dan Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	BaTH
Kegiatan	7777 Intelijen Ekonomi dan Keuangan							-	2,175.70	2,175.70	2,175.70	2,175.70	
Sasaran Kegiatan	Intelijen Ekonomi dan Keuangan yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Intelijen Ekonomi Keuangan		100 (Indeks)	-	-	-	-						
	Indeks Efektivitas Rekomendasi Intelijen Keuangan												
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		-	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)						
	Kebijakan Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1,180.96	1,180.96	1,180.96	1,180.96	
	Pengawasan dan Pengendalian Layanan							-	994.74	994.74	994.74	994.74	
	Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	994.74	994.74	994.74	994.74	
Kegiatan	7778 Manajemen Transformasi Strategik							2,958.98	4,056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	BaTH
Sasaran Kegiatan	Transformasi Teknologi Informasi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Terintegrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi ISRBTk		95%	-	-	-	-						
	Persentase Implementasi ISRBTk dan Data Analytics		-	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan												
	Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	2,958.98	4,056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	
	Rekomendasi Transformasi Kemenkeu (CTO)		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	116.60	81.80	116.60	121.36	123.74	
								2,842.38	3,975.16	2,842.38	2,958.35	3,016.33	
Kegiatan	7779 Legislasi dan Litigasi							-	41.95	24.30	25.29	25.79	DJSEF
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		-	85	85	85	85						
Output	Indeks Kerepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		-	95	95	95	95						
	Peraturan Lainnya							-	27.78	12.15	12.65	12.89	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	-	27.78	12.15	12.65	12.89	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	14.18	12.15	12.65	12.89	
	Layanan Bantuan Hukum		-	0 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	14.18	12.15	12.65	12.89	
Kegiatan													
Sasaran Kegiatan	7780 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							-	24,740.31	37,236.19	40,292.63	41,788.79	DJSEF
Indikator Kinerja Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Output	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		-	100	100	100	100						
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	84,1	84,1	84,1	84,1						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perangin Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	17,873.41	27,066.00	30,081.24	31,377.25	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	2,155.48	2,915.06	3,033.99	3,093.46	
	Dukungan Pimpinan dan Keptrokleran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	111.41	198.52	206.62	210.67	
	Kerumahanggaan		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	30.46	135.87	141.41	144.18	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	15,576.05	23,816.56	26,699.22	27,928.95	
	Layanan Perantoran		-					-	6,484.12	9,160.25	9,160.25	9,339.79	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	2 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	-	46.96	2,535.24	2,535.24	2,584.93	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	8 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	-	6,437.16	5,222.77	5,222.77	5,325.14	
	Kendaraan Bermotor		-	-	400 m2	400 m2	400 m2	-	-	1,402.24	1,402.24	1,429.73	
	Gedung/Barangun		-	-	-	-	-	-	382.78	1,009.93	1,051.14	1,071.74	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25.57	42.44	44.17	45.03	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	241.88	707.12	735.97	750.40	
	Dokumen Perencanaan Unit		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	63.28	105.74	110.05	112.21	
	Laporan Keuangan Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	17.30	17.30	18.01	18.36	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	34.75	137.34	142.94	145.75	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan												
Kegiatan													
Sasaran Kegiatan	7781 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							-	368.29	2,306.27	2,399.76	2,446.51	DJSEF
Indikator Kinerja Kegiatan	Perspsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 1		85	85	85	85	85						
Output	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Peraturannya		84.1	84.1	84.1	84.1	84.1						
	Regulasi Profesi Keuangan	1 Peraturan		-	-	-	-	15.91	-	-	-	-	-
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							15.91	-	-	-	-	-
	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis	1 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	2,985.43	-	-	-	-	-
	Perizinan Profesi Keuangan	260 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	2,675.22	-	-	-	-	-
	Komunikasi Publik							310.21	-	-	-	-	-
	Komite dan Sekretariat	1 Layanan		-	-	-	-	1,527.45	-	-	-	-	-
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12,161.17	23,866.98	13,677.45	14,790.49	15,285.55	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoliran	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	6,284.66	9,111.50	6,284.66	6,541.08	6,669.28	
	Kerumahainggaan	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	465.70	798.00	465.70	484.70	494.20	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.00	211.00	10.00	10.41	10.61	
	Layanan Perkantoran	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	5,400.81	13,746.48	6,917.09	7,754.31	8,111.46	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-	5,760.35	-	-	-	-
	Gedung/Bangunan	1 Paket		-	-	-	-	-	4,090.00	-	-	-	-
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Unit		-	-	-	-	-	1,670.35	-	-	-	-
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							412.90	658.17	412.90	429.75	438.17	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.22	111.00	21.22	22.08	22.51	
	Dokumen Perencanaan Unit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	235.71	111.00	235.71	245.32	250.13	
	Laporan Keuangan Unit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.87	111.00	52.87	55.03	56.11	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.44	211.00	34.44	35.84	36.54	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	68.67	114.17	68.67	71.47	72.87	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							7,218.82	-	-	-	-	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	175 Laporan		-	-	-	-	7,218.82	-	-	-	-	-
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			-	-	-	-	2,326.34	-	-	-	-	-
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	1 Rekomendasi Kebijakan		-	-	-	-	2,326.34	-	-	-	-	-
Kegiatan	7786 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							663.36	1,204.93	663.36	690.42	703.95	
Sasaran Kegiatan	Perspsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi												
Output	Komunikasi Publik	100		100	100	100	100						
	Pembinaan / Edukasi Publik	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	663.36	1,204.93	663.36	690.42	703.95	
Kegiatan	7787 Pengelolaan Organisasi dan SDM												
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara												
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal	96		96	96	96	96						
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Rekomendasi 12 Layanan		1 Rekomendasi 12 Layanan	1 Rekomendasi 12 Layanan	1 Rekomendasi 12 Layanan	1 Rekomendasi 12 Layanan	2,521.17	5,548.79	2,521.17	2,624.03	2,675.46	
	Layanan Perkantoran							5.00	211.00	5.00	5.20	5.31	
								2,516.17	5,337.79	2,516.17	2,618.83	2,670.15	

DJSPSK

DJSPSK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	1,093.90	1,573.78	1,093.90	1,138.53	1,160.84	
	Pengembangan SDM		327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	772.81	928.48	772.81	804.35	820.11	
	Administrasi Kepegawaian							226.19	403.21	226.19	235.42	240.04	
	Pengelolaan Jefung		87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	94.89	242.09	94.89	98.76	100.70	
Kegiatan	7788 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal												D/SPSK
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif							49.22	77.36	49.22	51.23	52.23	
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI)												
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal		92.5	93	94	95	96						
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	49.22	77.36	49.22	51.23	52.23	D/PPK
Kegiatan	7789 Pengolahan Data dan Informasi							6,481.27	3,148.33	6,481.27	6,736.12	6,868.15	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal serta Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Sistem TIK		100	80	80	80	80						
Output	Data dan Informasi Publik		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,481.27	3,148.33	6,481.27	6,736.12	6,868.15	
	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,092.25	791.36	3,092.25	3,208.82	3,271.72	
	Informasi Konsolidasi Kebutuhan Fiskal Nasional		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,080.37	307.23	1,080.37	1,124.45	1,146.49	
	Data Non Keuangan Daerah		3 Data	6 Data	6 Data	6 Data	6 Data	554.80	678.40	554.80	577.43	588.75	
	Data Keuangan Daerah (PU)		132 Data	132 Data	132 Data	132 Data	132 Data	1,753.86	1,371.34	1,753.86	1,825.41	1,861.19	

[illegible]

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.13.01.03 PRO-P: Kebijakan Tata Kelola Keuangan dan Penganggaran Pembangunan																						
Rekomendasi Hasil Money Penganggaran Pusat		Laporan	30	30	30	30	30	4.182,78	1.361,76	4.182,78	4.353,43	4.438,76						4.182,78	1.361,76	4.182,78	4.353,43	4.438,76
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	Persen	100	100	100	100	100															
	Alokasi TKD untuk infrastruktur	Trilyun Rupiah	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6															
	Persentase kinerja hibah dan daerah	persen	75	75	75	75	75															
07.13.02.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah																						
Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Orang	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.778,06	1.709,78	1.778,06	1.850,60	1.886,87						1.778,06	1.709,78	1.778,06	1.850,60	1.886,87
07.13.02.02 PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L																						
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L		Dokumen	1	1	1	1	1	327,19	157,00	327,19	340,54	347,21						327,19	157,00	327,19	340,54	347,21
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kesiambungan Fiskal	Imbal hasil (<i>yield</i>) SRN	Persen	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0															
PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan	Persentase realisasi penerimaan utang dari pengalokasian belanja negara	Persen	100	100	100	100	100															
07.14.01.01 PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan																						
Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia		Dokumen	1	1	1	1	1	118,45	256,69	664,39	764,89	791,83						118,45	256,69	664,39	764,89	791,83
07.14.01.02 PRO-P: Peraturan Mengenal Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Dalam Negeri																						
Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah		RFP	1	1	1	-	-	110,26	220,00	380,20	-	-						110,26	220,00	380,20	-	-

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025 – 2029

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perlelangan	a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang. c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum. d. Digitalisasi proses bisnis dalam era <i>society 5.0</i>. e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum. f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang. g. Meminimalisir adanya gugatan. h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945).	Kemenkeu (DJKN)	-	2026
2.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki Undang-Undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam. b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi. c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah transisi energi yang konkret. d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang Keuangan Negara. e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi. f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan. g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara. h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.	Kemenkeu (DJKN)	-	2026

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)	a. Tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. b. Terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. c. Terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. d. Meningkatnya kredibilitas Rupiah.	Kemenkeu-DJPb	-	2026
4.	RUU tentang Penilai	a. Mandat Konstitusi. UU 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UU pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang misalnya Undang-Undang dibidang sumber daya alam dan atau Undang-Undang lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU seperti UU Pengadaan tanah, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan lainnya. Pasal 33 UU NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (<i>auxiliary state organs</i>) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk	Kemenkeu-DJKN	-	2025

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya. c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (<i>bestuurzorg</i>). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksanaan pelayanan publik (<i>beesturzorg</i>) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai <i>intermediary information provider</i>, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu <i>backbone</i> kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses <i>Initial Public Offering</i> (IPO) sampai dengan likuidasi emiten (perusahaan). d. Mewujudkan tata kelola yang baik. Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan <i>good governance</i>, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu juga Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Di mana dari profesi tersebut hanya penilai yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di pasar modal dan perbankan di sektor keuangan yang belum memiliki undang-undang untuk			

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mengatur pengawasan, profesional kerahasiaan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang diisyaratkan. f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA